



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 80/PHPU.BUP-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 94/PHPU.BUP-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 134/PHPU.BUP-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025**

**PERIHAL**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI  
KABUPATEN LABUHAN BATU  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI  
KABUPATEN BUTON SELATAN  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI  
KABUPATEN TOBA  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI  
KABUPATEN MERANGIN  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM WALIKOTA  
KOTA AMBON  
TAHUN 2024**

**ACARA**

**PEMERIKSAAN PERSIDANGAN  
MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN  
PIHAK TERKAIT DAN KETERANGAN BAWASLU  
SERTA PENGESAHAN ALAT BUKTI PARA PIHAK**

**J A K A R T A  
KAMIS, 23 JANUARI 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2024
- Pemohon: Hendri Syahputra Daulay dan Ellya Rosa Siregar

**PERKARA NOMOR 80/PHPU.BUP-XXIII/2025**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024
- Pemohon: Aliadi dan La Ode Rusyamin

**PERKARA NOMOR 94/PHPU.BUP-XXIII/2025**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024
- Pemohon: Poltak Sitorus dan Anugerah Puriam Naiborhu

**PERKARA NOMOR 134/PHPU.BUP-XXIII/2025**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024
- Pemohon: Hardodi dan La Ode Amiruddin

**PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024
- Pemohon: Wa Ode Nurhayati dan M. Yacub Rahman

**PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2024
- Pemohon: Nalim dan Nilwan Yahya

**PERKARA NOMOR 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Ambon Tahun 2024
- Pemohon: Mohamad Tadi Salamessy dan Emmylh Dominggus Luhukay

**TERMOHON**

KPU RI

**ACARA**

Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak

**Kamis, 23 Januari 2025, Pukul 13.02 – 16.19 WIB**

**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

## **SUSUNAN PERSIDANGAN**

### **HAKIM KONSTITUSI**

- |                   |           |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra     | (Ketua)   |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani     | (Anggota) |

### **PANITERA PENGGANTI**

1. Andriani Wahyunintyas Novitasari
2. Oly Viana Agustine

**Pihak yang Hadir:****A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 59/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

1. Akhyar Idris Sagala
2. Amir Mahmud Daulay

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 80/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

1. Eka Rahmawati
2. La Ode Aliyudin

**C. Pemohon Perkara Nomor 94/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

1. Poltak Sitorus

**D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 94/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

1. Marudut Hutajulu

**E. Pemohon Perkara Nomor 134/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

1. Hardodi

**F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 134/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

1. Sabirul Awal

**G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 143/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

1. Zubair
2. Muamar Lasipa

**H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 180/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

1. Yuskandar
2. Erick Abdullah

**I. Pemohon Perkara Nomor 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025:**

1. Mohamad Tadi Salampessy

**J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025:**

1. Edi Irsan Elys

**K. Termohon:**

- |                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| 1. Wahyuningsih    | 5. Iskandar                 |
| 2. Hastun          | 6. Nasruddin                |
| 3. Riduan Marpaung | 7. Alber Trisman            |
| 4. Suwardi Singka  | 8. Vica Jillyan Edsti Saija |

**L. Kuasa Hukum Termohon:**

- |                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Luhut Parlinggoman Siahaan | 4. Fajar Maulana Y. |
| 2. Ridwan                     | 5. Saleh            |
| 3. Henry Simon Sitingjak      | 6. Dalili           |

**M. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 59/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

1. Ahmad Ansyari Siregar
2. Masmulyadi

**N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 80/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

1. Bryan Umar
2. Ardin Firanata

**O. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 94/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

1. Parulian Siregar
2. Rikardo Hutapea

**P. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 134/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

1. La Ode Sirlan
2. Randiman Madi

**Q. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 143/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

1. Baron Harahap Saleh
2. La Ode Muhammad Dzul Fijar

**R. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 180/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

1. Dhimas Pradana
2. Amin Fahrudin

**S. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025:**

1. Malik Raudhi Tuasamu
2. Dudi Usman Sahupala

**T. Bawaslu:**

- |                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| 1. Arman Harahap    | 8. Bahari                   |
| 2. Bernat Panjaitan | 9. Jibrar                   |
| 3. Rosni            | 10. Irmawati                |
| 4. Bahrudin La Puka | 11. Himun Zuhri             |
| 5. Daniel Pasaribu  | 12. Wein Arifin             |
| 6. Sibarani S.      | 13. Alberth Johan Talabessy |
| 7. Indra Eka Putra  | 14. Melkianus Watutamata    |

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.02 WIB****1. KETUA: SALDI ISRA [00:46]**

Kita mulai, ya.

Sidang untuk Perkara Nomor 59, 94, 143, 180, 246, 80, 134, PHPU, Bupati dan Wali Kota Tahun 2025 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat Siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu.

Kita akan lanjutkan Sidang Pendahuluan dengan Agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu. Untuk perkara-perkara yang tadi disebutkan. Karena sekarang adalah jatahnya Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu, Pemohon diharap bisa bersabar, tidak interupsi dan segala macamnya, itu yang pertama.

Yang kedua, masing-masing pihak diberi kesempatan maksimal 15 menit untuk masing-masing nomor dan sampaikan apa yang ada dalam jawaban ... dalam keterangan. Kalau ada perbedaan antara yang disampaikan lisan, dengan yang disampaikan dalam keterangan tertulis, maka pedomannya adalah apa yang disampaikan dalam keterangan tertulis atau jawaban tertulis.

Yang terakhir, kalau ada yang mau menambahkan bukti, silakan, supaya bisa diverifikasi. Karena nanti kalau sudah mau dekat, itu agak susah menverifikasi sehingga tidak bisa disahkan.

Kita mulai sekarang, tanpa memperkenalkan masing-masing, itu akan terlalu banyak menghabiskan waktu. Kita mulai sekarang dari Perkara Nomor 59, Kabupaten Labuhanbatu. Silakan, Kuasa Termohon.

**2. KUASA HUKUM TERMOHON: LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN [02:48]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

**3. KETUA: SALDI ISRA [02:52]**

Walaikumsalam wr. wb.

**4. KUASA HUKUM TERMOHON: LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN [02:53]**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan menyampaikan bukan jawaban, tapi resume pokok-pokoknya saja, Yang Mulia.

**5. KETUA: SALDI ISRA [03:00]**

Ya.

**6. KUASA HUKUM TERMOHON: LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN [03:01]**

Perkara Nomor 59, terkait Eksepsi Kewenangan Mahkamah Konstitusi, anggap dibacakan.

Kedudukan Hukum Pemohon. Bahwa jika mengacu kepada ketentuan Pasal 158 ayat (2), sebagaimana telah Termohon jelaskan di dalam jawaban, dan ini resumenya saja, maka Pemohon baru dapat memenuhi syarat untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan ambang batas presentase selisih suara terbanyak yaitu 1%. Jika tidak melebihi jumlah selisih suara dari 2.317 suara, maka selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon yaitu 24.494 atau 10,57%.

Terkait tenggang waktu, memenuhi syarat tenggang waktu. Permohonan Pemohon kabur atau obscur libel, anggap dibacakan.

Dalam Pokok Permohonan.

Terkait dalil Pemohon bahwa pemilih terdaftar di DPT TPS asal tetapi menggunakan hak pilih, menggunakan e-KTP di TPS tujuan. Maka kami tanggapai bahwasannya pemilih DPK atau tambahan dan pemilih pindahan atau DPTb dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa keberadaan pemilih tambahan atau DPK pemilih pindahan atau DPTb tidak serta merta dapat diartikan bahwa telah membuka peluang adanya lebih dari satu orang pemilih menggunakan hak pilih.

Bahwa keberadaan pemilih yang tidak tercantum dalam DPT, namun memberikan suara dengan menggunakan e-KTP sejumlah 1.722 tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran sepanjang pelaksanaan pemberian suara dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024.

Terkait dalil Pemohon yang mengklaim bahwasannya pemilih dari luar Labuhanbatu, berdasarkan NIK, namun menggunakan hak pilihnya. Bahwa tuduhan yang disampaikan oleh Pemohon yang mempermasalahkan ketidaksesuaian NIK pada KTP serta menyatakan bahwa individu yang bersangkutan tidak berhak menggunakan hak pilih di TPS adalah tidak tepat dan tidak berdasar. Bahwa keberadaan NIK tidak secara otomatis menentukan keabsahan atau penghapusan hak pilih. Hal

ini karena NIK memiliki sifat yang berlaku seumur hidup tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili sebagaimana diatur dalam Pasal 30 PP Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Petitum. langsung saja, Yang Mulia.

**7. KETUA: SALDI ISRA [06:23]**

Ya.

**8. KUASA HUKUM TERMOHON: LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN [06:23]**

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU Labuhanbatu Nomor 965 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024, pukul 10.00 WIB.

3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang benar.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya. Hormat Kami Kuasa Hukum Termohon, ditandatangani. Terima kasih, Yang Mulia.

**9. KETUA: SALDI ISRA [07:19]**

Terima kasih.

Ini kalau boleh ditanyakan ini kan 704 TPS, ya, betul? KPU?

**10. KUASA HUKUM TERMOHON: LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN [07:31]**

708.

**11. KETUA: SALDI ISRA [07:31]**

Berapa jumlah TPS-nya?

**12. TERMOHON: WAHYUNINGSIH [07:31]**

Jumlah TPS itu ada 708, Yang Mulia.

**13. KETUA: SALDI ISRA [07:34]**

708. Kalau kecamatannya 9, ya?

**14. TERMOHON: WAHYUNINGSIH [07:38]**

Ya.

**15. KETUA: SALDI ISRA [07:38]**

Nah, dari 708 TPS ini, berapa banyak saksi Pemohon yang tidak tanda tangan di TPS?

**16. TERMOHON: WAHYUNINGSIH [07:44]**

Setelah kami cek, semua sudah tanda tangan, Yang Mulia.

**17. KETUA: SALDI ISRA [07:46]**

Oke. semua tanda tangan, ya.  
Kalau di tingkat kecamatan?

**18. TERMOHON: WAHYUNINGSIH [07:52]**

Tanda tangan, Yang Mulia.

**19. KETUA: SALDI ISRA [07:54]**

Tanda tangan juga di 9 kecamatan?

**20. TERMOHON: WAHYUNINGSIH [07:58]**

Ya.

**21. KETUA: SALDI ISRA [07:59]**

Saksi Pemohon?

**22. TERMOHON: WAHYUNINGSIH [08:00]**

Ya, Yang Mulia.

**23. KETUA: SALDI ISRA [08:00]**

Kalau di rekap tingkat kabupaten?

**24. TERMOHON: WAHYUNINGSIH [08:03]**

Di tingkat kabupaten, saksi Pemohon tidak tanda tangan, Yang Mulia.

**25. KETUA: SALDI ISRA [08:08]**

Tidak tanda tangan, ya. Ada enggak catatan keberatan di tingkat kecamatan itu dari saksi? Enggak ada, ya?

**26. TERMOHON: WAHYUNINGSIH [08:13]**

Tidak ada.

**27. KETUA: SALDI ISRA [08:14]**

Oke.  
Sekarang Pihak Terkait, Silakan.

**28. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: MASMULYADI [08:23]**

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia. Kami masuk langsung ke Pokok Permohonan, Yang Mulia, karena dalam eksepsi relatif sama dengan Termohon, Yang Mulia.

Dalam Pokok Permohonan. Pihak Terkait telah memberikan keterangan dengan uraian-uraian sebagaimana tersebut dalam keterangan Pihak Terkait.

Selanjutnya poin 1 dengan ... sampai dengan poin 5 halaman 45 sampai dengan halaman 47. Mohon perkenan Yang Mulia untuk dianggap dibacakan.

**29. KETUA: SALDI ISRA [08:49]**

Ya.

**30. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: MASMULYADI [08:49]**

Poin 6 kami bacakan, Yang Mulia.

Bahwa koreksi Pihak Terkait atas dalil Pemohon pada poin 5 halaman 9 Permohonan Pemohon.

**31. KETUA: SALDI ISRA [08:56]**

Ini sekarang nomor berapa yang disampaikan, ini? Halaman berapa?

**32. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: MASMULYADI [08:58]**

Halaman 48, Yang Mulia ... eh, halaman 45, Yang Mulia.

**33. KETUA: SALDI ISRA [09:03]**

Oke, silakan.

**34. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: MASMULYADI [09:05]**

Bahwa koreksi Pihak Terkait atas dalil Pemohon pada poin 5 halaman 9 Permohonan Pemohon yang menyebut jumlah pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik, surat keterangan DPTb, dan tabel 2 yang disajikan Pemohon dengan penyebutan DPTb seluruh kecamatan pada Pilkada Labuhanbatu adalah keliru karena DPTb adalah untuk penyebutan pengguna hak pilih pindahan, sedangkan isi tabel yang Pemohon sebutkan adalah pengguna hak pilih dalam daftar hadir pemilih tambahan atau DPK yang memang benar jumlahnya 1.722.

7. Bahwa selanjutnya patut untuk dikoreksi dalil Pemohon pada poin 7 halaman 10 tentang kekeliruan penyebutan pemilih dalam DPTb sebagaimana tabel 2 Pemohon. Yang benar adalah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan atau DPK sehingga patut pula dikoreksi jika Pemohon menyebut jumlahnya tidak rasional tanpa menerangkan lebih lanjut ukuran atau standar apa yang digunakan Pemohon untuk menilainya. Demikian pula halnya tentang daftar hadir pemilih pindahan yang Pemohon maksud dalam tabel 3 halaman 10 Permohonan Pemohon.

8. Bahwa sangat tidak relevan dalil Pemohon yang mengaitkan secara langsung keunggulan perolehan suara Pihak Terkait dikarenakan pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda (vide poin 7 halaman 10 sampai dengan halaman 47 Permohonan Pemohon). Karena pada pokoknya nama-nama pemilih sebagaimana tersebut di dalam tabel 4, 5, dan 6 yang berisi 207 jumlah pemilih, ya, adalah pemilih tambahan sebagaimana daftar hadir pemilih

tambahan atau DPK menjadi masalah karena Pemohon mencari bukti kesalahan Termohon dari daftar hadir pemilih tambahan atau DPK dengan memeriksa Nomor Induk Kependudukan masing-masing pemilih tersebut menyebabkan alur pikir Pemohon menduga telah terjadi pelanggaran padahal faktanya nama-nama pemilih tersebut memilih dengan menggunakan KTP-el berdasarkan nomisili yang tertera di alamat KTP-el tersebut. Untuk seterusnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**35. KETUA: SALDI ISRA [10:51]**

Ya.

**36. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: MASMULYADI [10:52]**

Poin ... kami masuk ke poin 10, Yang Mulia.

**37. KETUA: SALDI ISRA [10:54]**

Poin 10, halaman berapa dari keterangan ini?

**38. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: MASMULYADI [10:57]**

Halaman 52, Yang Mulia.

**39. KETUA: SALDI ISRA [10:58]**

Halaman 52. Silakan.

**40. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: MASMULYADI [11:00]**

Bahwa sangat tidak relevan dalil Pemohon yang mengaitkan secara langsung keunggulan perolehan suara Pihak Terkait dikarenakan keterlibatan aparatur pemerintahan dan aparat dalam mengarahkan lurah dan kepala desa serta kepala lingkungan untuk memilih dan memenangkan Pihak Terkait (vide halaman (...))

**41. KETUA: SALDI ISRA [11:14]**

Ini Pihak Terkait ini, incumbent, ya?

**42. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: MASMULYADI [11:16]**

Tidak, Yang Mulia.

**43. KETUA: SALDI ISRA [11:18]**

Apa?

**44. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: MASMULYADI [11:18]**

Pemohon yang incumbent, Yang Mulia.

**45. KETUA: SALDI ISRA [11:20]**

Oh, Pemohon yang incumbent.  
Oke, lanjut.

**46. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: MASMULYADI [11:23]**

Justru sebaliknya, dalil yang demikian itu pantas untuk disematkan kepada Pemohon yang Calon Wakil Bupati Ellya Rosa Siregar adalah plt Bupati Labuhanbatu yang dengan kedudukan dan kewenangannya secara berjenjang dapat melakukan pengarahan dan intervensi untuk memilih dan memenangkan Pemohon. Hal tersebut dibuktikan dengan satu kepala lingkungan yang dipecat karena tidak mengikuti arahan Pemohon, maupun kepala lingkungan yang mengikuti arahan Pemohon, lurah dan kepala desa serta kepala dusun dan tenaga honor yang diarahkan Pemohon untuk memilih dan memenangkan Pemohon.

Telah Pihak Terkait uraikan, Yang Mulia, pada halaman (...)

**47. KETUA: SALDI ISRA [11:53]**

Ya.

**48. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: MASMULYADI [11:53]**

53 sampai dengan halaman 58 (...)

**49. KETUA: SALDI ISRA [11:55]**

Oke.

**50. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: MASMULYADI [11:55]**

Pada Permohonan a quo, mohon dianggap dibacakan.

**51. KETUA: SALDI ISRA [11:57]**

Sekarang masuk 59 yang black campaign atau 58 ada yang mau ditambahkan?

**52. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: MASMULYADI [12:03]**

Sudah cukup, Yang Mulia.

**53. KETUA: SALDI ISRA [12:05]**

Oke.

**KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: MASMULYADI [12:05]**

Kami masuk ke ... masuk ke poin 11, Yang Mulia.

Bahwa sifat masif yang didalilkan Pemohon justru tampak terang benderang dilakukan oleh Kuasa Hukum Pemohon yang bernama Akhyar Idris Sagala dalam bentuk melakukan black campaign, penggiringan opini miring kepada Pihak Terkait melalui akun media sosial Facebook miliknya pada tanggal 20 Oktober 2024 dengan mengedit dan memotong video rekaman acara kampanye Pihak Terkait, serta menyematkan kalimat hinaan berupa, "Inilah makanya dilarang wanita jadi pemimpin karena akan menimbulkan kerusakan. Ajaran agama saja sudah dirusak, tak tahu bedakan mana syahadat mana shalawat." (vide Bukti PT-33), Yang Mulia.

**54. KETUA: SALDI ISRA [12:55]**

Oke. Ke poin berapa lagi?

**KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: MASMULYADI [13:02]**

Poin 14, Yang Mulia. Halaman (...)

**55. KETUA: SALDI ISRA [13:05]**

61?

**KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: MASMULYADI [13:05]**

61, Yang Mulia.

**56. KETUA: SALDI ISRA [13:06]**

Oke.

**57. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: MASMULYADI [13:06]**

Bahwa dengan ... bahwa berkaitan dengan politik uang yang dilakukan Pemohon melalui Tim Pemohon dibuktikan dengan foto-foto dan video rekaman serta surat pernyataan (vide Bukti PT-36, PT-36.1 sampai dengan PT-36.9), Yang Mulia.

**58. KETUA: SALDI ISRA [13:18]**

Oke.

**59. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: MASMULYADI [13:22]**

Poin 15, 16 mohon ... poin 15 mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**60. KETUA: SALDI ISRA [13:26]**

Ya.

**61. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: MASMULYADI [13:27]**

16. Bahwa atas dalil Pemohon 149 angka 2 se ... tentang money politics, maka Pihak Terkait menanggapi.

1. Budi Tanjung alias Abdurrahman Tanjung dilaporkan di Bawaslu di Labuhanbatu atas dugaan pelanggaran pemilihan dan atas laporan tersebut, Budi Tanjung alias Abdurrahman Tanjung pada tanggal 5 Desember 2024 menerima surat undangan klarifikasi untuk hadir pada

tanggal 6 Desember 2024 dan telah pula memenuhi panggilan dimaksud dan memberikan keterangan yang ditandatangani dengan Berita Acara sumpah atau janji yang pada pokoknya menjelaskan jika uang yang diberikan Budi Tanjung alias Abdurrahman Tanjung kepada koordinator desa adalah sebagai pengganti transport dalam mencari saksi-saksi di TPS.

2. Laporan terhadap Budi Tanjung alias Abdurrahman Tanjung dihentikan Bawaslu Labuhanbatu tertanggal 10 Desember 2024 karena tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak ... atau tindak pidana pemilihan (vide Bukti PT-38, PT-38.1 sampai dengan PT-38.4).

Bahwa di Kecamatan Panai Hilir, Pihak Terkait kalah dalam perolehan suara dengan Pemohon. Yang artinya, tuduhan kepada Pihak Terkait adanya money politic di Kecamatan Panai Hilir tidak membuktikan fakta atas tuduhan tersebut kepada Pihak Terkait.

Kemudian poin 17, 18, 19, halaman 63, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**62. KETUA: SALDI ISRA [14:38]**

Ya.

**63. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: MASMULYADI [14:39]**

Poin 20.

20. Bahwa atas dalil Pemohon pada poin 16 halaman 130 sampai dengan halaman 136 tentang pengaduan Pemohon di Bawaslu Labuhanbatu, Pihak Terkait mendapatkan status laporan dari papan pengumuman yang ditempelkan di dinding depan kantor Bawaslu Labuhanbatu yang telah Pihak Terkait uraikan dalam tabel 5 pada halaman 64 dengan ... sampai dengan halaman 74, keterangan a quo.

Bahwa laporan pada Bawaslu sebagaimana tersebut pada tabel di atas terjadi, dilaporkan setelah telaksananya pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 dan setelah diketahuinya hasil pemilihan, yaitu Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak dan mengalahkan Pemohon dengan selisih suara sebesar 24.494 suara (vide Bukti PT-79 sampai dengan PT-106).

22. Bahwa jika menilik laporan pada Bawaslu sebagaimana yang Pemohon dalilkan pada Pokok Permohonan Pemohon poin 16 dan telah Pihak Terkait uraikan dalam tabel poin 15 di atas, laporan Nomor 1 sampai dengan Nomor 40 berstatus tidak diregistrasi karena perbaikan laporan tidak dipenuhi oleh pelapor. Secara otomatis telah membantah dalil Pemohon yang menyebut keberatan-keberatan pada Termohon dan Bawaslu Labuhanbatu tidak ditindaklanjuti.

**64. KETUA: SALDI ISRA [15:42]**

Oke.

**65. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: MASMULYADI [15:43]**

Oleh penyelenggara pemilu. Dan secara otomatis pula membuktikan telah ditindaklanjuti.

Poin 23 halaman 75, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**66. KETUA: SALDI ISRA [15:56]**

23? lanjut.

**67. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: MASMULYADI [15:58]**

Poin 24.

**68. KETUA: SALDI ISRA [15:59]**

Ya.

**69. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD ANSYARI SIREGAR [16:00]**

Dilanjutkan, Yang Mulia.

**70. KETUA: SALDI ISRA [16:04]**

Ya.

**71. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD ANSYARI SIREGAR [16:05]**

24. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tidak relevan dan patut untuk dikecualikan Permohonan Pemohon menunda pember ... pemberlakuan Pasal 58 ayat (2) huruf c Undang-Undang 10/2016 pada perkara a quo sehingga tidak berdasar Permohonan Pemohon agar dilakukan pemungutan suara ulang pada perolehan hasil pemilihan pada TPS sebagaimana dimaksud Pemohon yang telah Pihak Terkait uraikan dalam tabel pada Halaman 75 hingga Halaman 99 keterangan a quo.

25. Hal se ... halaman 99. Bahwa terdapat ... terhadap dalil Permohonan Pemohon di halaman 142 Permohonan Pemohon tentang Keterlibatan Aparat ... Aparatur Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Pihak Terkait merupakan dalil yang tidak beralasan hukum dan telah Pihak Terkait uraikan alasannya sebagaimana tersebut pada halaman 99 hingga 101 keterangan a quo.

Demikian pula halnya ... 26. Demikian pula halnya terhadap dalil Permohonan Pemohon tentang adanya kerjasama dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor 2, Termohon mengangkat perangkat desa dan kepala dusun menjadi KPPS (vide poin 9 sampai dengan 75 halaman 143 sampai dengan 149 Permohonan Pemohon) adalah dalil yang sangat tidak rasional dan tidak beralasan hukum dan cenderung mengada-ada apa lagi permohonan ... apa lagi Pemohon sama sekali tidak menerangkan dengan jelas dan tegas, kapan, di mana, dan dengan cara apa, serta apa yang mendasari Termohon bekerjasama dengan Pihak Terkait. Sedangkan rekrutmen seleksi KPPS dilakukan secara terbuka dan transparansi, serta tidak ada kekuatan dan/atau jabatan yang Pihak Terkait miliki untuk dapat mengintervensi Termohon. Justru dalil yang demikian itu menggambarkan perilaku Pemohon sendiri sebagai petahana, poin 27 (...)

**72. KETUA: SALDI ISRA [17:50]**

Ini Pihak Terkait, apa sih profesinya sebelum?

**73. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD ANSYARI SIREGAR [17:54]**

Dokter, Yang Mulia.

**74. KETUA: SALDI ISRA [17:55]**

Dokter.

**75. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD ANSYARI SIREGAR [17:55]**

Dokter ... dokter spesialis kandungan, Yang Mulia.

**76. KETUA: SALDI ISRA [17:58]**

Spesialisasi kandungan?

**77. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD ANSYARI SIREGAR [17:59]**

Ya, Yang Mulia.

**78. KETUA: SALDI ISRA [18:00]**

Ini nanti kalau jadi ini, gratis semua orang berobat.

**79. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD ANSYARI SIREGAR [18:02]**

Insha Allah, Yang Mulia.

**80. KETUA: SALDI ISRA [18:07]**

Jadi, bukan ... bukan ... apa ya ... bukan orang pemerintahan?

**81. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD ANSYARI SIREGAR [18:09]**

Tidak, Yang Mulia, tidak orang politik juga, Yang Mulia.

**82. KETUA: SALDI ISRA [18:11]**

Ini orang politik kalau sudah ikut pemilu, masa enggak orang politik?

**83. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD ANSYARI SIREGAR [18:14]**

Ya setelah mengikuti seleksi, Yang Mulia.

**84. KETUA: SALDI ISRA [18:17]**

Lanjut.

**85. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD ANSYARI SIREGAR [18:18]**

Poin 28 dan Halaman 102 sampai 103, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**86. KETUA: SALDI ISRA [18:23]**

Ya.

**87. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD ANSYARI SIREGAR [18:24]**

Selanjutnya. Bahwa terhadap dalil permohonan tentang adanya kerjasama dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor 2, Termohon mengangkat perangkat desa dan kepala dusun menjadi KPPS sampai ... yang dalam maksud Permohonan Pemohon ternyata perolehan suara Pemohon unggul, Yang Mulia, dibandingkan perolehan suara Pihak Terkait dengan uraian dalam tabel halaman 103-106, keterangan a quo.

Selanjutnya ke Petitum, Yang Mulia.

**88. KETUA: SALDI ISRA [18:52]**

Oke. Jadi, di daerah-daerah yang didalilkan ini, justru Pemohon yang unggul, ya?

**89. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD ANSYARI SIREGAR [18:58]**

Siap, Yang Mulia.

**90. KETUA: SALDI ISRA [18:58]**

Oke, itu kan katanya Pihak Terkait, nanti kan kita lihat bukti-buktinya semua.

**91. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD ANSYARI SIREGAR [19:04]**

Siap, Yang Mulia.

**92. KETUA: SALDI ISRA [19:05]**

Ini ada dibukti, kan ya?

**93. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD ANSYARI SIREGAR [19:06]**

Siap, Yang Mulia. Ada dibuktikan, Yang Mulia.

**94. KETUA: SALDI ISRA [19:08]**

Lanjut.

**95. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD ANSYARI SIREGAR [19:10]**

Petitem. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 965 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2024, bertanggal 4 bulan Desember Tahun 2024, pukul 10.00 WIB.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Pihak Terkait Ahmad Ansyari Siregar, Masmulyadi, Ahmad Rifai, Arianto dan Indra Pratama.

**96. KETUA: SALDI ISRA [19:54]**

Oke, cukup?

**97. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD ANSYARI SIREGAR [19:57]**

Cukup, Yang Mulia.

**98. KETUA: SALDI ISRA [19:57]**

*Mas Mulyadi*, itu nama, ya? Oh, saya kira Mus Mulyadi tadi. Ada yang tahu enggak Mus Mulyadi itu?

**99. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD ANSYARI SIREGAR [20:04]**

Penyanyi, Yang Mulia.

**100. KETUA: SALDI ISRA [20:06]**

Nah, ya. Sekarang Bawaslu, silakan.

**101. BAWASLU: ARMAN HARAHAHAP [20:10]**

Terima kasih, Yang Mulia.  
Assalamualaikum wr.wb.

**102. KETUA: SALDI ISRA [20:15]**

Walaikumsalam wr. wb.

**103. BAWASLU: ARMAN HARAHAHAP [20:16]**

Kami dari Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu. Langsung aja, Yang Mulia.

**104. KETUA: SALDI ISRA [20:20]**

Ya.

**105. BAWASLU: ARMAN HARAHAHAP [20:21]**

Bahwa Permohonan pada pokoknya mendalilkan terkait penetapan hasil penghitungan suara, angka 1 sampai 8, terkait ... terhadap dalil Permohonan tersebut bahwa berkenaan dengan ter ... dalil Permohonan Pemohon a quo tidak terdapat laporan dan permohonan sengketa pilihan.

**106. KETUA: SALDI ISRA [20:40]**

Oke. Berapa laporan yang Bapak terima selama menyelenggarakan apa ... sebagai penyelenggara di Kabupaten Labuhanbatu ini, Pak?

**107. BAWASLU: ARMAN HARAHAHAP [20:49]**

162.

**108. KETUA: SALDI ISRA [20:51]**

Wah ini paling banyak yang kita dengar ini, 162 laporan?

**109. BAWASLU: ARMAN HARAHAHAP [20:55]**

Ya.

**110. KETUA: SALDI ISRA [20:56]**

Kalau temuan?

**111. BAWASLU: ARMAN HARAHAHAP [20:58]**

1 temuan.

**112. KETUA: SALDI ISRA [20:59]**

Wah, 1 temuan. Dari 162 laporan ini, berapa yang ditindaklanjuti?

**113. BAWASLU: BERNAT PANJAITAN [21:06]**

Izin, Yang Mulia, yang menjawab?

**114. KETUA: SALDI ISRA [21:07]**

Ya.

**115. BAWASLU: BERNAT PANJAITAN [21:08]**

Yang diregistrasi 19 laporan.

**116. KETUA: SALDI ISRA [21:11]**

19 laporan diregistrasi, ya.

**117. BAWASLU: BERNAT PANJAITAN [21:13]**

Yang tidak diregistrasi, ada 142 laporan.

**118. KETUA: SALDI ISRA [21:16]**

Oke, 19 laporan diregistrasi. Dari 19 laporan yang diregistrasi, berapa yang terbukti?

**119. BAWASLU: BERNAT PANJAITAN [21:25]**

Ada 6, Yang Mulia.

**120. KETUA: SALDI ISRA [21:28]**

Terbukti?

**121. BAWASLU: BERNAT PANJAITAN [21:29]**

Ke KPU, direkomendasikan ke KPU.

**122. KETUA: SALDI ISRA [21:32]**

Apa itu, yang 6, itu? 1 apa?

**123. BAWASLU 59: BERNAT PANJAITAN [21:36]**

Terhadap pelanggaran KPPS.

**124. KETUA: SALDI ISRA [21:36]**

KPPS kenapa, Pak?

**125. BAWASLU: BERNAT PANJAITAN [21:50]**

KPPS yang pelaksanaan atau kotak suara yang tidak berjarak.

**126. KETUA: SALDI ISRA [21:56]**

Oke, pelaksanaan kotak suara yang tidak berjarak.

**127. BAWASLU 59: BERNAT PANJAITAN [22:01]**

Ya.

**128. KETUA: SALDI ISRA [22:02]**

Antara kotak suara 1 dengan kotak suara 2 begitu?

**129. BAWASLU: BERNAT PANJAITAN [22:01]**

Ya.

**130. KETUA: SALDI ISRA [22:02]**

Atau antara TPS satu dengan TPS lain?

**131. BAWASLU: BERNAT PANJAITAN [22:04]**

Antara kotak satu dengan kotak satu berikutnya.

**132. KETUA: SALDI ISRA [22:08]**

Itu berapa kotak di situ, Pak? Ada kotak gubernur?

**133. BAWASLU: BERNAT PANJAITAN [22:09]**

Ada kotak gubernur.

**134. KETUA: SALDI ISRA [22:10]**

Ada kotak bupati?

**135. BAWASLU: BERNAT PANJAITAN [22:11]**

Ada kotak bupati.

**136. KETUA: SALDI ISRA [22:12]**

2 kotak, ya?

**137. BAWASLU: BERNAT PANJAITAN [22:12]**

Ya.

**138. KETUA: SALDI ISRA [22:14]**

Oke, itu tidak berjarak?

**139. BAWASLU: BERNAT PANJAITAN [22:15]**

Tidak berjarak, Yang Mulia.

**140. KETUA: SALDI ISRA [22:16]**

Itu satu, ya, soal kotak yang tidak berjarak. Apa lagi, Pak?

**141. BAWASLU: BERNAT PANJAITAN [22:23]**

Berikutnya, mengenai foto pemilih memegang handphone pada saat memilih.

**142. KETUA: SALDI ISRA [22:29]**

Pemilih memegang handphone, ya?

**143. BAWASLU: BERNAT PANJAITAN [22:31]**

Ya.

**144. KETUA: SALDI ISRA [22:34]**

Itu emangnya dilarang, Pak?

**145. BAWASLU: BERNAT PANJAITAN [22:36]**

Dilarang membawa handphone ke bilik ... bilik suara.

**146. KETUA: SALDI ISRA [22:41]**

Saya kalau ikut milih pakaikan handphone saja masuk kotak suara itu.

**147. BAWASLU: BERNAT PANJAITAN [22:44]**

Itu laporan, Yang Mulia.

**148. KETUA: SALDI ISRA [22:45]**

Ha? Ini ... oke, yang kedua. Yang ketiga?

**149. BAWASLU: BERNAT PANJAITAN [22:52]**

Yang ketiga, sa ... 1 lembar C.Plano (...)

**150. KETUA: SALDI ISRA [23:00]**

C Plano 1 lembar.

**151. BAWASLU: BERNAT PANJAITAN [23:02]**

Diganti dengan karton, Yang Mulia, sebelum di ini ... dipindahkan. Jadi, menggunakan karton dulu menurunkan kertas, lalu ditulis, dipindahkan.

**152. KETUA: SALDI ISRA [23:11]**

Oke, tapi berubah enggak hasilnya?

**153. BAWASLU: BERNAT PANJAITAN [23:13]**

Tidak berubah.

**154. KETUA: SALDI ISRA [23:15]**

Oke.

**155. BAWASLU: BERNAT PANJAITAN [23:15]**

Secara aturan (...)

**156. KETUA: SALDI ISRA [23:16]**

4 apa, Pak?

**157. BAWASLU: BERNAT PANJAITAN [23:18]**

Ha?

**158. KETUA: SALDI ISRA [23:19]**

Yang keempat apa?

**159. BAWASLU: BERNAT PANJAITAN [23:22]**

Bukti D.Hasil di PPK diparaf oleh PPK, perubahan.

**160. KETUA: SALDI ISRA [23:29]**

Diparaf, boleh (...)

**161. BAWASLU: BERNAT PANJAITAN [23:29]**

Yang tidak dimenangkan (...)

**162. KETUA: SALDI ISRA [23:30]**

Tidak diparaf atau diparaf?

**163. BAWASLU: BERNAT PANJAITAN [23:34]**

Diganti ... diubah oleh PPK.

**164. KETUA: SALDI ISRA [23:38]**

Parafnya yang diganti?

**165. BAWASLU: BERNAT PANJAITAN [23:40]**

Diubah, diparaf sama PPK, Yang Mulia.

**166. KETUA: SALDI ISRA [23:42]**

Kalau diubah (...)

**167. BAWASLU: BERNAT PANJAITAN [23:42]**

Seharusnya (...)

**168. KETUA: SALDI ISRA [23:43]**

Ya.

**169. BAWASLU: BERNAT PANJAITAN [23:44]**

Itu tidak dibenarkan yang boleh itu dilaksanakan oleh KPPS di TPS.

**170. KETUA: SALDI ISRA [23:48]**

Oke.

**171. BAWASLU: BERNAT PANJAITAN [23:49]**

Ketika di PPK tidak dibenarkan lagi ada perubahan. Tetapi, dituangkan perubahan di dalam D.Hasil Kecamatan.

**172. KETUA: SALDI ISRA [23:54]**

Oke, tapi hasilnya berubah atau tidak? Hasil suaranya berubah atau tidak?

**173. BAWASLU: BERNAT PANJAITAN [23:59]**

Hasil tidak beru ... salah penjumlahan di D.Hasil, dibenarkan, Yang Mulia.

**174. KETUA: SALDI ISRA [24:04]**

Oke.

**175. BAWASLU: BERNAT PANJAITAN [24:05]**

Tetapi dilakukan perbaikan itu kesalahan.

**176. KETUA: SALDI ISRA [24:06]**

Oke.

**177. BAWASLU: BERNAT PANJAITAN [24:07]**

Di D.Hasil itu di kecamatan pada saat rekap kecamatan.

**178. KETUA: SALDI ISRA [24:10]**

Ini memang aneh-aneh, ya, kesalahan diperbaiki itu salah juga, biar salah terus, Pak. Nomor 5.

**179. BAWASLU: BERNAT PANJAITAN [24:16]**

Harusnya di (...)

**180. KETUA: SALDI ISRA [24:17]**

Ya.

**181. BAWASLU: BERNAT PANJAITAN [24:18]**

TPS, Yang Mulia.

**182. KETUA: SALDI ISRA [24:19]**

Oke, 5?

**183. BAWASLU: BERNAT PANJAITAN [24:23]**

Rekaman video dugaan money politics.

**184. KETUA: SALDI ISRA [24:26]**

Rekaman video money politics.

**185. BAWASLU: BERNAT PANJAITAN [24:30]**

Ya.

**186. KETUA: SALDI ISRA [24:31]**

    Apa yang Bapak lakukan dengan rekaman video itu? Kenapa terbukti?

**187. BAWASLU: BERNAT PANJAITAN [24:38]**

    Oh, mohon maaf, yang ini yang teregister, tapi yang terbukti ke ... ini register (...)

**188. KETUA: SALDI ISRA [24:43]**

    Tadi kan saya tanya, 162. Dari 162, 19 ter-register. Dari 19, 6 terbukti. Mana yang 6 itu? 1 soal KPPS, kotak yang tidak berjarak. Pemilih pakai handphone, Plano yang diganti dengan karton. D.Hasil diparaf oleh PPK. Yang kelima apa?

**189. BAWASLU: BERNAT PANJAITAN [25:08]**

    Yang kelima daftar ... foto. Bukti foto, video pemilih yang sedang sakit mencoblos tidak tertutup.

**190. KETUA: SALDI ISRA [25:30]**

    Oke, ini kotak keliling, ya?

**191. BAWASLU: BERNAT PANJAITAN [25:34]**

    Ya, Yang Mulia.

**192. KETUA: SALDI ISRA [25:35]**

    Ya. Ini TPS keliling.

**193. BAWASLU: BERNAT PANJAITAN [25:37]**

    Memberikan sanksi tertulis oleh KPU.

**194. KETUA: SALDI ISRA [25:40]**

Tidak ditutup. Ini artinya, Pak, terbuka auratnya ini kalau tidak ditutup.

**195. BAWASLU: BERNAT PANJAITAN [25:45]**

Ya. Tidak rahasia, Yang Mulia. He eh.

**196. KETUA: SALDI ISRA [25:48]**

Ya. Tidak memenuhi prinsip rahasia. Itu berapa kejadiannya, Pak, 1/2?

**197. BAWASLU: BERNAT PANJAITAN [25:52]**

Satu, Yang Mulia.

**198. KETUA: SALDI ISRA [25:53]**

Oke, apa yang keenam?  
Ini menguji daya ingat Bawaslu juga ini, dia ingat semua atau tidak.

**199. BAWASLU: BERNAT PANJAITAN [26:14]**

Bukti C.Pemberitahuan.

**200. KETUA: SALDI ISRA [26:17]**

C-6, ya?

**201. BAWASLU: BERNAT PANJAITAN [26:19]**

Ya.

**202. KETUA: SALDI ISRA [26:20]**

C.Pemberitahuan atau C.Panggilan?

**203. BAWASLU: BERNAT PANJAITAN [26:21]**

Bukti C.Pemberitahuan dan pernyataan KPPS mencoblos 2 kali ... oh, mohon maaf, Yang Mulia. Mohon maaf, Yang Mulia, salah.

**204. KETUA: SALDI ISRA [26:30]**

Ya, ya.

**205. BAWASLU: BERNAT PANJAITAN [26:31]**

Buk ... bukti foto lokasi TPS yang sempit tidak sesuai. Direkomendasikan ke KPU sanksi tertulis, peringatan tertulis.

**206. KETUA: SALDI ISRA [26:43]**

Oke. Nah, oke, dari 6 yang terbukti ini, ada enggak yang membuktikan dalil Pemohon?

**207. BAWASLU: BERNAT PANJAITAN [26:49]**

Tidak, Yang Mulia.

**208. KETUA: SALDI ISRA [26:50]**

Tidak ada satu pun?

**209. BAWASLU: BERNAT PANJAITAN [26:51]**

Tidak, Yang Mulia.

**210. KETUA: SALDI ISRA [26:52]**

Nah, oke, sekarang apa yang mau Bapak tambahkan lagi? Jadi, Bapak enggak terlalu repot-repot membacakannya ini, Pak.

**211. BAWASLU: BERNAT PANJAITAN [27:01]**

Baik, izin, Yang Mulia.

**212. KETUA: SALDI ISRA [27:02]**

Ya.

**213. BAWASLU: BERNAT PANJAITAN [27:03]**

Terkait mengenai Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait pemilihan tidak terdaftar.

**214. KETUA: SALDI ISRA [27:09]**

Ya.

**215. BAWASLU: BERNAT PANJAITAN [27:10]**

Itu ada di angka 2 poin 2, halaman 8, tabel 7, 8, 9, halaman 47.

**216. KETUA: SALDI ISRA [27:17]**

Ya.

**217. BAWASLU: BERNAT PANJAITAN [27:18]**

Pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena tidak memiliki syarat materiil laporan.

**218. KETUA: SALDI ISRA [27:22]**

Yang itu sudah, Pak, kalau sudah tidak ... tidak teregistrasi itu.

**219. BAWASLU: BERNAT PANJAITAN [27:25]**

Ya, Pak?

**220. KETUA: SALDI ISRA [27:26]**

Apa lagi? Itu sudah selesailah itu yang tidak teregistrasi itu. Kita main yang teregistrasi saja sekarang.

Apa lagi yang mau Bapak sampaikan? Soal Calon Nomor Urut 2 melakukan politik uang. Apa yang mau Bapak jelaskan itu? Silakan.

**221. BAWASLU: BERNAT PANJAITAN [27:49]**

Bahwa laporan pelapor, Pemohon, telah diterima dan telah dilakukan penanganan pelanggaran.

**222. KETUA: SALDI ISRA [27:58]**

Ya.

**223. BAWASLU: BERNAT PANJAITAN [28:00]**

Dan tidak terbukti. Bahwa terlapor itu adalah ternyata saksi ... koordinator saksi.

**224. KETUA: SALDI ISRA [28:06]**

Oke.

**225. BAWASLU: BERNAT PANJAITAN [28:08]**

Koordinator Saksi dari 02. Dan pada sebenarnya, pelapor yang di ...  
terlapor yang disampaikan oleh Pemohon itu salah orang namanya, tetapi  
yang bersangkutan tetap datang pada saat itu dan memberikan  
keterangan.

**226. KETUA: SALDI ISRA [28:31]**

Oke. Itu yang kepala desa yang mengumpulkan KTP ini kalau ndak  
milih Nomor 2 itu katanya, lalu kemudian tidak dibagikan KTP-nya? Apa itu  
ceritanya, Pak? Ini Kepala Dusun Tanjung Purba, Kecamatan Bilah Barat  
tidak membagikan KTP warga kalau masyarakat tidak memilih Paslon  
Nomor 2. Nah, apa itu?

**227. BAWASLU: BERNAT PANJAITAN [29:00]**

Itu laporan 02, Yang Mulia.

**228. KETUA: SALDI ISRA [29:00]**

Laporan 02?

**229. BAWASLU: BERNAT PANJAITAN [29:04]**

Ya, bah ... laporan 02 (...)

**230. KETUA: SALDI ISRA [29:08]**

Bukan, Pak. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang  
Adi Sakti Ritonga.

**231. BAWASLU: BERNAT PANJAITAN [29:12]**

Oh.

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon a quo, tidak terdapat laporan  
dan permohonan sengketa pemilihan, Yang Mulia.

**232. KETUA: SALDI ISRA [29:23]**

Ya. Hasil pengawasan ada, enggak?

**233. BAWASLU: BERNAT PANJAITAN [29:24]**

Hasil pengawasan bahwa Bawaslu Labuhanbatu, Kabupaten Labuhan ... melalui Panwaslu Kecamatan Bilah Barat telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan surat imbauan ditujukan kepala desa dan perangkat desa se-Kecamatan Bilah Barat dan Ketua dan Anggota BPD se-Kecamatan Bilah Barat agar menjaga netralitas.

**234. KETUA: SALDI ISRA [29:42]**

Ya, itu ya, Pak (...)

**235. BAWASLU: BERNAT PANJAITAN [29:43]**

Yang, kedua (...)

**236. KETUA: SALDI ISRA [29:44]**

Yang menjadi pertanyaan, benar atau tidak yang kepala desa yang ... yang apa itu yang menahan KTP?

**237. BAWASLU: BERNAT PANJAITAN [29:50]**

Bahwa (...)

**238. KETUA: SALDI ISRA [29:51]**

Ini kalau tidak pilih 02 ini ... nah, coba Bapak jelaskan. Ada atau tidak itu?

**239. BAWASLU: BERNAT PANJAITAN [30:00]**

Keterangan dari saksi, ada, Yang Mulia.

**240. KETUA: SALDI ISRA [30:03]**

Ada?

**241. BAWASLU: BERNAT PANJAITAN [30:04]**

Ya, dan itu terhadap laporan Adi Sakti ini, Yang Mulia.

**242. KETUA: SALDI ISRA [30:11]**

Ya. Ini Bapak ... ini Bapak lihat di ... di keterangan Bapak halaman 50, Pak.

**243. BAWASLU: BERNAT PANJAITAN [30:22]**

Ya. Bahwa Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu, tidak terdapat desa Tanjung Purba sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

**244. KETUA: SALDI ISRA [30:28]**

Jadi, enggak ada Desa Tanjung Purba di sini?

**245. BAWASLU: BERNAT PANJAITAN [30:31]**

Tidak ada Desa Tanjung Purba, Yang Mulia.

**246. KETUA: SALDI ISRA [30:31]**

Desa Purba Kala enggak ada juga, Pak? Oke. Apa lagi, Pak, yang mau ditambahkan?

**247. BAWASLU: BERNAT PANJAITAN [30:40]**

Cukup, Yang Mulia.

**248. KETUA: SALDI ISRA [30:40]**

Cukup?

**249. BAWASLU: BERNAT PANJAITAN [30:43]**

Cukup.

**250. KETUA: SALDI ISRA [30:44]**

Kalau sudah makin banyak ditanya, lalu langsung pindah ke *cukup*. Terima kasih, Pak.

**251. BAWASLU: BERNAT PANJAITAN [30:53]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**252. KETUA: SALDI ISRA [30:59]**

Ini rapi-rapi semua, mulai dari permohonan sampai jawaban, rapi semua. Tapi, rapih kan belum tentu mencerminkan isi. Cukup.

Sekarang kita pindah ke Kabupaten Toba. Silakan gantian sopirnya. Terima kasih. Silakan, KPU Toba.

**253. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRY SIMON SITINJAK [32:07]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

**254. KETUA: SALDI ISRA [32:08]**

Ya.

**255. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRY SIMON SITINJAK [32:09]**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat Siang dan Salam Sejahtera kepada kita semua. Dengan ini, kami sebagai Kuasa Hukum dari KPU Toba selaku Termohon, akan menje ... membacakan jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 94, Yang Mulia.

Langsung saja, kami menjawab terkait dengan dalam Eksepsi. Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dimuat pada halaman 2 sampai dengan pada halaman 5.

**256. KETUA: SALDI ISRA [32:46]**

Ya.

**257. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRY SIMON SITINJAK [32:46]**

Kita anggap dibacakan, Yang Mulia.

**258. KETUA: SALDI ISRA [32:48]**

Ya.

**259. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRY SIMON SITINJAK [32:49]**

Kemudian terkait dengan tenggang waktu pengajuan Permohonan. Menurut Termohon itu tidak perlu ditanggapi, Yang Mulia, karena pengajuan itu telah memenuhi tenggang waktu.

**260. KETUA: SALDI ISRA [32:57]**

Oke.

**261. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRY SIMON SITINJAK [32:57]**

Sebagaimana ditentukan PMK Nomor 3.

Kemudian terkait dengan Kedudukan Hukum Pemohon. Menurut Termohon itu tidak memenuhi sebagaimana ditentukan Pasal 158, yang dimuat pada halaman 5 sampai halaman 8, Yang Mulia.

**262. KETUA: SALDI ISRA [33:15]**

Ya.

**263. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRY SIMON SITINJAK [33:17]**

Kemudian terkait dengan Permohonan Pemohon tidak jelas (obscur), itu ada 4 hal yang kami sampaikan, Yang Mulia.

**264. KETUA: SALDI ISRA [33:25]**

Ya.

**265. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRY SIMON SITINJAK [33:26]**

Di halaman 8. Itu pertama adalah terkait pada Permohonan Pemohon, itu tidak berdasarkan pedoman penyusunan Permohonan. Dan kemudian ada hal yang kedua adalah terkait dengan Posita Pemohon itu tidak menjelaskan kejadian yang mendasari gugatan dan dasar hukum.

**266. KETUA: SALDI ISRA [33:42]**

Oke.

**267. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRY SIMON SITINJAK [33:44]**

Dan ketiga, terkait dengan Permohonan yang tidak jelas adalah objek yang disengketakan itu tidak jelas menurut Termohon.

Dan keempat adalah terkait dengan antara Posita dan Petitum dari Pemohon itu saling bertentangan.

Berdasarkan uraian hal tersebut, Yang Mulia, mohon ... termohon ... pemohon ... pemohon ... Permohonan Pemohon tidak jelas sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**268. KETUA: SALDI ISRA [34:10]**

Oke.

**269. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRY SIMON SITINJAK [34:12]**

Nah, dalam Pokok Permohonan, Yang Mulia.

**270. KETUA: SALDI ISRA [34:15]**

Ya.

**271. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRY SIMON SITINJAK [34:16]**

Kami akan langsung menjawab terkait di halaman 16.

Bahwa berdasarkan pemohon ... dalil Pemohon dalam Permohonan halaman 6, bagian 5. Pokok Permohonan angka 1, pada intinya mendalilkan bahwa Termohon telah meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu Robinson Sitorus-Tonny Simanjuntak sebagai peserta pemilu Tahun 2024, tanpa mengajukan pengunduran diri Dr. Robinson Sitorus S.H. sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap (...)

**272. KETUA: SALDI ISRA [34:50]**

Ini Robinson, nih, Pegawai Negeri Sipilnya sebagai apa, Pak?

**273. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRY SIMON SITINJAK [34:53]**

Sa ... Pegawai di Kejaksaan.

**274. KETUA: SALDI ISRA [34:55]**

Kejaksaan. Sudah mengundurkan diri atau belum?

**275. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRY SIMON SITINJAK [34:59]**

Saat ini, Yang Mulia ... mungkin akan langsung dijawab.

**276. KETUA: SALDI ISRA [35:06]**

Silakan, KPU.

**277. TERMOHON: RIDUAN MARPAUNG [35:09]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**278. KETUA: SALDI ISRA [35:10]**

Ya.

**279. TERMOHON: RIDUAN MARPAUNG [35:11]**

Assalamualaikum wr. wb.

**280. KETUA: SALDI ISRA [35:13]**

Walaikumsalam wr. wb.

**281. TERMOHON: RIDUAN MARPAUNG [35:15]**

Terkait dengan surat pengunduran diri atau pensiun dini Saudara Robinson Sitorus itu sudah jelas ada, Ketua ... pimpi ... Yang Mulia.

**282. KETUA: SALDI ISRA [35:29]**

Kapan pengunduran dirinya? Bukti T berapa?

**283. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRY SIMON SITINJAK [35:40]**

Mohon izin, Yang Mulia.

**284. KETUA: SALDI ISRA [35:41]**

Ya.

**285. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRY SIMON SITINJAK [35:42]**

Mungkin terkait dengan pengunduran diri itu, kita tidak lihat, Yang Mulia. Tetapi pada saat pencalonan, yang bersangkutan itu menyerahkan surat (...)

**286. KETUA: SALDI ISRA [35:54]**

Ya, mana dia suratnya itu? T, berapa?

**287. TERMOHON: RIDUAN MARPAUNG [35:56]**

Itu ada di ... sebentar, Yang Mulia. Itu Ada dalam ... sebentar, Yang Mulia. Dia ada di dalam T-6 (...)

**288. KETUA: SALDI ISRA [36:20]**

Ya.

**289. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRY SIMON SITINJAK [36:21]**

T-7, T-8, T-9, dan keempat itu, Yang Mulia.

**290. KETUA: SALDI ISRA [36:27]**

Oke.

**291. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRY SIMON SITINJAK [36:27]**

Jadi, itu dilampirkan. Berkas itulah yang diajuk ... disampaikan pihak yang disampaikan oleh Pemohon itu kepada Termohon, Yang Mulia.

**292. KETUA: SALDI ISRA [36:38]**

Oke.

**293. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRY SIMON SITINJAK [36:38]**

Dan kemudian, Termohon itu melakukan penelitian persyaratan administrasi dan kelengkapan. Kemudian dari itu, Yang Mulia.

**294. KETUA: SALDI ISRA [36:51]**

Tadi Bapak mengatakan tidak melihat, ternyata ini kan di T-6, T-7, T-8, T-9, itu ini ada surat apa namanya ... dari Robinson Sitorus.

**295. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRY SIMON SITINJAK [37:05]**

Ya, Yang Mulia.

**296. KETUA: SALDI ISRA [37:05]**

Kepada Kepala Biro Kepegawaian, oke. Kemudian permohonan pensiun dini, Robinson Sitorus kepada yang terhormat Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan. Kemudian ini ada bukti declare kejaksaan teruskan ke Jambin, tahu, Bapak, Jambin?

**297. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRY SIMON SITINJAK [37:25]**

Jaksa Agung Pembinaan, Yang Mulia.

**298. KETUA: SALDI ISRA [37:27]**

Nah itu, kemudian ini ada surat pengajuan pensiun dini PNS atas nama Robinson, Kepala Bagian Tata Usaha. Bapak, lihat ini enggak?

**299. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRY SIMON SITINJAK [37:40]**

Lihat, Yang Mulia.

**300. KETUA: SALDI ISRA [37:41]**

Tadi kok katanya *tidak*?

**301. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRY SIMON SITINJAK [37:42]**

Tadi, Yang Mulia sampaikan, "Apakah pengunduran diri yang bersangkutan."

**302. KETUA: SALDI ISRA [37:47]**

Ya.

**303. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRY SIMON SITINJAK [37:47]**

Itu dalam arti itu sudah mengundurkan diri. Bagi kita, kita yang melihat dalam permohonan ini, Termohon itu melihat berkasnya, Yang Mulia.

**304. KETUA: SALDI ISRA [37:57]**

Oke.

**305. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRY SIMON SITINJAK [37:57]**

Pada saat pencalonan, ter ... yang di sana ... yang didalilkan dari Pemohon itu menyertakan berkas ini.

**306. KETUA: SALDI ISRA [38:04]**

Oke, yang penting berkasnya sudah masuk, ya.

**307. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRY SIMON SITINJAK [38:06]**

Ya, Yang Mulia.

**308. KETUA: SALDI ISRA [38:07]**

Sudah ada prosesnya ini, ya?

**309. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRY SIMON SITINJAK [38:07]**

Benar, Yang Mulia.

**310. KETUA: SALDI ISRA [38:09]**

Oke.

**311. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRY SIMON SITINJAK [38:09]**

Nah, kemudian terkait dengan (...)

**312. KETUA: SALDI ISRA [38:13]**

Apa lagi? Berarti soal pencalonan Robinson selesai?

**313. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRY SIMON SITINJAK [38:18]**

Ya, Yang Mulia.

**314. KETUA: SALDI ISRA [38:19]**

Menurut, Bapak (...)

**315. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRY SIMON SITINJAK [38:19]**

Ya, Yang Mulia.

**316. KETUA: SALDI ISRA [38:19]**

Menurut kami belum tentu selesai.

**317. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRY SIMON SITINJAK [38:20]**

Baik, Yang Mulia.

**318. KETUA: SALDI ISRA [38:20]**

Nah, lanjut. Apa lagi yang mau diterangkan?

**319. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRY SIMON SITINJAK [38:22]**

Kemudian terkait dengan menyampaikan bahwa kami menjawab dalam halaman 24, Yang Mulia.

**320. KETUA: SALDI ISRA [38:32]**

Ya.

**321. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRY SIMON SITINJAK [38:32]**

Terkait dalam dalil Pemohon Permohonan yang menyatakan keikutsertaan Pasangan Calon Robinson sangat mengganggu dan menggerus perolehan suara Nomor 1 sehingga Robinson tidak berhak mendapatkan suara pemilih karena keikutsertaan Paslon Nomor 2 cacat hukum. Kami menanggapi bahwa setiap warga negara itu berhak memperoleh kesempatan yang sama, Yang Mulia.

**322. KETUA: SALDI ISRA [38:58]**

Kata Robinson yang ikut itu pula yang menggerus suaranya, kan? Itu dalil umumlah itu, oke. Apa lagi?

**323. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRY SIMON SITINJAK [39:05]**

Baik.

Kemudian terkait dengan soal dalil Permohonan Pemohonan yang di halaman 4 pada bagian 5, pokok Permohonan di angka 1, bagian pemungutan suara ulang di Kabupaten Toba. Pada intinya menyatakan bahwa pemohon ... Pemohon itu sebenarnya lebih memohon Mahkamah untuk langsung membatalkan Pemilukada di Kabupaten Toba. Menurut Termohon itu adalah keliru, Yang Mulia.

**324. KETUA: SALDI ISRA [39:28]**

Oke.

**325. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRY SIMON SITINJAK [39:28]**

Karena pembatalan pemilu sebagaimana dimaksud Pemohon merupakan pembatalan terhadap semua tahapan yang telah dilakukan mulai tahapan, mulai perencanaan program, dan anggaran merencanakan jadwal pemilihan termasuk penyusunan sebagaimana diatur dalam tugas pokok dan kewenangan KPU.

**326. KETUA: SALDI ISRA [39:46]**

Oke, sekarang, Bapak, masuk ke Petitem.

**327. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRY SIMON SITINJAK [39:47]**

Baik, Yang Mulia. Jadi berkaitan dengan hal tersebut di atas, Termohon memohon kepada, Yang Mulia Majelis (...)

**328. KETUA: SALDI ISRA [39:56]**

Ya.

**329. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRY SIMON SITINJAK [39:56]**

Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon. Kemudian.

2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau N.O.

Dan kemudian dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU Kabupaten Toba Nomor 2136 tab ... Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024.

3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir pemilihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kota yang benar adalah sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**330. KETUA: SALDI ISRA [40:41]**

Ya. Cukup.

**331. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRY SIMON SITINJAK [40:42]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**332. KETUA: SALDI ISRA [40:43]**

Ya. Terima kasih.

Silakan, Pak KPU itu mik-nya dimatikan juga, Pak! Nah, Itu. Pihak Terkait. Silakan. Poin poinnya saja.

**333. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94/PHPU.BUP-XXIII/2025 PARULIAN SIREGAR [40:55]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**334. KETUA: SALDI ISRA [40:56]**

Eksepsi.

**335. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94/PHPU.BUP-XXIII/2025 PARULIAN SIREGAR [40:57]**

Siap.

**336. KETUA: SALDI ISRA [40:59]**

Kalau ada yang penting diberikan penekanan, kewenangan enggak usah, waktu enggak usah. Legal Standing bagaimana?

**337. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94/PHPU.BUP-XXIII/2025 PARULIAN SIREGAR [41:05]**

Kedudukan hukumnya, menurut pemo ... menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak mempunyai Legal Standing dalam mengajukan permohonannya, Yang Mulia (...)

**338. KETUA: SALDI ISRA [41:15]**

Karena?

**339. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94/PHPU.BUP-XXIII/2025 PARULIAN SIREGAR [41:15]**

Karena selisih suara, perolehan suara dari Pemohon dengan perolehan suara Pihak Terkait.

**340. KETUA: SALDI ISRA [41:26]**

Ya.

**341. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94/PHPU.BUP-XXIII/2025 PARULIAN SIREGAR [41:26]**

Itu sudah melebihi dari batas (...)

**342. KETUA: SALDI ISRA [41:29]**

158?

**343. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94/PHPU.BUP-XXIII/2025 PARULIAN SIREGAR [41:30]**

158.

**344. KETUA: SALDI ISRA [41:30]**

Oke. Permohonan kabur, Pak?

**345. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94/PHPU.BUP-XXIII/2025 PARULIAN SIREGAR [41:33]**

Sekarang masalah permohonan tidak jelas, Yang Mulia, atau kabur. Eksepsi ... masih Eksepsi.

**346. KETUA: SALDI ISRA [41:41]**

Ya.

**347. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94/PHPU.BUP-XXIII/2025 PARULIAN SIREGAR [41:42]**

Bahwa pada saat Pemohon membacakan permohonannya pada sidang, tanggal 13 Januari 2025, Pemohon membacakan permohonannya tidak sesuai dengan isi dari perbaikan permohonan yang telah diregistrasi. Bahwa karena Pemohon membacakan permohonan yang tidak sesuai dengan isi dari perbaikan permohonan Pemohon yang diregistrasi, maka permohonan yang demikian harus dinyatakan tidak jelas.

Bahwa dalam dalil perbaikan permohonan, Pemohon tidak menguraikan secara jelas tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan Kedudukan Pemohon.

Terus, nomor 4, Yang Mulia.

**348. KETUA: SALDI ISRA [42:25]**

Ya.

**349. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94/PHPU.BUP-XXIII/2025 PARULIAN SIREGAR [42:25]**

Bahwa selanjutnya dalam perbaikan permohonan, Pemohon tidak ada memuat Petitum, hal ini juga tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) huruf b butir 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024.

**350. KETUA: SALDI ISRA [42:41]**

Oke.

**351. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94/PHPU.BUP-XXIII/2025 PARULIAN SIREGAR [42:41]**

Selanjutnya nomor 5 bahwa (...)

**352. KETUA: SALDI ISRA [42:44]**

Oke, kalau begitu. Cukup, Pak.  
Jadi, pokoknya prinsipnya itu kabur, ya?

**353. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94/PHPU.BUP-XXIII/2025 PARULIAN SIREGAR [42:47]**

Ya. Dalam (...)

**354. KETUA: SALDI ISRA [42:50]**

Pokok Permohonan.

**355. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94/PHPU.BUP-XXIII/2025 PARULIAN SIREGAR [42:50]**

Dalam Pokok Permohonan, Yang Mulia. Kami mulai dari angka 5 halaman 17.

**356. KETUA: SALDI ISRA [42:57]**

Ya.

**357. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94/PHPU.BUP-XXIII/2025 PARULIAN SIREGAR [42:58]**

Bahwa pada kenyataannya, Pemohon tidak pernah mempermasalahkan dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Termohon, yaitu pada saat penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 2, Dr. Robinson Sitorus kepada Bawaslu Kabupaten Toba atau mengajukan gugatan pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa selanjutnya, Pemohon mempersoalkan dugaan pelanggaran administrasi tersebut setelah hasil rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kabupaten selesai, dan hasil perolehan suara telah diketahui dengan pasti oleh Pemohon. Sehingga Pemohon telah dapat memastikan bahwa Pemohon bukanlah peraih suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Toba. Barulah kemudian, Pemohon membuat laporan dugaan pelanggaran administrasi kepada Bawaslu Kabupaten Toba.

Bahwa laporan kepada Bawaslu ini dibuat oleh Pemohon adalah, pada tanggal 5 Desember 2024, setelah penetapan hasil rekapitulasi perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Toba telah dikeluarkan oleh Termohon, yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 2136 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati (...)

**358. KETUA: SALDI ISRA [44:14]**

Oke, cukup.

**359. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94/PHPU.BUP-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [44:15]**

Pada Hari Rabu, tanggal 4 Desember, Pukul 16.00 WIB yang menjadi objek Permohonan perkara a quo.

**360. KETUA: SALDI ISRA [44:22]**

Oke, lanjut, Pak. Apa lagi?

**361. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94/PHPU.BUP-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [44:25]**

Selanjutnya, ini rekan kami mulai tanggal ... eh, poin 13, ini sudah jauh-jauh, Yang Mulia, datang dari Bali nih.

**362. KETUA: SALDI ISRA [44:33]**

Ya, silakan, Pak.

**363. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94/PHPU.BUP-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [44:34]**

Dari pesawat pertama dari Selangit. Silakan.

**364. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIKARDO HUTAPEA [44:38]**

Izin, Yang Mulia. Melanjutkan, Yang Mulia.

**365. KETUA: SALDI ISRA [44:40]**

Ya, lanjutkan. Poin berapa yang mau disampaikan?

**366. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIKARDO HUTAPEA [44:44]**

Poin 13, Yang Mulia. Halaman 20.

**367. KETUA: SALDI ISRA [44:46]**

Silakan.

**368. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIKARDO HUTAPEA [44:47]**

Bahwa untuk mempertegas dalil-dalil yang kemukakan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum tentang adanya pelanggaran yang terjadi selama Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024 adalah di dalam Permohonan Pemohon tidak ditemukan satu pun rekomendasi dari Bawaslu Kabu ... Kabupaten Toba tentang adanya laporan pelanggaran administratif sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

**369. KETUA: SALDI ISRA [45:11]**

Petitum, Pak.

**370. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIKARDO HUTAPEA [45:15]**

Dalam Petitem, Yang Mulia.

**371. KETUA: SALDI ISRA [45:16]**

Ya, dia yang paling berharga Petitem ini, Pak. Silakan.

**372. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIKARDO HUTAPEA [45:21]**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Makamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan seluruh Eksepsi Pihak Terkait

**373. KETUA: SALDI ISRA [45:35]**

Ya.

**374. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIKARDO HUTAPEA [45:35]**

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 2136 Tahun 2024.

**375. KETUA: SALDI ISRA [45:54]**

Ya.

**376. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIKARDO HUTAPEA [45:54]**

Tentang Penetapan Hasil Bupati dan Wakil Bupati, tertanggal 4 Desember Pukul 04.00 WIB.

Atau apabila Makamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait, tertanda tangan. Terima kasih, Yang Mulia.

**377. KETUA: SALDI ISRA [46:09]**

Terima kasih. Sudah dikasih jatah, Pak. Terbangnya dari Selangit, katanya. Itu sudah bisa enggak airbus mendarat di situ?

**378. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIKARDO HUTAPEA [46:18]**

Apa, Yang Mulia?

**379. KETUA: SALDI ISRA [46:19]**

Pesawatnya sudah bisa mendarat pesawat besar enggak?

**380. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 94: RIKARDO HUTAPEA [46:21]**

Belum, Yang Mulia.

**381. KETUA: SALDI ISRA [46:22]**

Masih (...)

**382. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIKARDO HUTAPEA [46:23]**

Hanya komersil biasa, Yang Mulia.

**383. KETUA: SALDI ISRA [46:24]**

Oke, yang penting bisa terbang, Pak. Makanya di tempat saya pesawat itu namanya kapal terbang, Pak. Sama, ya?

**384. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIKARDO HUTAPEA [46:31]**

Sama, Yang Mulia.

**385. KETUA: SALDI ISRA [46:32]**

Orang Sumatera itu kayak-kayak begitu saja.  
Oke, sekarang Bawaslu.

**386. BAWASLU: SAHAT SIBARANI [46:37]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari Bawaslu akan membacakan Permohonan Nomor 94, Pokok Permohonan Pemohon. Pokok Permohonan Pemohon dengan Nomor 94 yang mengenai ... mendalilkan tentang calon bupati peserta Pilkada Kabupaten Toba belum mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil di Instansi Kejaksaan Republik Indonesia, tetapi lolos sebagai peserta Pilkada dengan Nomor Urut 2.

A. Tindak lanjut laporan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Terdapat laporan pelanggaran pemilihan terkait dalil Pemohonan Pemohon, yang dimana Bawaslu Kabupaten Toba menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang dilaporkan oleh Ir. Poltak Sitorus, M.Sc. pada tanggal 5 Desember yang pada pokoknya melaporkan Robinson Sitorus sebagai Paslon Bupati Toba dengan Nomor Urut 2 yang diduga masih aktif sebagai PNS di Instansi Kejaksaan Republik Indonesia (Bukti P3.12-1).

Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Toba melakukan kajian awal Nomor 09 dan seterusnya pada tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokok laporan Saudara Ir. Poltak Sitorus memenuhi syarat formal dan materil (Bukti PK-3.1.12.9)[sic!]. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Toba menyusun kajian dengan ... dugaan pelanggaran dengan Nomor 005 dan seterusnya pada tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan laporan dihentikan karena pelapor tidak dapat hadir dalam proses klarifikasi, dan pelapor tidak dapat membuktikan yang menyatakan terlapor tidak mengundurkan diri dari ASN. (Bukti PK-3.12-10). Terhadap laporan yang disampaikan oleh per ... Pemohon, Bawaslu Kabupaten Toba mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan dihentikan (Bukti P-3.12-2) dikarenakan pelapor tidak dapat hadir dalam proses klarifikasi dan pelapor tidak dapat membuktikan bahwa terlapor tidak mengundurkan diri dari ASN.

2. Tidak terdapat permohonan sengketa pemilihan terkait proses permasalahan yang dimohonkan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Tindakan pencegahan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Toba adalah bahwa Bawaslu Kabupaten Toba telah mengeluarkan surat himbauan kepada KPU Kabupaten Toba dengan Nomor 319 dan seterusnya pada tanggal 28 Agustus 2024 Perihal Permintaan Salinan Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon.

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Toba sebagaimana termaks ... sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Toba dengan Nomor 051 LH ... laporan hasil pengawasan dan seterusnya, tanggal 28 Agustus 2024, (Bukti PK-3.12-8). Yang pada pokoknya, Bawaslu Kabupaten Toba telah melakukan pengawasan pencalonan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Toba secara langsung, melekat di kantor KPU Kabupaten Toba. Namun terhadap Sistem Pencalonan (silon) KPU, Bawaslu Kabupaten Toba terbatas dalam mengakses akun Silon yang dimana Bawaslu Kabupaten Toba hanya diberikan akses sebagai viewer.

Demikian keterangan yang bisa kami sampaikan, Yang Mulia.  
Terima kasih kami ucapkan. Horas.

**387. KETUA: SALDI ISRA [50:58]**

Horas. Terima kasih, Bawaslu Kabupaten Toba, ini berarti untuk Perkara Kabupaten Toba, kita anggap selesai.

Tapi belum selesai betulan ini, Pak, karena ada tahap berikutnya.

Terima kasih. Kita akan lanjutkan Konawe Kepulauan, jadi Toba silakan mundur. Pihak Terkait Konawe Kepulauan, sudah ada di depan? Silakan pindah.

Ini dua-duanya anggota KPU atau?

**388. TERMOHON: ISKANDAR [51:05]**

Ya.

**389. KETUA: SALDI ISRA [51:06]**

Tidak pakai Kuasa Hukum?

**390. TERMOHON: ISKANDAR [51:07]**

Tidak pakai, Pak ... Yang Mulia.

**391. KETUA: SALDI ISRA [51:10]**

Bapak bagi-bagi juga itu duit dengan para lawyer, Pak. Jangan di ... apa ... dibagi sendiri sama anggota KPU, begitu.

Silakan, Konawe Kepulauan, Nomor 143.

**392. TERMOHON: ISKANDAR [51:24]**

Baik, Yang Mulia.

**393. KETUA: SALDI ISRA [51:25]**

Ya.

**394. TERMOHON: ISKANDAR [51:25]**

Kami akan memberikan jawaban terhadap Perkara Nomor 143 dan seterusnya.

**395. KETUA: SALDI ISRA [51:29]**

Ya.

**396. TERMOHON: ISKANDAR [51:32]**

Kewenangan Mahkamah Konstitusi, mohon dianggap dibacakan.

**397. KETUA: SALDI ISRA [51:35]**

Berwenang?

**398. TERMOHON: ISKANDAR [51:38]**

Kedudukan hukum Pemohon. Menurut Termohon, Pemohon itu tidak memiliki legal standing berdasarkan ketentuan Pasal 158, karena (...)

**399. KETUA: SALDI ISRA [51:45]**

Berapa selisihnya, Pak?

**400. TERMOHON: ISKANDAR [51:46]**

Selisihnya 22%.

**401. KETUA: SALDI ISRA [51:48]**

22%?

**402. TERMOHON: ISKANDAR [51:48]**

Ya.

**403. KETUA: SALDI ISRA [51:49]**

Ini yang menang calon nomor berapa, Pak?

**404. TERMOHON: ISKANDAR [51:51]**

Nomor 4.

**405. KETUA: SALDI ISRA [51:53]**

Pak Rifqi itu?

**406. TERMOHON: ISKANDAR [51:54]**

Ya, Yang Mulia.

**407. KETUA: SALDI ISRA [51:56]**

Oke.

**408. TERMOHON: ISKANDAR [51:58]**

Untuk yang c ini, halaman 9.

**409. KETUA: SALDI ISRA [52:07]**

Ya.

**410. TERMOHON: ISKANDAR [52:07]**

Tenggang waktu pengajuan Permohonan itu menurut kami, Pemohon tidak memiliki tenggat waktu pengajuan Permohonan karena KPU Konawe Kepulauan.

**411. KETUA: SALDI ISRA [52:09]**

Ya.

**412. TERMOHON: ISKANDAR [52:09]**

Menetapkan ini tanggal 4 Desember Pukul 15.43.

**413. KETUA: SALDI ISRA [52:13]**

Sebentar.

**414. TERMOHON: ISKANDAR [52:13]**

Di hari Rabu.

**415. KETUA: SALDI ISRA [52:13]**

Tunggu, pelan-pelan, Pak. Jadi, Bapak, menetapkan itu sekaligus mengumumkan 4 Desember?

**416. TERMOHON: ISKANDAR [52:18]**

Ya, Yang Mulia.

**417. KETUA: SALDI ISRA [52:19]**

15.43 WITA?

**418. TERMOHON: ISKANDAR [52:20]**

Siap, Yang Mulia.

**419. KETUA: SALDI ISRA [52:21]**

Oke. Itu hari apa itu, Pak?

**420. TERMOHON: ISKANDAR [52:23]**

Hari Rabu.

**421. KETUA: SALDI ISRA [52:24]**

Hari Rabu. Kemudian harusnya dihitung mulai Rabu, Kamis, Jumat?

**422. TERMOHON: ISKANDAR [52:30]**

Siap, Yang Mulia.

**423. KETUA: SALDI ISRA [52:31]**

Kalau begini Permohonannya masuk kapan?

**424. TERMOHON: ISKANDAR [52:33]**

Dia hari ... diajukan ke Panitera itu tanggal 8 Desember berdasarkan (vide Bukti T-8)

**425. KETUA: SALDI ISRA [52:40]**

Oke.

**426. TERMOHON: ISKANDAR [52:33]**

Hari Minggu.

**427. KETUA: SALDI ISRA [52:40]**

Jadi, Bapak, menganggap ini sudah lewat waktu, ya?

**428. TERMOHON: ISKANDAR [52:42]**

Siap, Yang Mulia.

**429. KETUA: SALDI ISRA [52:43]**

Itu pendapat, Bapak, pendapat Hakim mungkin belum tentu begitu, Pak.

Silakan, yang lain apa lagi, Pak?

**430. TERMOHON: ISKANDAR [52:48]**

Permohonan Pemohon kabur dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**431. KETUA: SALDI ISRA [52:51]**

Ya.

**432. TERMOHON: ISKANDAR [52:51]**

Kami masuk kepada dalam pokok permohonan, kami akan menjawab terhadap Pokok Permohonan yang pertama.

**433. KETUA: SALDI ISRA [53:01]**

Ya.

**434. TERMOHON: ISKANDAR [53:01]**

Di halaman 19 itu terkait kampanye di luar jadwal di ... yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam hal ini Termohon menanggapi, Yang Mulia.

**435. KETUA: SALDI ISRA [53:13]**

Ya.

**436. TERMOHON: ISKANDAR [53:14]**

Kejadian ini pada saat pengundian nomor urut pasangan calon.

**437. KETUA: SALDI ISRA [53:19]**

Ya.

**438. TERMOHON: ISKANDAR [53:20]**

Di tanggal 23. Kami melampirkan bukti Surat KPU RI Nomor 2045 terkait standardisasi pengundian nomor urut. Selanjutnya terhadap hal ini juga, perkara ini sudah dilakukan, sudah ditangani oleh Bawaslu.

**439. KETUA: SALDI ISRA [53:38]**

Ya.

**440. TERMOHON: ISKANDAR [53:38]**

Dengan Formulir A-17 yang statusnya tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan, yang pertama.

**441. KETUA: SALDI ISRA [53:45]**

Ya. Apa lagi, Pak?

**442. TERMOHON: ISKANDAR [53:47]**

Yang kedua, mengenai terdapat praktik joki suara dan adanya pengguna hak pilih yang tidak terdaftar dalam DPT.

**443. KETUA: SALDI ISRA [53:54]**

Ya.

**444. TERMOHON: ISKANDAR [53:55]**

(Vide dalil Permohonan angka 13.2 huruf C, halaman 14.)

**445. KETUA: SALDI ISRA [53:58]**

Oke. Joki suara, ya?

**446. TERMOHON: ISKANDAR [54:00]**

Joki suara, Yang Mulia.

**447. KETUA: SALDI ISRA [54:02]**

Ya.

**448. TERMOHON: ISKANDAR [54:02]**

Kami ingin menyampaikan, Yang Mulia, pada kesempatan hari ini bahwa yang disampaikan oleh Pemohon ini tidak benar adanya karena pada saat kami melakukan rekap di ting ... secara berjenjang, baik TPS, PPK maupun tingkat kabupaten, semua saksi Pemohon itu bertandatangan dan kami sudah melampirkan dalam formulir ... dalam, Bukti P-14.

**449. KETUA: SALDI ISRA [54:30]**

Semua saksi Pemohon di TPS, tanda tangan?

**450. TERMOHON: ISKANDAR [54:31]**

Ya, tanda tangan, Yang Mulia.

**451. KETUA: SALDI ISRA [54:32]**

Kalau di kecamatan?

**452. TERMOHON: ISKANDAR [54:33]**

Tanda tangan juga, Yang Mulia.

**453. KETUA: SALDI ISRA [54:34]**

Berapa kecamatan di Konawe Selatan ini?

**454. TERMOHON: ISKANDAR [54:36]**

Konawe Kepulauan, Yang Mulia, 7.

**455. KETUA: SALDI ISRA [54:39]**

Konawe ... berapa?

**456. TERMOHON: ISKANDAR [54:39]**

7.

**457. KETUA: SALDI ISRA [54:40]**

7 kecamatan. Berapa yang tidak tanda tangan?

**458. TERMOHON: ISKANDAR [54:42]**

Tanda tangan semua, Yang Mulia.

**459. KETUA: SALDI ISRA [54:44]**

Kalau TPSnya berapa?

**460. TERMOHON: ISKANDAR [54:45]**

99.

**461. KETUA: SALDI ISRA [54:46]**

Jumlah TPS?

**462. TERMOHON: ISKANDAR [54:47]**

Siap, Yang Mulia.

**463. KETUA: SALDI ISRA [54:48]**

Cuman 99 TPS-nya?

**464. TERMOHON: ISKANDAR [54:50]**

Siap, Yang Mulia.

**465. KETUA: SALDI ISRA [54:51]**

Oke, ada yang tidak tanda tangan?

**466. TERMOHON: ISKANDAR [54:53]**

Tanda tangan semua, Yang Mulia.

**467. KETUA: SALDI ISRA [54:54]**

Oke, lanjut.

**468. TERMOHON: ISKANDAR [54:57]**

Mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, ini di angka di halaman 24.

**469. KETUA: SALDI ISRA [55:01]**

Ya.

**470. TERMOHON: ISKANDAR [55:01]**

Mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon ini, in casu, dalil Permohonan angka 7 halaman 9 sampai 12.

**471. KETUA: SALDI ISRA [55:10]**

Ya.

**472. TERMOHON: ISKANDAR [55:10]**

Kami ingin menyampaikan bahwa ... bahwa Termohon menyampaikan ada 90% C.Hasil Salinan yang disampaikan ke saksi Pemohon itu seba ... adalah fotokopi.

**473. KETUA: SALDI ISRA [55:22]**

Oke.

**474. TERMOHON: ISKANDAR [55:23]**

Kami men ... membantah, Yang Mulia, yang kami sampaikan itu dari 7 kecamatan, 1 kecamatan itu kami sampaikan asli, yang 6 kecamatannya itu fotokopi tetapi prosesnya itu kami lakukan adalah memang karena sumber daya P ... KPPS kami yang ada di tingkatan bawah itu memang tidak mumpuni untuk melakukan penggandaan yang ada dalam TPS. Tetapi pada prinsipnya C.Hasil Salinan dan C.Hasil sebelum dibagikan ke masing-masing saksi pasangan calon itu ditelaah, diteliti, dan diperiksa terkait kesesuaian angka itu. Dan di TPS pun, saksi

Pemohon tidak melakukan keberatan. Itu kami tampilkan dalam Bukti T ... T-121 sampai 177. Itu tidak ada keberatan saksi Pemohon terkait persoalan ini.

**475. KETUA: SALDI ISRA [56:31]**

Oke.

**476. TERMOHON: ISKANDAR [56:34]**

Berikutnya (...)

**477. KETUA: SALDI ISRA [56:36]**

Pak, yang menang ini incumbent, ya?

**478. TERMOHON: ISKANDAR [56:38]**

Bukan.

**479. KETUA: SALDI ISRA [56:39]**

Bukan. Ada yang incumbent di sini?

**480. TERMOHON: ISKANDAR [56:41]**

Tidak, Yang Mulia ... ada di Pasangan Calon Nomor Urut 2, Wakil Bupati.

**481. KETUA: SALDI ISRA [56:45]**

Yang siapa?

**482. TERMOHON: ISKANDAR [56:46]**

Andi Muhammad Lutfi.

**483. KETUA: SALDI ISRA [56:48]**

Oh, ini Wakil Bupati, ya.

**484. TERMOHON: ISKANDAR [56:49]**

Ya.

**485. KETUA: SALDI ISRA [56:52]**

Oke, lanjut.

**486. TERMOHON: ISKANDAR [56:55]**

Selanjutnya. Ini terkait dengan dalil Pemohon yang berkaitan bahwa ada ketidaksesuaian antara pengguna hak pilih dalam DPT di TPS 1 Mata Baho.

**487. KETUA: SALDI ISRA [57:13]**

Ya.

**488. TERMOHON: ISKANDAR [57:14]**

Tapi sejujurnya, kami sudah melakukan perbaikan di tingkatan kecamatan. Dan ini kami sampaikan, Yang Mulia. Bahwa yang melakukan keberatan terhadap proses ini adalah saksi Pihak Terkait. Kami lampirkan buktinya itu (...)

**489. KETUA: SALDI ISRA [57:29]**

Oh, yang keberatan justru Pihak Terkait?

**490. TERMOHON: ISKANDAR [57:30]**

Pihak Terkait, Yang Mulia.

**491. KETUA: SALDI ISRA [57:31]**

Pemohon enggak ada keberatan?

**492. TERMOHON: ISKANDAR [57:30]**

Tidak keberatan, Yang Mulia.

**493. KETUA: SALDI ISRA [57:31]**

Baik sekali Pemohonnya ini, Pak. Lanjut.

**494. TERMOHON: ISKANDAR [57:35]**

Selanjutnya juga ini, ada kekeliruan dalam pengadministrasian berkaitan dengan penggunaan surat suara di TPS, di TPS 1 Kelurahan Langara Laut, itu di halaman 33. Memang ada kekeliruan, semestinya pengguna hak pilih, baik dalam DPT, DPTb, maupun DPK harus sama dengan penggunaan surat suara dan suara sah dan tidak sah. Kejadian ini malah yang berbeda itulah penggunaan surat suara, tetapi setelah kami melakukan penelusuran berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Ketua PPS bahwa surat 2, surat 2 suara tidak sah itu dikompersi ke suara keliru coblos.

**495. KETUA: SALDI ISRA [58:20]**

Oke.

**496. TERMOHON: ISKANDAR [58:21]**

Makanya tidak connect. Setelah direkap kecamatan, berdasarkan informasi awal dari PPS pada saat rapat pra-pleno kecamatan itu dilakukanlah perbaikan dan itu (...)

**497. KETUA: SALDI ISRA [58:31]**

Dikembalikan ke tempat asalnya?

**498. TERMOHON: ISKANDAR [58:33]**

Dikembalikan ke tempat asalnya, Yang Mulia.

**499. KETUA: SALDI ISRA [58:35]**

Oke.

**500. TERMOHON: ISKANDAR [58:36]**

Berikutnya, ini di halaman 35.

**501. KETUA: SALDI ISRA [58:39]**

Ya.

**502. TERMOHON: ISKANDAR [58:40]**

Mengenai perbedaan hasil penghitungan suara versi Termohon dengan hasil penghitungan suara tingkat TPS.

**503. KETUA: SALDI ISRA [58:45]**

Ya.

**504. TERMOHON: ISKANDAR [58:47]**

(Vide Bukti hala ... Permohonan angka 13.4 halaman 15 sampai dengan 20). Itu kami menganggap bahwa ini adalah dalil yang imajiner. Karena dari semua jenjang rekapitulasi, baik tingkat TPS maupun kabupaten permasalahan ini tidak muncul. Muncul ini masalah setelah proses rekapitulasi tingkat kabupaten selesai. Nah, setelah kami juga ini menyampaikan bahwa saksi juga tidak melakukan keberatan di tingkatan PPS ... TPS kecamatan, nanti keberatannya itu di tingkatan kabupaten, tetapi tidak menyoal terkait persoalan yang ini.

**505. KETUA: SALDI ISRA [59:26]**

Oke. Apa lagi, Pak? Ada yang penting lagi?

**506. TERMOHON: ISKANDAR [59:40]**

Cukup, Yang Mulia.  
Untuk Petitum.

**507. KETUA: SALDI ISRA [59:41]**

Nah, kalau begitu, Pak. Langsung petitum.

**508. TERMOHON: ISKANDAR [59:42]**

Dilanjutkan oleh ketua saya.

**509. KETUA: SALDI ISRA [59:44]**

Ya.

**510. TERMOHON: ISKANDAR [59:45]**

Saya persilakan.

**511. TERMOHON: NASRUDDIN [59:46]**

Izin ambil, ambil bagian, Yang Mulia.

**512. KETUA: SALDI ISRA [59:48]**

Ya. Sudah, Bapak tidak bagi-bagi dengan para advokat, ini Bapak mau makan sendiri saja ini. Silakan, Pak.

**513. TERMOHON: NASRUDDIN [59:58]**

Ya, Petitem.

**514. KETUA: SALDI ISRA [59:59]**

Ya.

**515. TERMOHON: NASRUDDIN [01:00:00]**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 853 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2020 ... 24 pukul 15.43 WITA.

3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 adalah sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**516. KETUA: SALDI ISRA [01:00:50]**

Ya.

**517. TERMOHON: NASRUDDIN [01:00:51]**

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan.

**518. KETUA: SALDI ISRA [01:00:56]**

Cukup. Terima kasih, Pak.

**519. TERMOHON: NASRUDDIN [01:01:02]**

Terima kasih.

**520. KETUA: SALDI ISRA [01:01:04]**

Silakan dimatikan, Pak!  
Pihak Terkait.

**521. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BARON HARAHAH SALEH [01:01:07]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari Pihak Terkait mewakili Pasangan Rifqi Saifullah Razak dan Muhamad Farid, saya sendiri Baron Harahap, Yang Mulia. Kami akan menyampaikan keterangan Pihak Terkait.

Pertama berkaitan dengan Eksepsi (...)

**522. KETUA: SALDI ISRA [01:01:26]**

Ya.

**523. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: BARON HARAHAH SALEH [01:01:26]**

Hal yang kami hanya akan sampaikan adalah mengenai tenggat waktu (...)

**524. KETUA: SALDI ISRA [01:01:26]**

Ya.

**525. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: BARON HARAHAH SALEH [01:01:26]**

Pengajuan permohonan, Yang Mulia.

**526. KETUA: SALDI ISRA [01:01:30]**

Di halaman berapa itu, Pak?

**527. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: BARON HARAHAHAP SALEH [01:01:32]**

Tenggat waktu itu ada di halaman 10, Yang Mulia.

**528. KETUA: SALDI ISRA [01:01:36]**

Ya.

**529. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: BARON HARAHAHAP SALEH [01:01:38]**

Nah, di jawaban keterangan Pihak Terkait kami sampaikan, Yang Mulia, bahwa permohonan ini diajukan melewati tenggat waktu 3 hari sejak objectum litis ini diterbitkan.

**530. KETUA: SALDI ISRA [01:01:47]**

Oke.

**531. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: BARON HARAHAHAP SALEH [01:01:48]**

Atau ditetapkan/diumumkan. Ditetapkan itu, Yang Mulia, pada tanggal 4 Desember, permohonan diajukan pada tanggal 8.

**532. KETUA: SALDI ISRA [01:01:55]**

Oke.

**533. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: BARON HARAHAHAP SALEH [01:01:56]**

Ini perlu kami tanggapi, Yang Mulia, karena Pemohon menggunakan tafsir sejenak itu dengan terminologi hari tulat atau menghitung hari pertama itu lusa dalam permohonannya.

**534. KETUA: SALDI ISRA [01:02:08]**

Jadi, kalau ditetapkan tanggal 4, hitungannya tanggal 5?

**535. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: BARON HARAHAHAP SALEH [01:02:11]**

Menurut Pemohon, kalau ditetapkan tanggal 4, maka hitungan hari pertamanya, Yang Mulia, itu jatuh pada tanggal 6. Nah, dalam permohonannya disampaikan ini menggunakan metode tulat. Kurang lebih begitu, Yang Mulia.

**536. KETUA: SALDI ISRA [01:02:24]**

Tulat itu metode apa itu?

**537. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: BARON HARAHAH SALEH [01:02:28]**

**538.** Kata sejak itu dipadankan dengan kata *tulat*. Tulat itu, Yang Mulia, hari sesudah esok atau lusa.

**539. KETUA: SALDI ISRA [01:02:32]**

Oh, hari sesudah esok, ya. Berarti besok lusa, ya?

**540. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: BARON HARAHAH SALEH [01:02:36]**

Betul, Yang Mulia. Kalau kita buka KBBI, tulat itu artinya lusa, sama dengan lusa, Yang Mulia.

**541. KETUA: SALDI ISRA [01:02:43]**

Oke.

**542. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: BARON HARAHAH SALEH [01:02:44]**

Itulah hari pertama. Nah karena menggunakan argumentasi itu, Yang Mulia, Pemohon menghitung tanggal 8 Desember sebagai batas waktu akhir.

Nah, menurut Pihak Terkait, Yang Mulia.

**543. KETUA: SALDI ISRA [01:02:52]**

Ya.

**544. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: BARON HARAHAH SALEH [01:02:54]**

Dalam kami menelusuri, kami tidak menemukan Mahkamah pernah menggunakan atau menempatkan batas 3 hari itu dengan tafsir demikian. Dan karenanya, Yang Mulia, kami menganggap permohonan ini telah melewati tenggat waktu, batas pengajuan permohonan (...)

**545. KETUA: SALDI ISRA [01:03:10]**

Oke, berhenti di situ.  
Lanjut, kedudukan hukum.

**546. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: BARON HARAHAH SALEH [01:03:13]**

Nah, berkaitan dengan Kedudukan Hukum, Yang Mulia. Untuk di daerah Konawe Kepulauan, jumlah penduduknya, Yang Mulia, itu kurang lebih 43.000 sekian-sekian, dan karenanya berlaku ketentuan ambang batas 2%.

**547. KETUA: SALDI ISRA [01:03:27]**

Oke.

**548. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: BARON HARAHAH SALEH [01:03:29]**

Sementara dalam perkara a quo, Yang Mulia. Selisih antara Pemohon dengan Pihak Terkait, itu melewati ambang batas 2% sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Pihak Termohon.

Nah selanjutnya, Yang Mulia, mengenai kabur, permohonannya tidak cermat. Setidaknya kami meng-highlight ada 3 yang utama, Yang Mulia, berkaitan dengan kabur ini.

**549. KETUA: SALDI ISRA [01:03:51]**

Ya.

**550. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: BARON HARAHAH SALEH [01:03:53]**

Pertama, Pemohon tidak bisa membedakan antara Pemilu dengan pemilihan. Dalam permohonannya, acapkali menggunakan terminologi pemilihan umum.

**551. KETUA: SALDI ISRA [01:04:00]**

Tapi Putusan MK itu, sudah tidak dibedakan lagi, Pak.

**552. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 143: BARON HARAHAH SALEH  
[01:04:02]**

Baik, maksud saya, Yang Mulia.

**553. KETUA: SALDI ISRA [01:04:03]**

Ya.

**554. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 143: BARON HARAHAH SALEH  
[01:04:03]**

Ini berkaitan dengan permintaan untuk pemungutan suara ulang, kemudian pemilihan ulang.

**555. KETUA: SALDI ISRA [01:04:10]**

Oke.

**556. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 143: BARON HARAHAH SALEH  
[01:04:11]**

Kurang lebih dalam Petitumnya, begitu. Nah (...)

**557. KETUA: SALDI ISRA [01:04:13]**

Oke, kalau itunya beda, ya?

**558. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 143: BARON HARAHAH SALEH  
[01:04:14]**

Siap, Yang Mulia.

**559. KETUA: SALDI ISRA [01:04:15]**

Lanjut.

**560. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 143: BARON HARAHAH SALEH  
[01:04:16]**

Berikutnya lagi, Yang Mulia, di dalam Petitemnya, Pemohon justru meminta KPU daerah lain untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait. Yang diminta itu adalah KPU Kabupaten Konawe untuk mendiskualifikasi kami.

**561. KETUA: SALDI ISRA [01:04:29]**

Ya.

**562. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 143: BARON HARAHAH SALEH [01:04:29]**

Sementara dalam Perkara a quo, konteksnya ini adalah (...)

**563. KETUA: SALDI ISRA [01:04:34]**

Kepulauan?

**564. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 143: BARON HARAHAH SALEH [01:04:34]**

Pemilihan Konawe Kepulauan.

**565. KETUA: SALDI ISRA [01:04:36]**

Eh, 11-12 lah, itu, Pak.

**566. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 143: BARON HARAHAH SALEH [01:04:37]**

Siap.

**567. KETUA: SALDI ISRA [01:04:38]**

Jangan terlalu pelit-pelit amat, Pak. Konawe, Konawe Kepulauan, itu dekat-dekat, lah.

**568. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 143: BARON HARAHAH SALEH [01:04:41]**

Dekat, Yang Mulia.

**569. KETUA: SALDI ISRA [01:04:42]**

Ya.

**570. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 143: BARON HARAHAH SALEH  
[01:04:42]**

Malah daerah induknya dulu Kabupaten Konawe, kemudian dimekarkan menjadi Konawe Kepulauan. Namun ini berkaitan dengan adresat, Yang Mulia.

**571. KETUA: SALDI ISRA [01:04:49]**

Ya.

**572. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 143: BARON HARAHAH SALEH  
[01:04:49]**

Makanya kami tetap sampaikan ini bagian dari (...)

**573. KETUA: SALDI ISRA [01:04:51]**

Jangan, Bapak terlalu serius.

**574. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 143: BARON HARAHAH SALEH  
[01:04:52]**

Siap. Nah, yang lain, Yang Mulia, akan dilanjutkan oleh rekan saya, berkaitan dengan Pokok Perkara.

**575. KETUA: SALDI ISRA [01:04:58]**

Oke.

**576. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR  
143/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHAMMAD DZUL FIJAR  
[01:05:00]**

Oke, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

**577. KETUA: SALDI ISRA [01:05:01]**

Silakan.

**578. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR  
143/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHAMMAD DZUL FIJAR  
[01:05:02]**

Dalam Pokok Perkara.  
Setidaknya setelah kami menelaah, ada 6 Pokok Permohonan yang diajukan oleh (...)

**579. KETUA: SALDI ISRA [01:05:09]**

6 dalil?

**580. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHAMMAD DZUL FIJAR [01:05:10]**

Yang pertama, itu adanya pelanggaran kampanye dilakukan oleh Pihak Terkait.

**581. KETUA: SALDI ISRA [01:05:14]**

Ya.

**582. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHAMMAD DZUL FIJAR [01:05:14]**

Terhadap hal tersebut, Pihak Terkait menanggapi bahwa tidak terjadi pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Hal tersebut juga telah tertangani oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan.

Selanjutnya, mengenai (...)

**583. KETUA: SALDI ISRA [01:05:29]**

Ini pi ... Nomor 4 ini ... apa, ya? Incumbent? Enggak?

**584. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHAMMAD DZUL FIJAR [01:05:33]**

Enggak, Pak ... Tidak, Yang Mulia.

**585. KETUA: SALDI ISRA [01:05:34]**

Tidak ada incumbent di sini?

**586. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHAMMAD DZUL FIJAR [01:05:35]**

Ada tadi incumbent nomor urut (...)

**587. KETUA: SALDI ISRA [01:05:37]**

Yang Andi Muhammad Lutfi itu, ya?

**588. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHAMMAD DZUL FIJAR [01:05:38]**

Andi Muhammad Lutfi, Wakil Bupati Konawe Kepulauan, Yang Mulia.

**589. KETUA: SALDI ISRA [01:05:42]**

Oke. Lanjut.

**590. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHAMMAD DZUL FIJAR [01:05:44]**

Oke, baik.

Yang kedua, mengenai tuduhan pemihakkan Bupati Konawe Kepulauan dengan cara mengganti kepala desa di masa kampanye untuk kepentingan Pihak Terkait. Bahwa setelah kami mencermati Permohonan Pemohon yang didalilkan adalah 51 Kepala Desa, padahal senyatanya penggantian Kepala Desa itu yang di ... dijabat oleh ASN adalah 59 kepala desa.

**591. KETUA: SALDI ISRA [01:06:06]**

Oke.

**592. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHAMMAD DZUL FIJAR [01:06:07]**

Bahwa penunjukan Kepala Desa tersebut disebabkan 4 keadaan.

Yang pertama, itu karena 1 kepala desa yang berada di Desa Sawa Indah meninggal dunia, oleh sebab itu digantikan oleh pejabat Kepala

Desa. Yang kedua, Pejabat Kepala Desa di Desa Saburano ditetapkan sebagai terdakwa, oleh sebab itu digantikan oleh pejabat Kepala Desa yang berasal dari e (...)

**593. KETUA: SALDI ISRA [01:06:29]**

Tersangka atau terdakwa, Pak?

**594. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHAMMAD DZUL FIJAR [01:06:30]**

Terdakwa, Pak.

**595. KETUA: SALDI ISRA [01:06:32]**

Oh.

**596. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHAMMAD DZUL FIJAR [01:06:33]**

Terdakwa, Yang Mulia.

**597. KETUA: SALDI ISRA [01:06:33]**

Oke, oke.

**598. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHAMMAD DZUL FIJAR [01:06:33]**

Yang ketiga, ada 5 p ... 5 kepala desa yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri, oleh sebab itu digantikan oleh pejabat kepala desa dari ASN.

Dan yang terakhir, ada 52 kepala desa yang telah (...)

**599. KETUA: SALDI ISRA [01:06:47]**

Siapa yang menggantikannya tadi? Pejabat kepala desa itu? 5 Kepala Desa tadi, siapa yang menggantikannya?

**600. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHAMMAD DZUL FIJAR [01:06:52]**

A ... dari unsur ASN, Pak.

**601. KETUA: SALDI ISRA [01:06:54]**

ASN, ya?

**602. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHAMMAD DZUL FIJAR [01:06:55]**

Ya, Pak.

**603. KETUA: SALDI ISRA [01:06:56]**

Bukan ASN, ya?

**604. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHAMMAD DZUL FIJAR [01:06:57]**

Siap, Pak.

Yang keempat, pada tanggal 22 November 2023, diangkat 52 PNS menjadi pejabat kepala desa disebabkan kepala desa definitif telah berakhir masa jabatannya.

**605. KETUA: SALDI ISRA [01:07:09]**

Yang mengangkatnya siapa, Pak?

**606. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHAMMAD DZUL FIJAR [01:07:10]**

Yang mengangkatnya bupati, Pak.

**607. KETUA: SALDI ISRA [01:07:11]**

Bupati?

**608. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHAMMAD DZUL FIJAR [01:07:13]**

Mengangkat 52 kepala desa definitif.

**609. KETUA: SALDI ISRA [01:07:16]**

Tapi itu (...)

**610. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHAMMAD DZUL FIJAR [01:07:16]**

Kepala ... kepa ... pejabat kepala desa.

**611. KETUA: SALDI ISRA [01:07:18]**

Ya, pejabat kepala desa, tapi itu kan, bukan bupati yang ikut bertandung ... bertarung, kan?

**612. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHAMMAD DZUL FIJAR [01:07:22]**

Ya, bukan, Pak.

**613. KETUA: SALDI ISRA [01:07:22]**

Ada hubungan bupati enggak dengan Pasangan Calon Nomor 4 ini?

**614. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHAMMAD DZUL FIJAR [01:07:26]**

Ada, Pak.

**615. KETUA: SALDI ISRA [01:07:26]**

Apa hubungannya?

**616. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHAMMAD DZUL FIJAR [01:07:28]**

Ayah kandung, Pak.

**617. KETUA: SALDI ISRA [01:07:30]**

Oh.

**618. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHAMMAD DZUL FIJAR [01:07:30]**

Dari Calon Nomor 4, pemenang.

**619. KETUA: SALDI ISRA [01:07:32]**

Oh, jadi ini yang ikut bertarung anaknya, ya?

**620. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHAMMAD DZUL FIJAR [01:07:33]**

Ya, Pak.

**621. KETUA: SALDI ISRA [01:07:34]**

Ini ... ini masuk lagi kategori *Pilkada Sayang Anak*. Kemarin ada pilkada sayang anak juga, satu.

Silakan, lanjut.

**622. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHAMMAD DZUL FIJAR [01:07:41]**

Bahwa penunjukkan pejabat kepala desa dilakukan dalam kurun waktu 2023 ... 2022-2023 atau sebelum tahapan dan proses pemilihan, belum pula masuk masa kampanye sehingga maksud penunjukkan pejabat kepala desa oleh bupati tidak memiliki relevansi dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan, apa lagi Pemohon mencoba merangkai adanya kepentingan a quo dengan Pihak Terkait.

**623. KETUA: SALDI ISRA [01:08:08]**

Ya, lanjut. Cukup?

**624. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHAMMAD DZUL FIJAR [01:08:10]**

Lanjut, Pak. Di dalil yang ketiga, mengenai tuduhan pelanggaran netralitas di lingkup Pemerintahan Konawe Kepulauan.

**625. KETUA: SALDI ISRA [01:08:19]**

Ya.

**626. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHAMMAD DZUL FIJAR [01:08:19]**

Bahwa sebelum Pemohon membantah adanya pengerahan ASN untuk kepentingan kemenangan Pihak Terkait, terlebih dahulu kami akan memberikan tanggapan atas dalil Permohonan Pemohon yang merangkai adanya keterlibatan antara Pihak Terkait dengan status Rifqi Saifullah Razak, calon Bupati sebagai anak kandung Ir. H Amirullah, sebagai berikut.

Pertama, dalil Pemohon tersebut adalah upaya untuk menggiring Mahkamah pada anggapan bahwa kemenangan Pihak Terkait diraih karena adanya pelanggaran kampanye, pelanggaran TSM, pelanggaran netralitas, dan money politics yang dikreasi oleh Bupati Konawe Kepulauan.

**627. KETUA: SALDI ISRA [01:08:56]**

Lanjut.

**628. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHAMMAD DZUL FIJAR [01:08:00]**

Framing dep ... framing demikian bukanlah hanya fitnah maupun jauh lebih mencoba mereduksi hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2024 yang berlangsung secara fair dan demokratis. Justru temuan di lapangan, untuk menunjukkan Pemohonlah yang melakukan kecurangan dalam melibatkan ASN, aparatur desa, money politics, untuk mendapatkan suara pada pemilihan a quo. Bukti keterlibatan Pemohon dalam menggerakkan ASN, perangkat desa, dan money politics secara kasat mata diantaranya.

Yang pertama, Pemohon melibatkan perangkat desa Lantula atas nama Saryanti [!sic], peristiwa tersebut sudah dilaporkan oleh Pihak Terkait di Bawaslu Bupati Konawe Kepulauan. Yang kedua, Pemohon melibatkan perangkat Desa Rawa Indah, atas peristiwa tersebut Pihak Terkait telah melaporkan ke Bawaslu Bupati Konawe Kepulauan. Dan yang ketiga, Pemohon mendaftarkan Ketua Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa atau Ketua BPD Pasir Putih sebagai salah satu tim kampanye yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum. Atas peristiwa tersebut Pihak Terkait telah melaporkannya ke Bawaslu Bupati Konawe Kepulauan. Yang keempat, Pemohon selaku Pasangan Calon Nomor Urut 3 mengikut sertakan Aparatur Sipil Negara dalam kampanye akbar yang berlokasi di Lapangan TPI Langara, pada tanggal 23 November 2024.

**629. KETUA: SALDI ISRA [01:10:14]**

Apa bentuk pelibatannya, Pak?

**630. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHAMMAD DZUL FIJAR [01:10:16]**

Ikut kampanye naik di atas panggung, Pak.

**631. KETUA: SALDI ISRA [01:10:19]**

Siapa yang naik di atas panggung, Pak?

**632. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHAMMAD DZUL FIJAR [01:10:20]**

Aparatur Sipil Negara atas nama Yeni Jamil [!sic].

**633. KETUA: SALDI ISRA [01:10:25]**

1 orang?

**634. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHAMMAD DZUL FIJAR [01:10:25]**

1 orang, Pak.

**635. KETUA: SALDI ISRA [01:10:26]**

1, kita maafkan saja, Pak. Apa ada lagi, Pak?

**636. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHAMMAD DZUL FIJAR [01:10:31]**

Dan yang terakhir, Pak ... yang terakhir, Yang Mulia.

**637. KETUA: SALDI ISRA [01:10:34]**

Ya.

**638. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHAMMAD DZUL FIJAR [01:10:34]**

Pemohon membagi-bagikan uang menjelang hari pemungutan suara peristiwa tersebut terjadi di Desa Nambo Jaya, dan kami sudah bukti ... sudah berikan bukti di PT-28, Yang Mulia.

**639. KETUA: SALDI ISRA [01:10:45]**

Oke.

**640. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHAMMAD DZUL FIJAR [01:10:49]**

Lanjut, Yang Mulia.

**641. KETUA: SALDI ISRA [01:10:57]**

Kalau enggak ada, langsung ke Petitem, Pak. Masih ada?

**642. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHAMMAD DZUL FIJAR [01:11:01]**

Masih ada, Pak. Mengenai dugaan money politics dan manipulasi pemilihan.

**643. KETUA: SALDI ISRA [01:11:04]**

Oke.

**644. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHAMMAD DZUL FIJAR [01:11:04]**

Pertama, Pihak Terkait secara tegas telah menginstruksikan kepada seluruh tim pemenangan, tim kampanye, relawan agar tidak melibatkan ASN, PNS dan PPPK, perangkat desa, TNI, Polri, dalam setiap kegiatan-kegiatan pemenangan Pihak Terkait, termasuk juga dalam kegiatan kampanye. Instruksi tersebut Pihak Terkait telah sampaikan melalui surat instruksi Pihak Terkait Nomor 0013 dan seterusnya tentang Himbauan dan Instruksi pada tanggal 24 September 2024 (vide Bukti PT-44).

Yang kedua, Pemohon a quo telah ... pernah dilaporkan ke Bawaslu Konawe Kepulauan dengan Laporan 013 dan seterusnya, yang hasil penanganannya oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan dengan status laporan dihentikan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana, hasil penanganan lapor tersebut dituangkan dalam Formulir A-17 Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan (vide Bukti 41).

**645. KETUA: SALDI ISRA [01:12:08]**

Cukup, Pak? Bapak langsung ke Petikum, Pak.  
Yang lainnya nanti kami yang punya urusan itu.

**646. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHAMMAD DZUL FIJAR [01:12:14]**

**647.** Siap, Pak.

Baik, sebelum ke Petikum, Yang Mulia, kami akan menyampaikan kesimpulan.

**648. KETUA: SALDI ISRA [01:12:22]**

Tidak usah kesimpulan, Pak. Kayak bikin disertasi saja, Bapak ini.

**649. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHAMMAD DZUL FIJAR [01:12:25]**

Siap.

**650. KETUA: SALDI ISRA [01:12:26]**

Langsung ke petitum.

**651. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHAMMAD DZUL FIJAR [01:12:27]**

Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana maksud di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 853 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024, pada pukul 15.43 WITA.
3. Menetapkan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2024 sebagaimana keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe, Kepulauan nomor 8 ... 853 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 telah benar, yaitu sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

**652. KETUA: SALDI ISRA [01:13:28]**

Oke.

**653. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHAMMAD DZUL FIJAR [01:13:28]**

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait, bertanda tangan, Baron Harahap Saleh, Muhammad Rizal Haju, Muhammad Suhanri, La Ode Muhammad Dzul Fijar, Muhammad Fakir Al-Mubarak (...)

**654. KETUA: SALDI ISRA [01:13:42]**

Jangan disebut semua, sudah cukup itu. Kalau banyak sekali Bapak sebutkan tadi.

**655. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHAMMAD DZUL FIJAR [01:13:44]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**656. KETUA: SALDI ISRA [01:13:47]**

Terima kasih.

Sekarang kita ke Bawaslu Kepulauan ... Konawe sela ... Konawe Kepulauan. Silakan.

**657. BAWASLU: JIBRAR [01:13:55]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami akan menyampaikan keterangan yang berkaitan dengan hasil pengawasan kami selama tahapan pemilihan kepala daerah.

**658. KETUA: SALDI ISRA [01:14:07]**

Berapa laporan yang Bapak terima selama proses pemilihan, Pak?

**659. BAWASLU: JIBRAR [01:14:11]**

14, Yang Mulia.

**660. KETUA: SALDI ISRA [01:14:12]**

Sebentar, saya catat dulu. 14 laporan, ya?

**661. BAWASLU: JIBRAR [01:14:16]**

Siap, Yang Mulia.

**662. KETUA: SALDI ISRA [01:14:16]**

Dari 14, berapa yang diregistrasi?

**663. BAWASLU: JIBRAR [01:14:18]**

Yang diregistrasi 12.

**664. KETUA: SALDI ISRA [01:14:21]**

Oke, 12 diregistrasi, ya? Dari 12 yang diregistrasi, berapa yang terbukti?

**665. BAWASLU: JIBRAR [01:14:26]**

Yang ditindaklanjuti yang direkomendasi itu 3, Yang Mulia.

**666. KETUA: SALDI ISRA [01:14:31]**

3. Apa saja itu, Pak? 1 apa?

**667. BAWASLU: JIBRAR [01:14:32]**

Yang satu itu laporan Pemohon yang berkaitan dengan kepala desa aktif yang berfoto dengan salah satu pasangan calon. Kami rekomendasi (...)

**668. KETUA: SALDI ISRA [01:14:45]**

Kepala desa berfoto, ya?

**669. BAWASLU: JIBRAR [01:14:47]**

Ya, Yang Mulia.

**670. KETUA: SALDI ISRA [01:14:49]**

Dengan paslon nomor berapa, Pak?

**671. BAWASLU: JIBRAR [01:14:07]**

Nomor Urut 4, Yang Mulia.

**672. KETUA: SALDI ISRA [01:14:52]**

Oke, yang kedua, Pak?

**673. BAWASLU: JIBRAR [01:14:54]**

Yang kedua, itu perangkat desa.

**674. KETUA: SALDI ISRA [01:14:56]**

Ya.

**675. BAWASLU: JIBRAR [01:14:57]**

Yang apa namanya ... di Desa Lantula.

**676. KETUA: SALDI ISRA [01:15:03]**

Ya.

**677. BAWASLU: JIBRAR [01:15:03]**

Kami rekomendasi juga ke Sarianti. Atas nama Sarianti.

**678. KETUA: SALDI ISRA [01:15:07]**

Ya.

**679. BAWASLU: JIBRAR [01:15:07]**

Kami rekomendasi ke Kepala Desa Lantula.

**680. KETUA: SALDI ISRA [01:15:10]**

Ya.

**681. BAWASLU: JIBRAR [01:15:10]**

Kemudian yang ketiga (...)

**682. KETUA: SALDI ISRA [01:15:11]**

Ini ada apa yang dilakukan oleh perangkat desa ini, Sarianti ini?

**683. BAWASLU: JIBRAR [01:15:14]**

Berfoto dengan menunjukkan gestur tubuh.

**684. KETUA: SALDI ISRA [01:15:17]**

Dengan pasangan nomor berapa?

**685. BAWASLU: JIBRAR [01:15:20]**

Nomor Urut 3, Yang Mulia.

**686. KETUA: SALDI ISRA [01:15:21]**

Nah, ini Nomor 3. Gestur tubuh itu gimana caranya?

**687. BAWASLU: JIBRAR [01:15:25]**

Menunjukkan simbol. Siap, Yang Mulia.

**688. KETUA: SALDI ISRA [01:15:29]**

Oke. Kalau gini kan boleh juga, Pak, ya, kan?  
Terus, Pak? Yang ketiga, Pak?

**689. BAWASLU: JIBRAR [01:15:37]**

Yang terakhir, yang ketiga juga perangkat Desa Rawa Indah.

**690. KETUA: SALDI ISRA [01:15:41]**

Ya.

**691. BAWASLU: JIBRAR [01:15:41]**

Itu juga sama dengan perangkat Desa Lantula tadi yang foto (...)

**692. KETUA: SALDI ISRA [01:15:46]**

Untuk nomor berapa ini?

**693. BAWASLU: JIBRAR [01:15:47]**

Untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3.

**694. KETUA: SALDI ISRA [01:15:49]**

Oke, jadi ada yang untuk Pasangan Nomor 3, ada yang Pasangan Nomor 4, ya?

**695. BAWASLU: JIBRAR [01:15:55]**

Siap, Yang Mulia.

**696. KETUA: SALDI ISRA [01:15:56]**

Silakan, Pak. Jadi, 3 ini.

**697. BAWASLU: JIBRAR [01:15:56]**

Siap.

**698. KETUA: SALDI ISRA [01:16:00]**

Apa yang mau Bapak sampaikan? Jangan Bapak bacakan semua ini, Pak.

**699. BAWASLU: JIBRAR [01:16:03]**

Siap, Yang Mulia, kami (...)

**700. KETUA: SALDI ISRA [01:16:04]**

Poin-poin nya saja

**701. BAWASLU: JIBRAR [01:16:05]**

Sudah ada resume yang berkaitan dengan (...)

**702. KETUA: SALDI ISRA [01:16:07]**

Nah, silakan.

**703. BAWASLU: JIBRAR [01:16:10]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

Terhadap dalil Pemohon yang mengenai adanya keberpihakan bukati ... Bupati aktif Konawe Kepulauan mengarahkan Aparatur Sipil Negara (Pada IV angka 2 dan 4 halaman 7 romawi ... serta II angka 13.3 huruf a dan b halaman 11). Berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan.

Bahwa pada tanggal 6 Desember Tahun 2024 meneri ... Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan menerima surat pelimpahan laporan dugaan pelanggaran pemilihan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 221 dan seterusnya atas laporan yang disampaikan yang melaporkan ... dengan melaporkan bupati aktif, H ... Ir. H. Amrullah, S.T.

atas dugaan pelibatan aparat sipil negara dan atas laporan tersebut kami registrasi dan tindak lanjuti dengan status laporan tidak dapat ... laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan.

**704. KETUA: SALDI ISRA [01:17:19]**

Bapak hentikan karena bupati, nah yang dipersoalkan orang.

**705. BAWASLU: JIBRAR [01:17:23]**

Bukan, Yang Mulia. Karena bukti-bukti yang disampaikan tidak berkesesuaian dengan fakta yang di (...)

**706. KETUA: SALDI ISRA [01:17:28]**

Bukan karena dia bupati, ya? Silakan lanjutkan, Pak.

**707. BAWASLU: JIBRAR [01:17:31]**

Itu, Yang Mulia, informasi bahwa laporan tersebut itu mati dihentikan pada ... setelah Pembahasan Kedua di Sentra Gakkumdu.

**708. KETUA: SALDI ISRA [01:17:40]**

Oh, matinya di Sentra Gakkumdu, ya?

**709. BAWASLU: JIBRAR [01:17:42]**

Siap, Yang Mulia.

**710. KETUA: SALDI ISRA [01:17:43]**

Oke lanjut.

**711. BAWASLU: JIBRAR [01:17:44]**

Kemudian yang kedua.

Terhadap mengenai adanya dugaan kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 Rifqi Saifullah Razak, S.T. dan Muhamad Farid, S.E setelah pengambilan nomor urut pasangan calon yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Konawe Kepulauan pada tanggal 27 September, Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan menerima laporan yang melaporkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Rifqi

Saifullah Razak dan Muhamad Farid S.E. yang telah melakukan kampanye di luar jadwal.

Terhadap laporan tersebut, kami memegang status ... menerima dan mendaftarkan laporan tersebut dan memberikan status laporan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan, Yang Mulia.

**712. KETUA: SALDI ISRA [01:18:33]**

Jadi, tidak ada dugaan pelanggaran, ya?

**713. BAWASLU: JIBRAR [01:18:35]**

Siap, Yang Mulia.

**714. KETUA: SALDI ISRA [01:18:36]**

Oke, apa lagi, Pak?

**715. BAWASLU: JIBRAR [01:18:37]**

Selanjutnya terhadap.

**716. KETUA: SALDI ISRA [01:18:41]**

Ini ringkasan Bapak tebal juga, bukan meringkas Bapak, ini.

**717. BAWASLU: JIBRAR [01:18:44]**

Di resume, Yang Mulia.

**718. KETUA: SALDI ISRA [01:18:46]**

Oh, ya resumanya tebal juga (...)

**719. BAWASLU 14: JIBRAR [01:18:47]**

Secara keseluruhan di (...)

**720. KETUA: SALDI ISRA [01:18:48]**

Ya.

**721. BAWASLU: JIBRAR [01:18:47]**

Disampaikan.

Terhadap adanya keterlibatan aparatul sipil negara dan kepala desa secara langsung memenangkan dan berperan aktif sebagai tim pemenangan serta berkampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan menerima sejumlah laporan terkait keterlibatan ASN. Yang pertama, itu laporan pada tanggal 24 Oktober.

**722. KETUA: SALDI ISRA [01:19:20]**

Ya.

**723. BAWASLU: JIBRAR [01:19:20]**

Yang diregistrasi dan ditindaklanjuti tidak memenuhi unsur dugaan tindak pidana pemilihan.

**724. KETUA: SALDI ISRA [01:19:26]**

Oke.

**725. BAWASLU: JIBRAR [01:19:26]**

Itu, tadi ini yang pertama tadi yang kami sampaikan, Yang Mulia. Bahwa yang kepala desa ini yang direkomendasi ke Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan.

**726. KETUA: SALDI ISRA [01:19:36]**

Oke.

**727. BAWASLU: JIBRAR [01:19:36]**

Karena unsur dugaan tindak padananya tidak memenuhi ini oleh Bawaslu, kami merekomendasikan kepada Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan.

**728. KETUA: SALDI ISRA [01:19:43]**

Oke.

**729. BAWASLU: JIBRAR [01:19:44]**

Kami menganggap bahwa ini pelanggaran hukum lainnya.

Kemudian selanjutnya, laporan yang tanggal 18 November 2024 ini juga laporan dihentikan setelah dilakukan penanganan pelanggaran dan dibahas di Pembahasan Kedua Gakkumdu bahwa laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur dugaan tindak pidana pemilihan.

**730. KETUA: SALDI ISRA [01:20:14]**

Oke.

**731. BAWASLU: JIBRAR [01:20:17]**

Kemudian selanjutnya, prinsipnya tanggal ... yang laporan tanggal 5 Desember, menerima pelimpahan dari Bawaslu provinsi Sulawesi Tenggara.

**732. KETUA: SALDI ISRA [01:20:30]**

Ya.

**733. BAWASLU: JIBRAR [01:20:30]**

Dan kami menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dan lapo ... terhadap laporan tersebut setelah kami melakukan Pembahasan Kedua di Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Kepulauan, laporan dinyatakan tidak memenuhi unsur dugaan tindak pidana pemilihan.

Kemudian yang selanjutnya, Yang Mulia. Terhadap laporan yang 11 Desember, Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan menerima dan registrasi dan ... laporan sama prinsipnya, Yang Mulia, tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan.

**734. KETUA: SALDI ISRA [01:21:03]**

Yang tidak memenuhi, enggak usah Bapak sampaikan, Pak.

**735. BAWASLU: JIBRAR [01:21:05]**

Baik.

**736. KETUA: SALDI ISRA [01:21:06]**

Biar kita baca nanti.

**737. BAWASLU: JIBRAR [01:21:06]**

Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya, Yang Mulia.

**738. KETUA: SALDI ISRA [01:21:10]**

Ya.

**739. BAWASLU: JIBRAR [01:21:11]**

Saya persilakan.

**740. KETUA: SALDI ISRA [01:21:12]**

Silakan, siapa? Ibu? Nah, berarti doa saya makbul, saya sudah dalam hati, kapan Ibu ini mau disuruh menggantikan? Udah bosan kita mendengar suara Bapak-Bapak dari tadi ini.

Ya, Silakan, Bu.

**741. BAWASLU: IRMAWATI [01:21:27]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**742. KETUA: SALDI ISRA [01:21:28]**

Nah beda suasananya, kan? Begitu suara ibu-ibu jadi beda suasananya.

Silakan, Bu.

**743. BAWASLU: IRMAWATI [01:21:34]**

Tambahannya sedikit saja mungkin, Yang Mulia, 1 dalil.

**744. KETUA: SALDI ISRA [01:21:36]**

Ya.

**745. BAWASLU: IRMAWATI [01:21:36]**

Yang belum disampaikan, terkait Money Politics bahwa ... terhadap dalil permohonan dengan adanya dugaan money politics yang dilakukan oleh perangkat desa, sekretaris dinas, pelaksana tugas desa, sekretaris camat, ASN, PPPK, guru, serta dinas PMD maupun para pengurus dan kader desa di Kabupaten Konawe Kepulauan, (II angka 13.2 huruf A dan B halaman 13).

Berikut keterangan Bawaslu, berkenaan ... berkenaan dengan dalil permohonan tidak terdapat laporan atau temuan dan Bawaslu telah melakukan pencegahan melalui Surat Imbauan Nomor 129/PM dan seterusnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**746. KETUA: SALDI ISRA [01:22:19]**

Ya.

**747. BAWASLU: IRMAWATI [01:22:20]**

Kemudian Bawaslu sudah melakukan pencegahan melalui Surat Imbauan kepada Kepala Desa se-Kabupaten Konawe Kepulauan dengan Nomor 131/PM dan seterusnya, Yang Mulia, dianggap dibacakan (vide Bukti PK-37 dan vide Bukti PK-38).

Itu saja mungkin, Yang Mulia, yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**748. KETUA: SALDI ISRA [01:22:47]**

Waalaaikumsalam.

Cukup, Bawaslu? Terima kasih.

Terima kasih untuk ... apa ... semua Pihak yang ... apa ... untuk 143 Kabupaten Konawe Kepulauan.

Sekarang kita masuk ke Kabupaten Merangin. Silakan, bergantian.

Pemeriksaan untuk ... apa ... Kabupaten Merangin akan diambil alih oleh, Yang Mulia Bapak Arsul Sani.

Silakan, Yang Mulia.

**749. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:23:34]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel Prof. Saldi Isra.

Silakan, Termohon menyampaikan pokok-pokok jawaban terhadap permohonan dari Pemohon.

**750. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [01:23:55]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, kami dari KPU Kabupaten Merangin, Jambi. Dalam hal ini diwakil oleh Pak Alber Trisman, ada di sebelah kiri saya, memberikan kuasa kepada kami, Law Office, Saleh and partners.

**751. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:24:13]**

Ya.

**752. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [01:24:14]**

Itu berdasarkan Surat Kuasa tanggal 5 Januari 2025 dan tanggal 9 Januari juga memberikan kuasa ke Jaksa Pengacara Negara Kabupaten Merangin, Yang Mulia.

**753. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:24:23]**

Ya.

**754. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [01:24:24]**

Jadi, semua ada 17 orang.

**755. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:24:27]**

Oke.

**756. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [01:24:27]**

Pertama, kaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami menganggap bahwa pem ... Permohonan ini ... apa namanya ... Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili perkara ini karena Pemohon tidak menjelaskan atau mendalilkan tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara. Yang ada dalam permohonan ini hanya berkaitan dengan persoalan ... apa namanya ... TSM, yang itu bagi kami adalah kewenangan dari Bawaslu.

**757. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:24:56]**

Ya.

**758. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [01:24:56]**

Yang kedua, Eksepsi, yang kedua (...)

**759. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:24:57]**

Gimana kalau sedangnya kita akhiri saja, Pak? Kan enggak berwenang ini, Mahkamah.

**760. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [01:25:01]**

Ya, itu terserah, Yang Mulia, nanti dalam putusan.

**761. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:25:06]**

Bukan. Ini bahasanya para lawyer, waktu saya duduk sebagai Pihak Terkait atau Pemohon supaya Mahkamahnya tidak terkaget-kaget, maka bahasanya *bahwa substansi atau materi Permohonan tidak termasuk dalam kewenangan*.

**762. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [01:25:21]**

Baik.

**763. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:25:21]**

Beda dengan ... apa ... mengatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang. Ini untuk para lawyer karena saya pernah duduk di sana kan, di sana juga, ya.

**764. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [01:25:30]**

Betul, Yang Mulia. Kami sudah narasikan itu, Yang Mulia, di poin 13. Kemudian (...)

**765. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:25:36]**

Oke.

**766. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [01:25:37]**

Lanjut di halaman 8, Yang Mulia, kaitan dengan legal standing. Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki legal standing karena ini kaitan dengan kelebihan presentase yang menurut jumlah Kabupaten Merangin ini, ini jumlah penduduknya adalah 393.299.

**767. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:25:59]**

Ya.

**768. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [01:26:00]**

Dan kemudian untuk ... apa namanya ... suara sahnya, kalau kemudian dibandingkan antara Paslon Nomor Urut 1 dengan Nomor Urut 2, itu selisih 1,9%, Yang Mulia.

**769. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:26:19]**

Ya.

**770. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [01:26:20]**

Hingga kami menganggap Pemohon tidak mempunyai legal standing, Yang Mulia.

**771. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:26:25]**

Oke.

**772. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [01:26:26]**

Kami lanjut kaitan dengan obscur libel ini kesalahan apa namanya ... pengetikan. Di halaman 13 itu semestinya berdasarkan keputusan KPU.

**773. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:26:38]**

Ya.

**774. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [01:26:39]**

Masing-masing pasangan calon seharusnya Nomor Urut 2 itu adalah 197.018, tetapi oleh Pemohon disampaikan *197.008*, Yang Mulia.

**775. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:26:51]**

He em.

**776. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [01:26:51]**

Itu yang kedua, kaitan dengan persoalan yang dijadikan persandingan adalah hasil lembaga survei yang dijadikan dasar oleh Pemohon.

Kemudian selanjutnya masuk ke Pokok Pemohonan, Yang Mulia.

**777. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:27:10]**

Ya, silakan.

**778. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [01:27:11]**

Kami sudah menggambarkan di halaman 18.

**779. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:27:14]**

Ya.

**780. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [01:27:15]**

Tentang jumlah penduduk, sampai jumlah TPS, jumlah apa namanya ... suara tidak sah dan jumlah desa juga sudah kami sampaikan.

**781. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:27:26]**

Ya.

**782. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [01:27:26]**

Biar tidak ditanya sama, Yang Mulia.

**783. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:27:28]**

Ya.

**784. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [01:27:28]**

Kemudian, tabel juga kaitan dengan jumlah apa namanya ... kecamatan dan desa yang di halaman 24, Yang Mulia.

**785. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:27:38]**

Ya, ini hal-hal yang dipersoalkan, ya?

**786. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [01:27:38]**

Pemasalahan kami kelompokkan ada 12 pemasalahan.

**787. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:27:45]**

Ya.

**788. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [01:27:45]**

Kami sudah petakan semua itu, kami akan masuk ke halaman, kami akan rinci semua jawaban dari 12 permasalahan, termasuk juga di 39 TPS dalil dari Pemohon ini kami akan jawab, Yang Mulia. Yang pertama, kaitan dengan (...)

**789. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:28:07]**

Pokok-pokoknya, Pak, ya.

**790. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [01:28:08]**

Betul, Yang Mulia.

**791. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:28:09]**

Kalau dibacakan semua, 70 halaman lebih ini jawaban Anda.

**792. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [01:28:12]**

10 menit selesai, Yang Mulia.

**793. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:28:13]**

Ya, oke.

**794. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [01:28:14]**

Yang pertama, tidak terdapat lembaga survei yang tercatat dalam pemilihan bupati dan wakil bupati.

**795. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:28:21]**

Ya.

**796. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [01:28:22]**

Merangin Tahun 2024, ini untuk menjawab permohonan halaman 7 angka 3 Permohonan Pemohon. Bahwa di Merangin itu tidak terdaftar yang namanya lembaga survei independen.

**797. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:28:35]**

Ya.

**798. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [01:28:36]**

Kemudian, yang kedua. Kaitan dengan telaah ... apa ... Termohon telah mendistribusikan surat pemberitahuan, itu ... apa namanya ... menjawab Permohonan Pemohon halaman 8 angka 8.

**799. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:28:50]**

Ya.

**800. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [01:28:51]**

Halaman 20 angka 12. Pada intinya ... apa namanya ... Pemohon apa ... menyampaikan bahwa Termohon tidak menyampaikan undangan untuk memilih para pemilih dan pendukung Pemohon Paslon 01 yang tidak mendapatkan undangan di Desa Tuo Kecamatan Lembah Masurai dan Desa Nilo Dingin Kecamatan Lembah Masurai.

Nah, kemudian ini kami jelaskan bahwa tanggapan dari kami, Termohon menanggapi dalil Termohon tersebut Kecamatan Lembah Masurai itu tidak terdapat di Kabupaten Merangin. Namun, Desa Nilo Dingin terletak di Kecamatan Lembah Masurai.

Kemudian, kami masuk di halaman 17 poin 20.

**801. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:29:47]**

Ya.

**802. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [01:29:48]**

Kaitan dengan dalam pelaksanaan pendistribusian surat pemberitahuan oleh KPPS di Kabupaten Merangin terdapat surat pemberitahuan yang dikembalikan yang mana dalam hal terdapat pengembalian surat pemberitahuan akan dituangkan dalam rekapitulasi pengembalian C.Pemberitahuan, berikut sudah kami ... apa namanya ... tuangkan di Desa Nilo Dingin itu ada yang ter-distribusi 978.

**803. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:30:17]**

Ya.

**804. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [01:30:18]**

Kemudian, di Desa Tuo itu terdistribusi sebanyak 3.028 yang tidak ter-distribusi juga sudah kami catat.

Kemudian di 2.4, Yang Mulia, untuk memastikan apakah pemilih sudah terdaftar sebenarnya dapat memilih ... apa namanya ... bisa datang ke TPS membawa ke KTP.

Kemudian menjawab persoalan yang ketiga di halaman 39, tidak terdapat manipulasi daftar hadir di seluruh TPS di Desa Pulau Tengah dan Desa Muara Manderas, Kecamatan Jangkat, ini dalam rangka menjawab Permohonan Pemohon angka ... halaman 8 angka 8 huruf b, yang pokoknya menyatakan Termohon melakukan manipulasi daftar hadir oleh petugas KPPS di Desa Pulau Tengah dan Desa Muara Manderas, Kecamatan Jangkat ini tidak benar, Yang Mulia, karena di Desa Pulau Tengah, halaman 40, terdapat 5 TPS dan 4 TPS di Desa Muara Manderas Kecamatan Jangkat, setiap pemilih dipanggil sesuai dengan urutan kehadiran pemilih sebagai tertuang dalam daftar hadir.

**805. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:31:35]**

Oke.

**806. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [01:31:36]**

Dalam pelaksanaan pemberian sua ... sura ... suara oleh pemilih tersebut tidak terdapat keberatan dari pihak mana pun termasuk saksi dari Pemohon di 9 TPS, 2 desa yang berkaitan dengan apa yang dilakukan Pemohon (...)

**807. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:31:49]**

Ini saksinya Pemohon tanda tangan?

**808. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [01:31:52]**

Tidak ada keberatan, Yang Mulia.

**809. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:31:54]**

Ha?

**810. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [01:31:55]**

Betul, Yang Mulia.

**811. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:31:56]**

Tidak keberatan tapi tanda tangan apa enggak?

**812. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [01:31:59]**

Tanda tangan, Yang Mulia.

**813. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:32:00]**

**814.** Tanda tangan.

**815. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [01:32:01]**

Nanti kami buktikan, Yang Mulia.

**816. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [01:32:06]**

Kemudian, Termohon memfasilitasi pemilih disabilitas di Desa Lantak Seribu, Kecamatan Renah Pamenang. Jadi, ini ada 3 pemilih disabilitas. Yang pertama adalah 1 laki-laki dan di TPS 003 dan 2 perempuan TPS 04 sudah kami fasilitasi dan kami jadikan bukti, Yang Mulia.

**817. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:32:28]**

Oke.

**818. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [01:32:30]**

Kemudian, pelantikan KPPS dan PPK, ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di Pemohonan Pemohon halaman 9 angka 9, Pemohon mendalilkan pokoknya PPS tidak melibatkan kepala desa dalam pelantikan KPPS dan pengangkatan PPK tidak melibatkan camat.

**819. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:32:37]**

Ya.

**820. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [01:32:37]**

Kami mendalilkan, ini mendasarkan pada Undang-Undang Pilkada Pasal 6 ayat (2), tidak ada kewajiban Termohon untuk melibatkan kepala desa dan camat.

Kemudian halaman 43, terkait adanya keberatan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten. Ini kami mau tegaskan, Yang Mulia, tidak akan kami bacakan semuanya, ada 39 TPS yang dipersoalkan, ini di halaman 43 sampai halaman 56, intinya ini tersebar di 15 kecamatan, tapi saksi dari Pemohon semuanya tanda tangan, Yang Mulia.

**821. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:33:21]**

Tanda tangan, oke.

**822. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [01:33:31]**

Kemudian kami masuk pada halaman 56. Terhadap pelanggaran netralitas ASN, Permohonan Pemohon halaman 16 sampai 12, angka 12, karena ini adalah kewenangan Bawaslu biar nanti Bawaslu yang menyampaikan, Yang Mulia.

**823. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:33:38]**

Ya.

**824. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [01:33:39]**

Kami tidak akan masuk, walaupun kami sedikit menyinggung bahwa ini adalah kewenangan Bawaslu.

Kemudian permasalahan yang ke-7 terhadap pelanggaran kampanye di Kecamatan Renah Pembarap, Kecamatan Sungai Manau, dan kecamatan Pangkalan Jambu, pada Pilkada Kabupaten Merangin Tahun 2024. Ini menjawab Permohonan Pemohon halaman 19 angka 15, Termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Merangin atau instansi lainnya terkait dalil Pemohon terkait dengan kampanye yang dilakukan oleh saudara Yuzan anggota DPRD Kabupaten Merangin.

Kemudian menjawab halaman 20 angka 16, pada pokoknya mendalilkan terjadinya dugaan pelanggaran administrasi tidak disegelnya 7 kotak suara di Desa Sido Lego, kecamatan Tabir Lintas, terdapat selisih antara daftar hadir pemilih di desa, dengan data C.Hasil sejumlah ... apa namanya ... 10 kertas suara. Nah, kami menanggapi bahwa kami tidak memahami apa yang didalilkan oleh Pemohon karena di sana disebutkan 7, padahal di Desa Sido Lego itu hanya berjumlah 4 kotak suara.

**825. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:35:19]**

Suara.

**826. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [01:35:21]**

Sehingga kami tidak menanggapi itu karena melebihi dari jumlah TPS. Kemudian di halaman yang lain kaitan dengan ... apa namanya ... rekomendasi dari Bawaslu di Poin 128, Yang Mulia. Termohon sudah menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu itu melalui surat peringatan yang diberikan kepada KPPS TPS 01 Desa Tambangbaru, Kecamatan Tabir Lintas. Dan surat peringatan terhadap KPPS, TPS 04 Kelurahan Pamenang, Kecamatan Pamenang.

Kemudian yang lain juga, rekomendasi-rekomendasi itu juga dijalankan oleh Termohon di poin 1.30, dimana ... Termohon telah memberikan surat peringatan terhadap KPPS 01 di Jelantang ... di Desa Jelantang, Kecamatan Pamenang. Dan surat peringatan KPPS TPS 04 di Desa Jelantang, Kecamatan Pamenang.

**827. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:36:29]**

Oke, berikutnya.

**828. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [01:36:31]**

Jelantang.

**829. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:36:31]**

Oke.

**830. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [01:36:32]**

Kemudian di halaman 61, Yang Mulia, Termohon telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi Bawaslu Kabupaten Merangin dalam melaksanakan Pilkada Kabupaten Merangin. Ini ada 11 rekomendasi, Yang Mulia, kami tidak akan bacakan semuanya.

**831. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:36:51]**

Ya.

**832. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [01:36:52]**

Karena rekomendasi ini sudah ditindaklanjuti dan semua sudah diberikan surat peringatan. Ada 9 KPPS dan 2 PPK yang sudah diberikan surat peringatan oleh Termohon.

Kemudian halaman 64, perlu Termohon sampaikan bahwa 13 ... 39 TPS, di 14 kecamatan yang didalilkan dan dipermasalahkan oleh Pemohon. Berdasarkan fakta yang ada bahwa saksi Pemohon telah menanda ... menandatangani Model C.Hasil di 39 TPS di 14 desa kecamatan dan tidak mengisi C.Keberatan Saksi sebagai bukti adanya keberatan dari saksi Pemohon.

Ini juga di 145 sudah diperkuat oleh penjelasan persidangan sebelumnya 13 Januari 2025, Kuasa Pemohon mengatakan bahwa saksi Pemohon telah menandatangani Model C.Hasil di 39 TPS, di 14 kecamatan dan tidak terdapat keberatan.

**833. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:37:58]**

Oke.

**834. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [01:37:58]**

Selanjutnya, kami sengaja menyandingkan perolehan suara di 39 TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon dimana pada dasarnya hasilnya sama. Kami sudah masukkan semuanya ini, Yang Mulia. Tidak ada perbedaan antara C.Hasil dengan D.Hasil Kecamatan, kami rinci sebanyak 39 ... apa namanya ... TPS.

**835. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:38:29]**

Ya.

**836. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [01:38:29]**

Dan ini sudah di ... apa ... dirinci semuanya, Yang Mulia, sampai di halaman 84.

**837. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:38:37]**

Masalahnya cuma satu, ya? Pemohon kalah semua di sini?

**838. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [01:38:44]**

Nah, itu persoalan Pemohon, Yang Mulia. Karena yang jelas di (...)

**839. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:38:49]**

Ya.

**840. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [01:38:49]**

TPS semuanya tanda tangan, Yang Mulia.

**841. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:38:51]**

Oke.

**842. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [01:38:51]**

Kemudian keberatannya itu adalah di kecamatan.

**843. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:38:54]**

Ya, terus, apa lagi? Petitem?

**844. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [01:38:56]**

147 dulu, Yang Mulia.

Berdasarkan penyandingan tersebut, membuktikan senyatan-nyatanya tidak terdapat selisih suara (...)

**845. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:39:03]**

Oke.

**846. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [01:39:03]**

C.Hasil dengan D.Hasil, Yang Mulia.

**847. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:39:06]**

Ya, oke.

**848. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [01:39:07]**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, perolehan suara yang benar menurut Termohon itu, Yang Mulia ... karena sebelumnya ada kesalahan penge ... pengetikan dari Pemohon, saya mau sampaikan bahwa perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 1 itu 96.605 suara.

**849. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:39:22]**

Ya.

**850. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [01:39:23]**

02 adalah 100.413, sehingga total suara (...)

**851. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:39:28]**

Oke.

**852. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [01:39:28]**

Sah 197.018.

**853. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:39:29]**

Sudah dipahami, langsung Petitem.

**854. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [01:39:32]**

Petitem.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai ma ... sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 1749 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024, pukul 17.20 WIB.

3. Menyatakan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin, tidak kami bacakan.

**855. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:40:28]**

Ya.

**856. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [01:40:29]**

Atau apabila, Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami Kuasa Hukum Termohon. Saya Dr. Saleh, S.H., M.H. Terima kasih, Yang Mulia.

**857. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:40:44]**

Terima kasih, Pak Saleh, Kuasa Termohon.

Saya tanya nih, ya, ke KPU Merangin. Pertanyaannya saya balik nih, ada enggak TPS-TPS yang dimana Pemohon ada saksinya, tapi tidak tanda tangan? Demikian juga di tingkat kecamatan.

**858. TERMOHON: ALBER TRISMAN [01:41:06]**

Ya, sejauh ini di tingkat TPS tidak kita temukan, Yang Mulia.

**859. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:41:08]**

Di tingkat kecamatan?

**860. TERMOHON: ALBER TRISMAN [01:41:08]**

Kemudian di tingkat kecamatan itu ada 3 kecamatan yang tidak ditandatangani, Model D.Kecamatan.

**861. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:41:16]**

Dari berapa kecamatan?

**862. TERMOHON: ALBER TRISMAN [01:41:17]**

24, Yang Mulia.

**863. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:41:18]**

Dari 24, ada 3 yang tidak tetan ... ditandatangani?

**864. TERMOHON: ALBER TRISMAN [01:41:22]**

Ya, tapi dapat kami sampaikan juga, Yang Mulia. Bahwa dari 3 kecamatan tersebut, hanya 2 kecamatan Pemohon ini yang mengisi Model D.Keberatan, Yang Mulia.

**865. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:41:31]**

Oke, ya. Di tingkat kabupaten, saksi Pemohon?

**866. TERMOHO: ALBER TRISMAN [01:41:35]**

Tidak tanda tangan, Yang Mulia.

**867. TERMOHON 180: ALBER TRISMAN [01:41:37]**

Tidak tanda tangan. Oke, baik. Terima kasih. Saya kira itu cukup. Ini Pak Saleh tebalnya 85 halaman.

Sekarang Pihak Terkait. Ini tebalnya berapa? 40 halaman. Karena itu pokok-pokoknya juga.

**868. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: AMIN FAHRUDIN [01:41:58]**

Baik, Yang Mulia.

**869. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:41:58]**

Ini halamannya tebal-tebal ini, fee-nya gede-gede semua ini kayaknya, ya.

Ya. Silakan, Pihak Terkait.

**870. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: AMIN FAHRUDIN [01:40:00]**

Baik, Yang Mulia.

Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara 180. Pihak Terkait atas nama M. Syukur dan Abdul Khafidh. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 7 Kuasa Hukum, dan pada kesempatan ini yang hadir adalah saya sendiri, Amin Fahrudin, dan juga rekan kami, Dhimas Pradana.

Dalam Eksepsi. Dalam eksepsi, yaitu kaitan dengan norma ambang batas, Pemohon tidak memenuhi ambang batas, yaitu seperti yang disebut dalam (...)

**871. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:42:46]**

Ya.

**872. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: AMIN FAHRUDIN [01:42:46]**

Jawaban Termohon, yaitu 1,9%.

**873. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:42:49]**

Ya.

**874. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: AMIN FAHRUDIN [01:40:00]**

Bahwa secara formil semua laporan pelanggaran telah dilakukan penegakan hukum telah selesai dan tidak ada yang terabaikan yang dilakukan oleh penyelenggara. Argumentasi pelanggaran TSM yang disampaikan Pemohon dalam perkara a quo tidak pernah diajukan penyelesaiannya kepada Bawaslu Provinsi Jambi.

**875. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:43:10]**

Ya.

**876. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: AMIN FAHRUDIN [01:43:10]**

Artinya Pemohon tidak pernah mempergunakan hak yang disediakan oleh hukum untuk melaporkan pelanggaran TSM tersebut dan pada akhirnya telah gugur haknya dan tidak dapat diajukan kepada Mahkamah.

**877. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:43:23]**

Oke.

**878. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: AMIN FAHRUDIN [01:43:23]**

Eksepsi obscur. Bahwa Pemohon dalam Petitumnya tidak meminta pembatalan hasil pemungutan suara di 10 kecamatan, akan tetapi langsung memohonkan pemungutan suara di 10 kecamatan tersebut dan tanpa menyebutkan pula di TPS mana saja dan di desa apa.

**879. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:43:46]**

Oke.

**880. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: AMIN FAHRUDIN [01:43:46]**

Masuk ke Pokok Permohonan.

Bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara jelas dan rinci pada bagian mana hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon mengandung kesalahan, melainkan tentang dugaan tindak ... tindakan Termohon yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, akan tetapi Pemohon tidak menjelaskan dampak perolehan suara karena adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut, termasuk bagaimana persebaran suara tersebut, apa lagi Pemohon juga tidak menjelaskan dan menggambarkan dengan cara apa dan bagaimana Termohon melakukan pelanggaran TSM yang berdampak pada perolehan suara tersebut.

Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penggelembungan suara Pihak Terkait sejumlah 10.020 ... 10.020 suara.

**881. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:44:45]**

Ya.

**882. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: AMIN FAHRUDIN [01:44:45]**

Yang didasarkan kepada hasil lembaga survei independen. Hal ini tentu sangat absurd dan kabur karena lembaga survei bukanlah lembaga yang berwenang dalam penyelenggara pemilihan.

Bahwa Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan ataupun laporan kepada KPPS maupun panwas pada seluruh TPS-TPS se-Kabupaten Merangin.

**883. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:45:14]**

Ya.

**884. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: AMIN FAHRUDIN [01:45:14]**

Akan tetapi, baru mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan dan kabupaten setelah mengetahui suaranya kalah unggul dengan Pihak Terkait.

Bahwa terkait semua laporan yang disampaikan, berdasarkan status lap ... berdasarkan status laporan dan hasil audiensi Pihak Terkait dengan Bawaslu, telah dilakukan tindakan penegakan hukum atau penegakan aturan dan tidak ada satu pun laporan yang belum ditindaklanjuti oleh

penyelenggara seperti tergambar dalam klasifikasi penanganan pelanggaran sebagai berikut.

Ini terurai dalam halaman 13 sampai 34.

**885. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:46:00]**

Ya.

**886. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: AMIN FAHRUDIN [01:46:00]**

Kami mengklasifikasikan ada 5, Yang Mulia.

**887. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:46:04]**

Ya.

**888. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: AMIN FAHRUDIN [01:46:05]**

Pertama adalah tidak terdapat laporan dari Pemohon.

**889. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:46:08]**

Ya.

**890. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: AMIN FAHRUDIN [01:46:08]**

Bahwa sebagian besar pelanggaran yang didalilkan Pemohon dalam permohonan a quo tidak pernah dilaporkan kepada penyelenggara.

**891. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:46:17]**

Oke.

**892. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: AMIN FAHRUDIN [01:46:17]**

Seperti laporan yang terjadi di ... ada 10 TPS, ya.

**893. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:46:22]**

Ya.

**894. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: AMIN FAHRUDIN [01:46:23]**

Di Desa Tuo, Kecamatan Lembah Masurai, di Desa Pulau Tengah, dan sebagainya sampai di T ... di TPS 7, Desa Tuo, Kecamatan Lembah Masurai.

**895. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:46:34]**

Oke, ini kan Anda ... Anda sudah tanggap satu per satu dengan detail, ya?

**896. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: AMIN FAHRUDIN [01:46:39]**

Betul, Yang Mulia.

**897. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:46:40]**

Ya. Oke.

**898. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: AMIN FAHRUDIN [01:46:41]**

Yang kedua, adalah (...)

**899. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:46:42]**

Selanjutnya. Enggak usah diini satu-satu, ini kita bisa baca sendiri, paham.

**900. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: AMIN FAHRUDIN [01:46:48]**

Baik.

**901. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:46:48]**

Bagus juga yang Anda buat, setiap masalah langsung Anda tanggap satu per satu.

**902. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: AMIN FAHRUDIN [01:46:54]**

Baik, Yang Mulia.

**903. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:46:54]**

Oke, terus.

**904. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: AMIN FAHRUDIN [01:46:58]**

Terka ...terkait bahwa Pemohon mendalilkan adanya keterlibatan ASN (...)

**905. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:47:02]**

ASN.

**906. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: AMIN FAHRUDIN [01:47:02]**

Atau tidak netralnya ASN ditandai dengan maraknya ucapan selamat kepada Kandidat 02 atau Pihak Terkait, pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 atau setelah dikeluarkannya penetapan suara pasangan calon terbanyak oleh Termohon. Bahwa terhadap dalil tersebut sama sekali bukan atas permintaan dari Pihak Terkait oleh karena dalil Pemohon pada angka 12 merupakan persangkaan tidak berdasarkan fakta dan hukum karena terjadinya ucapan tersebut setelah rapat Pleno penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten sehingga dalil tersebut tidak mempunyai relevansi dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Bahwa malah sebaliknya, Pemohonlah yang melakukan kecurangan dengan cara melalui istri Camat Lembah Masurai yang memerintahkan istri Kepala Desa Koto Rami untuk memenangkan Pemohon. Hal ini seperti Pihak Terkait sampaikan dalam bukti video yang termuat dalam Bukti PT-53.

Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat anggota DPRD aktif Merangin atas nama Yuzan diduga mempengaruhi pendirian ... mempengaruhi pendirian para pemilih di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Renah Pembarap, Kecamatan Sungai Manau, dan Kecamatan Pangkalan Jambu. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan pemberitahuan tentang status laporan Bawaslu Kabupaten Merangin telah diselesaikan oleh Bawaslu dan dinyatakan tidak memenuhi unsur sesuai pelanggaran ... sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan. Justru Pemohonlah yang melakukan pelanggaran kampanye dengan cara pawai arak-arakan di

Jalan Raya Lintas Sumatra dan telah dilaporkan ke Bawaslu, yang mana Bawaslu telah menyatakan Pemohon terbukti melakukan pelanggaran seperti disampaikan dalam Bukti PT-57.

**907. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:49:08]**

Oke.

**908. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: AMIN FAHRUDIN [01:48:09]**

Tentang dasar hukum TSM, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

**909. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:49:14]**

Ya.

**910. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: AMIN FAHRUDIN [01:49:16]**

Bahwa oleh karena tuduhan pelanggaran TSM yang disampaikan dalam dalil Pemohon adalah kabur dan tidak dapat dibuktikan dikarenakan seluruh Form Model C.Hasil-KWK-Bupati dari 634 TPS atau seluruh TPS se-Kabupaten Merangin telah ditandatangani oleh seluruh saksi masing-masing pasangan calon, maka dengan demikian beralasan hukum apabila Mahkamah menyatakan seluruh Permohonan dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan (...)

**911. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:50:50]**

Oke.

**912. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: AMIN FAHRUDIN [01:50:50]**

Tidak dapat diterima.

**913. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:50:52]**

Petitum.

**914. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: AMIN FAHRUDIN [01:50:53]**

Bahwa dari seluruh dalil dalam perkara a quo tidak memiliki korelasi atau tidak memiliki relevansi (...)

**915. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:50:59]**

Ya (...)

**916. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: AMIN FAHRUDIN [01:51:00]**

Dengan (...)

**917. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:51:00]**

Itu, dinilai (...)

**918. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: AMIN FAHRUDIN [01:51:01]**

Baik, Yang Mulia.

**919. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:50:02]**

Ya, nanti biar kita yang menilai, ya.

**920. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: AMIN FAHRUDIN [01:50:04]**

Terakhir.

**921. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:50:05]**

Petitum, ya.

**922. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: AMIN FAHRUDIN [01:50:06]**

Petitum, Yang Mulia.

Dalam Eksepsi.

1. Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
  2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Dalam Pokok Perkara atau Pokok Permohonan.
1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Merangin Nomor 1749 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024, pukul 17.20 WIB adalah tetap sah dan mengikat.

(...)

**923. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:50:56]**

Ya.

**924. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: AMIN FAHRUDIN [01:50:57]**

Memerintahkan KPU Kabupaten Merangin untuk melaksanakan tahapan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Merangin terpilih berdasarkan putusan ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum ditandatangani. Terima kasih, Yang Mulia.

**925. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:51:22]**

Terima kasih, Pihak Terkait.

Ini sebelum ke Bawaslu, KPU saya Tanya. Ini 2 pasangan calon ini, ada yang petahana atau punya hubungan terafiliasi dengan petahana?

**926. TERMOHON: ALBER TRISMAN [01:51:37]**

Tidak ada petahana, Yang Mulia, dan juga tidak ada yang (...)

**927. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:51:42]**

Baik, calon bupati maupun wakil bupatinya?

**928. TERMOHON: ALBER TRISMAN [01:51:45]**

Ya, Yang Mulia.

**929. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:51:46]**

Oke, Jadi, ini pertarungan orang baru semua?

**930. TERMOHON: ALBER TRISMAN [01:51:51]**

Sebagian juga ada orang lama, Yang Mulia.

**931. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:51:53]**

Eenggak, maksudnya ini kan hanya dua pasangan calon.

**932. TERMOHON: ALBER TRISMAN [01:51:56]**

Ya.

**933. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:51:56]**

Yang calon bupati nya ada yang ini dengan petahana eenggak yang sekarang? Atau mantan bupati, eenggak juga?

**934. TERMOHON: ALBER TRISMAN [01:52:04]**

Ada, Yang Mulia.

**935. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:52:05]**

Mantan wakil?

**936. TERMOHON: ALBER TRISMAN [01:52:06]**

Mantan wakil bupati, ada juga. Mantan bupati, ada juga.

**937. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:52:09]**

Oh, gitu.

**938. TERMOHON: ALBER TRISMAN [01:52:09]**

Ya.

**939. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:52:10]**

Mantan bupati yang periode sebelumnya atau ... atau sebetulnya habis masa jabatannya, terus di-Pj-kan? Yang mana ini?

**940. TERMOHON: ALBER TRISMAN [01:52:20]**

Itu yang habis jabatan, itu ada di Pemohon, itu wakil bupati nya.

**941. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:52:25]**

Wakil bupati. Sebagai (...)

**942. TERMOHON: ALBER TRISMAN [01:52:26]**

Calon ... calon wakil bupatinya adalah wakil bupati sebelumnya, Yang Mulia.

**943. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:52:29]**

Oh gitu, kalau di Pemohon. Kalau di Pihak Terkait?

**944. TERMOHON: ALBER TRISMAN [01:52:34]**

Terus, sedikit, Yang Mulia, untuk calon bupatinya.

**945. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:52:37]**

He em.

**946. TERMOHON: ALBER TRISMAN [01:52:37]**

Pemohon, ini adalah bupati Tahun 2008-2013.

**947. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:52:41]**

Oh, oke.

**948. TERMOHON: ALBER TRISMAN [01:52:42]**

Kemudian untuk yang terkait.

**949. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:52:43]**

He em.

**950. TERMOHON: ALBER TRISMAN [01:52:44]**

Itu calon wakil bupatinya adalah mantan Wakil Bupati Tahun 2013-2018, Yang Mulia.

**951. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:52:49]**

He em, ya.

**952. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025: AMIN FAHRUDIN [01:52:51]**

Izin, Yang Mulia? Kalau untuk Pihak Terkait tidak pernah menjabat, Yang Mulia.

**953. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:52:58]**

Ya, sudah, saya tanya ini ... nanti ... apa ... kita cek juga. Itu sesuatu yang bisa dicek juga di ... apa ... Google nanti, ya. Oke.

Oke, silakan Bawaslu sekarang untuk menyampaikan ini, pokok-pokok keterangannya. Yang fokusnya terutama Pak Ketua Bawaslu, ini yang terkait dengan kerja pengawasan ya. Itu baik yang atas dasar temuan maupun laporan.

Ya, silakan.

**954. BAWASLU: HIMUN ZUHRI [01:53:32]**

Baik.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang semuanya.

Mohon izin, Yang Mulia, saya memperkenalkan diri, nama Himun Zuhri, Ketua Bawaslu Kabupaten Merangin bertindak atas nama lembaga dan didampingi sebelah kiri saya, Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Bapak Wein Arifin yang akan membacakan resume keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin pada Perkara 180 dan seterusnya dianggap dibacakan. yang dimohonkan oleh Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1.

**955. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:54:06]**

Ya.

**956. BAWASLU: HIMUN ZUHRI [01:54:07]**

Sebelumnya, mohon izin, Yang Mulia.

Pada setiap dalil Pemohon, Bawaslu menyampaikan keterangan tertulis serta melampirkan vide Bukti sebanyak 114 alat bukti. dari Vide Bukti PK.10.2/1 sampai Vide Bukti PK.10.2-114 yang dibacakan ... tidak saya bacakan dan mohon dianggap dibacakan.

**957. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:54:30]**

Ya, nanti kalau soal buktikan, Pak, Yang Mulia Ketua Panel nanti akan ... apa ... menyampaikan ya, soal status bukti-bukti itu.  
Ya, silakan dibacakan keterangannya.

**958. BAWASLU: HIMUN ZUHRI [01:54:41]**

Baik, Yang Mulia. Sebelum saya masuk ke Pokok-pokok Permohonan Pemohon, saya ingin menyampaikan bahwa selama Pilkada 2024 di Kabupaten Merangin, Bawaslu telah menerima 13 laporan, 9 diregister, 2 diantaranya termasuk ke dalam dalil Pemohon.

**959. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:54:59]**

Ya.

**960. BAWASLU: HIMUN ZUHRI [01:55:00]**

Selanjutnya, Bawaslu juga telah menemukan 7 temuan dan 6 temuan dimasukkan ke dalam dalil Pemohon.

**961. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:55:09]**

Oke.

**962. BAWASLU: HIMUN ZUHRI [01:55:10]**

Selanjutnya, panwaslu kecamatan telah menemukan sebanyak 11 temuan pelanggaran dan juga 9 diantaranya termasuk ke dalam dalil Pemohon.

**963. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:55:22]**

Pemohon, oke.

**964. BAWASLU: HIMUN ZUHRI [01:55:23]**

Baik, Yang Mulia, saya lanjutkan kepada Pokok-Pokok Permohonan Pemohon.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan berupa terdapat perselisihan perolehan suara menurut Pemohon pada Angka 1, 2 halaman 6 dan angka 3 halaman 7. Terhadap dalil Pemohon, Bawaslu menerangkan secara tertulis pada halaman 2 dan 3 dalam keterangan Bawaslu.

Pada pokoknya, bahwa Bawaslu ... bahwa hasil perolehan suara berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Merangin dan berdasarkan D.Hasil Kabupaten yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Merangin sebagai berikut pada tabel, yang dianggap dibacakan, yang mana Pasangan 01 meraih ... meroleh ... memperoleh suara 96.605 dan Pasangan 02=100.413.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan berupa adanya pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif, baik yang dilakukan oleh Termohon maupun yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 2. Pada angka 4 halaman 7 diterangkan Bawaslu secara tertulis pada halaman 3. Selanjutnya pelanggaran telah dipersiapkan secara terencana pada (...)

**965. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:56:43]**

Ya.

**966. BAWASLU: HIMUN ZUHRI [01:56:43]**

Angka 5 halaman 7 juga telah diterangkan secara tertulis pada halaman 4.

Selanjutnya ada penghalangan penggunaan hak pilih oleh Termohon secara terstruktur, sistematis dan masif, yang dituangkan pada angka 6 halaman 7 dan angka 7 halaman 8.

**967. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:57:01]**

Ya.

**968. BAWASLU: HIMUN ZUHRI [01:57:01]**

Telah diterangkan secara tertulis oleh Bawaslu pada halaman 4 dan 5, yang pada pokoknya Bawaslu menerangkan sebagai berikut.

Bahwa sebagaimana Pasal 135A ayat 2 Undang-Undang 10 Tahun 2016 Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi TSM. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan a quo tidak terdapat temuan dan/atau laporan pelanggaran administrasi secara TSM, baik yang dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Merangin maupun kepada Bawaslu Provinsi Jambi, terlebih terkait dengan pelanggaran politik uang atau memberikan materi lainnya. Selanjutnya bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat pelanggaran sebelum dan sesaat pencoblosan yakni dengan sengaja tidak menyampaikan undangan untuk memilih pada para pemilih dan pendukung Pemohon 01. Tidak terdapat undangan di Desa Tuo, Kecamatan Lembah Masurai angka 8 huruf A

halaman 8 dan angka 17 halaman 20. Bahwa Bawaslu telah menerangkan pada halaman 6, dengan pokoknya sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan temuan.

**969. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:58:25]**

Oke.

**970. BAWASLU: HIMUN ZUHRI [01:58:25]**

Pelanggaran, namun kami mendapatkan informasi awal dan mengintruksikan kepada Panwaslu Kecamatan Lembah Masurai untuk melakukan penelusuran dengan hasil, sebagaimana tabel yang kami tayangkan, mohon dianggap dibacakan.

**971. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:58:39]**

Ya.

**972. BAWASLU: HIMUN ZUHRI [01:58:40]**

Dengan alasan bahwa C.Pemberitahuan tidak ter ... tidak terdistribusi adalah karena pemilih tidak berada di tempat atau tidak ditemukan dan kemudian tidak terdapat keluarga atau orang yang dapat dipercaya untuk dititipkan.

**973. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:58:55]**

Ya.

**974. BAWASLU: HIMUN ZUHRI [01:58:55]**

Terhadap Desa Nilo Dingin karena pemilih TMS, kategori meninggal dunia. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran panwaslu kecamatan tidak ditemukan dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan berupa manipulasi daftar hadir oleh petugas KPPS di Desa Muara Manderas dan Desa Pulau Tengah seperti angka 8 huruf B dan halaman 8, telah juga diterangkan oleh Bawaslu pada halaman 7 dan 8, dalam keterangan tertulis. Bahwa berkenaan dengan dalil ini, Pemohon tidak menyampaikan pelanggaran tersebut terjadi di TPS berapa, di Desa Muara Manderas dan Pulau Tengah dan tidak terdapat laporan dan temuan terhadap dalil a quo.

Selanjutnya bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan berupa setiap TPS, daftar hadir ditandatangani ... ditandatangani oleh cuma 1 orang petugas KPPS dan daftar hadir ini ditandatangani oleh KPPS di TPS 6 Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, seperti pa ... yang tertuang pada angka 8 huruf C halaman 8, angka 11 huruf B dan C halaman 10, dan angka 17, halaman 20. Terhadap dalil Pemohon tersebut telah disampaikan keterangan tertulis Bawaslu pada halaman 8 dan 9. Bahwa pada pokoknya bahwa di Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko terdapat 21 TPS. Namun, hanya terdapat satu TPS yang ditemukan oleh Panwaslu Kecamatan Bangko. Bahwa daftar hadir ditandatangani oleh satu orang petugas.

Bahwa terhadap dalil a quo, Panwaslu Kecamatan Bangko telah menetapkan Temuan Dugaan Pelanggaran Nomor 2 sekian dan dianggap dibacakan. Dan ditemukan fakta bahwa benar C.Daftar Hadir KWK tidak dita ... tidak ditandatangani oleh pemilih. Namun, ditandatangani oleh KPPS di TPS 06.

**975. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:00:52]**

Oke.

**976. BAWASLU: HIMUN ZUHRI [02:00:53]**

Karena pada saat pembukaan tempat pemungutan suara KPPS tidak menemukan C.Daftar Hadir. Namun, ditemukan oleh KPPS saat akan memulai penghitungan suara dan sebelumnya hanya menanda ... menandai nama pemilih yang hadir dengan melakukan check list di daftar pemilih tetap.

**977. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:01:12]**

Oke.

**978. BAWASLU: HIMUN ZUHRI [02:01:13]**

Bahwa untuk memastikan jumlah pemilih yang hadir pada saat Pleno rekapitulasi tingkat kecamatan, PPS menunjukkan C.Pemberitahuan KWK yang diserahkan oleh pemilih dan dilakukan pencocokan dengan jumlah pemilih yang hadir dengan perolehan suara penggunaan hak pilih berjumlah sama. Bahwa dari hasil kajian Bawaslu ... Panwaslu Kecamatan Bangko menemukan adanya unsur kesalahan tata cara dan prosedur dan telah dilakukan rekomendasi kepada PPK dan PPK telah menindak lanjutnya.

Selanjutnya, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalihkan berupa KPPS tidak memfasilitasi orang yang sedang sakit. Bahwa berdasarkan dalil a quo, Panwaslu Kecamatan Bangko tidak menerima laporan dan temuan. Namun, izin, Yang Mulia, mohon maaf. Bahwa terhadap dalil tersebut, Panwaslu Kecamatan Bangko telah menetapkan temuan dugaan Pelanggaran Nomor 03 dan seterusnya dianggap dibacakan dengan menemukan fakta bahwa Di TPS 06 Desa Kungkai, di TPS 02 Desa Kungkai bahwa dalam ... bahwa benar atas nama Tuti yang beralamat di RT 5 dalam keadaan sakit dengan kondisi tidak bisa berjalan dan melihat. Bahwa Tuti menerima C.Pemberitahuan satu hari sebelum hari pemungutan suara hingga pada tanggal 27 pukul 13.00 tidak ada satu pun anggota KPPS yang mendatangi Tuti untuk melayani penggunaan hak pilihnya. Bahwa KPPS mengakui tidak mendatangi Tuti. Terhadap hasil kajian Panwaslu Kecamatan Bangko menemukan adanya kesalahan tata cara dan prosedur dan telah direkomendasikan kepada PPK Bangko terhadap rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti.

**979. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:03:01]**

Oke, Pak Ketua, ini kan Anda kayak ... apa ... Pihak Terkait juga, satu-satu Anda tanggapi. Bagus juga ini, jadi kami membacanya lebih mudah terhadap permasalahan, ya.

Nah, saya ingin tanya saja ini, dari semua tadi laporan yang disampaikan kepada Bawaslu. Yang dari Pemohon ada berapa?

**980. BAWASLU: HIMUN ZUHRI [02:03:29]**

Yang dari Pemohon atau dari Pasangan 01 ada 9 laporan, Yang Mulia.

**981. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:03:33]**

Ada 9 laporan?

**982. BAWASLU: HIMUN ZUHRI [02:03:34]**

Ya.

**983. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:03:35]**

Dari 9 laporan itu, bagaimana respons Bawaslu, tindak lanjutnya?

**984. BAWASLU: HIMUN ZUHRI [02:03:40]**

Terhadap seluruh 13 laporan.

**985. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:03:44]**

He em.

**986. BAWASLU: HIMUN ZUHRI [02:03:45]**

7 temuan dan 11 temuan di kecamatan seluruhnya sudah diproses, sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu.

**987. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:03:50]**

Artinya itu memenuhi syarat formil?

**988. BAWASLU: HIMUN ZUHRI [02:03:53]**

Yang terpenuhi syarat formil ada di laporan ada 9 yang teregister.

**989. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:03:58]**

Ya. Enggak itu semua itu dari pemo ... pasangan calon atau dari Pemohon?

**990. BAWASLU: HIMUN ZUHRI [02:04:03]**

Dari Pemohon (...)

**991. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:04:05]**

Ada enggak Pihak Terkait mengajukan laporan juga? Tadi kan disebut-sebut (...)

**992. BAWASLU: HIMUN ZUHRI [02:04:07]**

Pihak Terkait ada 4.

**993. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:04:08]**

Ada 4?

**994. BAWASLU: HIMUN ZUHRI [02:04:09]**

4 laporan.

**995. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:04:10]**

Jadi, 9 itu yang dari Pemohon 4 dari Pihak Terkait atau 9 itu dari Pemohon dan Pihak Terkait?

**996. BAWASLU: HIMUN ZUHRI [02:04:20]**

9 dari Pemohon.

**997. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:04:21]**

Oke.

**998. BAWASLU: HIMUN ZUHRI [02:04:22]**

4 dari Pihak Terkait.

**999. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:04:23]**

Oke.

**1000. BAWASLU: HIMUN ZUHRI [02:04:24]**

Totalnya ada 13 laporan.

**1001. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:04:24]**

Itu yang diregistrasi?

**1002. BAWASLU: HIMUN ZUHRI [02:04:26]**

Yang diregistrasi 9 laporan, Yang Mulia.

**1003. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:04:30]**

Lah, 9 laporan itu dari siapa saja?

**1004. BAWASLU: HIMUN ZUHRI [02:04:34]**

Dari ... yang tidak diregistrasi kan ada 4, Yang Mulia. Saya bi (...)

**1005. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:04:39]**

Ya.

**1006.BAWASLU: HIMUN ZUHRI [02:04:41]**

Ini terhadap laporan yang disampaikan oleh Termohon.

**1007.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:04:44]**

He eh.

**1008.BAWASLU: HIMUN ZUHRI [02:04:45]**

Yang pertama tidak (...)

**1009.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:04:47]**

Oleh Pemohon apa oleh Termohon? Termohon katanya enggak lapor.

**1010.BAWASLU: HIMUN ZUHRI [02:04:49]**

Oleh Pemohon, oleh Pemohon. Izin, Yang Mulia.

**1011.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:04:50]**

Oleh Pemohon? Ya.

**1012.BAWASLU: HIMUN ZUHRI [02:04:50]**

Jadi dari Pemohon, yang pertama laporannya daluarsa.

**1013.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:04:54]**

Oke.

**1014.BAWASLU: HIMUN ZUHRI [02:04:58]**

Yang kedua, 2 laporan itu sudah ditangani.

**1015.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:05:00]**

Oke.

**1016.BAWASLU 180: HIMUN ZUHRI [02:05:01]**

Laporan yang sudah ditangani melalui temuan dilaporkan lagi, tidak dapat kami tangani.

**1017.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:05:05]**

Ya, ya.

**1018.BAWASLU: HIMUN ZUHRI [02:05:07]**

Dan yang keempat, tidak melengkapi syarat materiil.

**1019.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:05:10]**

Oke. Kalau yang dari Pihak Terkait?

**1020.BAWASLU: HIMUN ZUHRI [02:05:13]**

Dari Pihak Terkait, ada 4 laporan, Yang Mulia.

**1021.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:05:19]**

Oke. Ada 4 laporan? Apa statusnya dari 4 laporan itu?

**1022.BAWASLU: HIMUN ZUHRI [02:05:23]**

Salah satunya yang disampaikan oleh Pak Terkait, tadi adanya rekomendasi terhadap pelanggaran administrasi (...)

**1023.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:05:29]**

Ya.

**1024.BAWASLU: HIMUN ZUHRI [02:05:31]**

Yang disampaikan ke KPU Kabupaten Merangin.

**1025.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:05:32]**

Itu yang ditindaklanjuti, kan?

**1026.BAWASLU: HIMUN ZUHRI [02:05:33]**

Seluruhnya ditindaklanjuti.

**1027.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:05:35]**

Oh. Yang lain-lain, yang tiga lagi apa?

**1028.BAWASLU: HIMUN ZUHRI [02:05:38]**

Yang tiga lagi terhadap ... Izin, Yang Mulia. Yang tiga lagi, ada laporan terhadap kampanye berupa kampanye black campaign.

**1029.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:06:06]**

He eh.

**1030.BAWASLU: HIMUN ZUHRI [02:06:08]**

Yang tidak terpenuhi unsur, ada dugaan tindak pidana.

**1031.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:06:13]**

Oke.

**1032.BAWASLU: HIMUN ZUHRI [02:06:15]**

Dan yang satu lagi, satu ... selanjutnya ada kampanye terselubung (...)

**1033.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:06:16]**

Oke.

**1034.BAWASLU: HIMUN ZUHRI [02:06:18]**

Yang sudah kedaluwarsa. Dan satu lagi ada netralitas ASN, Pihak Terkait melaporkan adanya ASN yang sudah pensiun. Dan yang satu lagi yang saya sebutkan tadi, arak-arakan kampanye.

**1035.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:06:36]**

Oke.

**1036.BAWASLU: HIMUN ZUHRI [02:06:38]**

Ada 4 itu, Yang Mulia.

**1037.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:06:38]**

Terima kasih, Pak Ketua. Ini saya ... apa ... kami baca juga ya, sudah satu per satu Bapak respons, jadi saya kira enggak usah disampaikan.

Ada hal lain enggak yang ingin ditekankan untuk disampaikan? Silakan. Di luar yang apa ... yang ingin di-highlight, bukan di luar yang diinikan. Yang kami, MK, harus memberikan atensi.

**1038.BAWASLU: HIMUN ZUHRI [02:07:07]**

Ya.

**1039.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:07:09]**

Kalau enggak ada ya, enggak apa-apa, gitu lho.

**1040.BAWASLU: HIMUN ZUHRI [02:07:11]**

Ada, Yang Mulia. Ini terkait dengan laporan, kebetulan dari netralitas yang terkait dengan papan bunga tadi.

**1041.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:07:18]**

Oke.

**1042.BAWASLU: HIMUN ZUHRI [02:07:20]**

Karena itu disebut oleh Termohon, Pihak Terkait, dan juga kami merespons dari Bawaslu.

**1043.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:07:23]**

Oke.

**1044.BAWASLU: HIMUN ZUHRI [02:07:27]**

Terhadap laporan netralitas ASN yang berkaitan dengan papan bunga, ini tidak terpenuhi unsur dugaan (...)

**1045.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:07:33]**

Papan bunga apa sih, Pak?

**1046.BAWASLU: HIMUN ZUHRI [02:07:36]**

Yang ucapan selamat terhadap yang terpilih.

**1047.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:07:39]**

Oke.

**1048.BAWASLU: HIMUN ZUHRI [02:07:41]**

Pemohon menyampaikan laporan kepada Bawaslu (...)

**1049.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:07:44]**

Oh.

**1050.BAWASLU: HIMUN ZUHRI [02:07:45]**

Dan Bawaslu tidak dapat merekomendasikan kepada BKN.

**1051.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:07:46]**

Ini setelah penetapan, ya?

**1052.BAWASLU: HIMUN ZUHRI [02:07:49]**

Setelah penetapan, Yang Mulia.

**1053.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:07:51]**

Oke.

**1054.BAWASLU: HIMUN ZUHRI [02:07:52]**

Jadi, hasil klarifikasi bahwa yang bersangkutan, nama-nama yang mengucapkan tidak memesan papan bunga tersebut.

**1055.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:07:58]**

Oh, begitu, ya.

**1056.BAWASLU: HIMUN ZUHRI [02:08:00]**

Dan ada pihak lain yang kebetulan mengambil kesempatan ini untuk memesan papan bunga.

**1057.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:08:03]**

Oke.

**1058.BAWASLU: HIMUN ZUHRI [02:08:04]**

Dan itu sudah diakuinya.

**1059.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:08:05]**

Itu saja, Pak Ketua? Yang lain lagi atau cukup?  
Sudah habis juga waktunya 15 menit. Cukup, ya?

**1060.BAWASLU: HIMUN ZUHRI [02:08:18]**

Baik, Yang Mulia.

**1061.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:08:20]**

Ya.

**1062.BAWASLU: HIMUN ZUHRI [02:08:21]**

Demikian, resume keterangan tertulis Bawaslu yang kami sampaikan dan ditandatangani oleh 5 pimpinan Bawaslu Kabupaten Merangin.

**1063.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:08:31]**

Baik.

**1064.BAWASLU: HIMUN ZUHRI [02:08:31]**

Hormat kami, Yang Mulia, Bawaslu Kabupaten Merangin. Demikian Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum wr. wb.

**1065.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:08:38]**

Walaikumsalam wr. wb.

Sekali lagi, terima kasih Bawaslu Kabupaten Merangin, lengkap keterangannya, ditandatangani 5 anggota Bawaslu. Tidak ada yang

dissenting opinion. Sebab, kemarin ada yang Bawaslu nya dissenting opinion, gitu lho, ya. Antara ketua dengan anggotanya berbeda, gitu. Terima kasih sekali lagi.

Dan kami serahkan kembali kepada Yang Mulia Pak Ketua Panel.

**1066.KETUA: SALDI ISRA [02:09:06]**

Terima kasih, Yang Mulia, Bapak Arsul Sani.

Berarti ini sudah selesai, ya, untuk Kabupaten Merangin.

Silakan, ganti sopir sekarang.

Kita masuk Kota Ambon, Ambon Manise. Pihak Terkait Kota Ambon, ada? Ya. Bawaslu Kota Ambon? Untuk memeriksa ini akan dipimpin oleh Yang Mulia, Hakim Konstitusi Bapak Ridwan Mansyur, dipersilakan, Yang Mulia.

**1067.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:09:46]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.

Kita lanjutkan, ya. Ini kayaknya siang ini ... sore ini, memang jam berat ini. Saya lihat Bapak dan Ibu Lawyer ini, duduknya sudah miring-miring, ininya ... putihnya ini sudah miring ke kiri dan ke kanan. Kita lanjutkan, ya.

Ini bagus juga, ini sebelah sini saya lihat memang cukup memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi, ini, 30% keterwakilan kuota perempuan sebelah sini. Kalau di sini tidak memenuhi kuota, cuma 1 orang. Di sana tega sekali, laki-laki semua menghabiskan ... apa ... fee-nya lawyer itu.

Baik, ya, dari ... apa ... KPU Kota Ambon. Ya, silakan perkenalkan.

**1068.KUASA HUKUM TERMOHON: DALILI [02:10:36]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

**1069.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:10:37]**

Ya.

**1070.KUASA HUKUM TERMOHON: DALILI [02:10:38]**

Assalamualaikum wr. wb.

**1071.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:10:40]**

Walaikumsalam wr. wb.

**1072.KUASA HUKUM TERMOHON: DALILI [02:10:41]**

Untuk Perkara 246, dalam pemilihan Wali Kota Ambon Tahun 2024. Izin, Yang Mulia, yang hadir dalam persidangan ini, saya sendiri adalah Dalili, S.H., M.H., dan Pihak Prinsipal, yaitu Ibu Vica Jillyan selaku kordir ... Kadiv Hukum KPU Ambon.

Lanjut pada (...)

**1073.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:11:01]**

Ya.

**1074.KUASA HUKUM TERMOHON: DALILI [02:11:02]**

Kewenangan ... dalam Eksepsi, Yang Mulia, terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap telah dibacakan.

**1075.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:11:06]**

Dibacakan.

**1076.KUASA HUKUM TERMOHON: DALILI [02:11:06]**

Yang kedua, mengenai tenggang waktu, ini yang kami perlu tegaskan bahwa (...)

**1077.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:11:11]**

Ya, silakan.

**1078.KUASA HUKUM TERMOHON: DALILI [02:11:11]**

Tenggang waktu yang diajukan oleh pe ... Permohonan Pemohon yang diajukan itu telah melebihi tenggang waktu yang telah ditentukan. Sebab, KPU Ambon atau se ... selaku Pihak Termohon mengumumkan hasil itu pada tanggal 6 Desember Tahun 2024, pukul 17.34 se ... WIT. Sedangkan, Pemohon mengajukan Permohonan di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 11 Desember pukul 00.20 WIB.

Olehnya itu, kami menganggap bahwa tenggang waktu telah melebihi waktu yang telah ditentukan oleh peraturan. Yang berikut, Yang Mulia, berkaitan (...)

**1079.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:11:48]**

Ya.

**1080.KUASA HUKUM TERMOHON: DALILI [02:11:48]**

Dengan kedudukan Pemohon (...)

**1081.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:11:49]**

Ini 157, ini ada pembatalan, ya?

**1082.KUASA HUKUM TERMOHON: DALILI [02:11:52]**

Ya betul, Yang Mulia.

**1083.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:11:53]**

Pada hari Rabu. Ya, lanjut.

**1084.KUASA HUKUM TERMOHON: DALILI [02:11:55]**

Yang berikut berkaitan dengan kedudukan Pemohon, kami menganggap bahwa Pemohon tidak memiliki Legal Standing sebab selisih antara suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak itu kurang ... eh selisihnya adalah 59.365 atau 36 ... 36,7%, sehingga Termohon menganggap bahwa Pemohon ini tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi sesuai dengan peraturan yang ditentukan. Yang beri (...)

**1085.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:12:25]**

Ini ada 4 calon wali kota, ya?

**1086.KUASA HUKUM TERMOHON: DALILI [02:12:27]**

Betul, Yang Mulia.

**1087.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:12:28]**

Ya, lanjut.

**1088.KUASA HUKUM TERMOHON: DALILI [02:12:29]**

Yang berikut berkaitan dengan Permohonan Pemohon, kami anggap obscur libel atau kabur sebab yang didalikan oleh Pemohon

antara Posita dengan Petitem itu tidak memiliki kesesuaian. Yang di mana dalam Permohonan Pemohon, dalam Positanya tidak menguraikan secara konkret, jelas mereka ini pada Petitemnya meminta PSU di seluruh kabupaten ... eh ... di seluruh kecamatan di Kota Ambon, namun pada Positanya tidak menguraikan secara konkret dan secara detail pelanggaran di TPS mana, di desa mana, itu yang tidak didalilkan oleh Pemohon.

Yang kemudian yang kedua, dalam kenapa Termohon menganggap kabur? Karena dalam Pokok Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan selisih perolehan suara antara pihak selisih suara terbanyak dengan Pemohon.

Kemudian, Yang Mulia, lanjut pada dalam Pokok Permohonan.

**1089.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:13:22]**

Pokok Permohonan, pelan-pelan saja.

**1090.KUASA HUKUM TERMOHON: DALILI [02:13:23]**

Ya, langsung kepada (...)

**1091.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:13:24]**

Jangan ngebut sekali.

**1092.KUASA HUKUM TERMOHON 246: DALILI [02:13:24]**

Langsung kepada (...)

**1093.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:13:26]**

Ya, pelan-pelan.

**1094.KUASA HUKUM TERMOHON 246: DALILI [02:13:26]**

Halaman 22 (...)

**1095.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:13:27]**

Ya. Oke, halaman 18 sampai 22 (...)

**1096.KUASA HUKUM TERMOHON 246: DALILI [02:13:29]**

Terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan keberpihakan penyelenggara pemilihan pada semua tingkatan secara berjenjang dari PPK sampai PPS dan KPPS dalam setiap TPS di seluruh untuk Kota Ambon untuk memenangkan pasangan calon tertentu.

Perlu kami tegaskan selaku Pihak Termohon menganggap bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon ini merupakan adanya ... adanya tuduhan yang tidak benar. Sebab pada prinsipnya, Termohon dalam melaksanakan tugas-tugasnya telah telah ber ... melaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada, telah melaksanakan sesuai apa yang diamarkan dalam PKPU Nomor 17 Tahun 2004 dan PKPU Nomor 18 Tahun 2024 dan PKPU Nomor 1779. Untuk kronologis berkaitan per TPS, Yang Mulia. Karena ini agak panjang, mohon dianggap telah dibacakan.

**1097.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:14:16]**

Ya, lanjut.

**1098.KUASA HUKUM TERMOHON: DALILI [02:14:19]**

Lanjut pada halaman 26 berkaitan dengan adanya upaya penambahan suara bagi pasangan calon lain di TPS 42 Desa Batu Merah, Kecamatan Seribu, Kota Ambon. Perlu kami tanggapi atas hal ini, Yang Mulia. Bahwa tuduhan Pemohon atas dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon merupakan tuduhan yang tidak benar. Sebab Termohon telah melaksanakan pembinaan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. Sebab faktanya Termohon tidak menerima rekomendasi PSU dari Bawaslu Kota Ambon berkaitan dengan duga adanya pelanggaran sebagaimana yang dilakukan oleh Pemohon dalam permohonan a quo, untuk kronologis rekapitulasi per kecamatan dianggap telah dibacakan karena lumayan banyak, Yang Mulia.

**1099.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:15:02]**

Ya.

**1100.KUASA HUKUM TERMOHON: DALILI [02:12:00]**

Selanjutnya kami masuk pada Petitum.

**1101.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:15:07]**

Petitum, ya.

**1102.KUASA HUKUM TERMOHON: DALILI [02:15:06]**

Izin, yang melanjutkan adalah Prinsipal langsung.

**1103.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:15:08]**

Nah, ini perempuan, silakan.

**1104.TERMOHON: VICA JILLYAN EDSTI SAIJA [02:15:10]**

Izin membacakan, Yang Mulia.

Petitem.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 431 Tahun 2024, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, pukul 17.34 WIT.

3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon Tahun 2024, yang benar sebagaimana yang ada pada tabel. Dianggap telah dibacakan.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). Demikian, Yang Mulia.

**1105.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:16:10]**

Ya. Terima kasih.

Ya, Pihak Terkait. Silakan.

**1106.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MALIK RAUDHI TUASAMU [02:16:18]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**1107.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:16:23]**

Walaikumsalam wr.wb.

**1108.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR  
246/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MALIK RAUDHI TUASAMU  
[02:16:24]**

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, hadirin yang kami hormati, perkenalkanlah kami dari Kuasa Hukum yang hadir saat ini saya, Malik Raudhi Tuasamu dan rekan saya, Dudi Usman Sahupala, ingin menyampaikan keterangan Pihak Terkait, Bodewin Melkias Wattimena-Elly Toisuta, dalam Perkara Nomor 246 dan seterusnya dianggap dibacakan, Yang ... Yang Mulia. Atas Pemohon Mohamad Tadi Salampessy dan Emmylh Dominggus Luhukay dengan Nomor Urut 3.

Izin, Yang Mulia. Kami baca pokok-pokoknya saja.

Yang pertama. Dalam Eksepsi.

Tenggang waktu pengajuan permohonan. Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi telah melewati Tenggang Waktu yang telah ditentukan, yakni diajukan pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, jam 00.20 WIB.

**1109.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:17:38]**

Ya.

**1110.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR  
246/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MALIK RAUDHI TUASAMU  
[02:17:38]**

Yang kedua.

B. Kedudukan Hukum Pemohon.

Bahwa berdas ... poin pertama dianggap dibacakan, Yang Mulia, dan tabel juga dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka presentase selisih pemilihan suara maksimal sebesar 1,5% karena melebihi dari 250.000 jumlah jiwa atau penduduk.

**1111.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:18:07]**

Ya.

**1112.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR  
246/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MALIK RAUDHI TUASAMU  
[02:18:07]**

Jadi ... bahwa berdasarkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 40 ... Nomor 431 Tahun 2024 dan seterusnya mohon dianggap dibacakan, yakni perolehan suara Pihak Terkait sebesar 67.131 suara, sedangkan Pemohon meraih suara sebesar 7.766 suara.

**1113.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:18:34]**

Ya.

**1114.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR  
246/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MALIK RAUDHI TUASAMU  
[02:18:34]**

Bahwa selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atau Pihak Terkait sebesar 59.365 suara sesuai hasil perhitungan kami selisihnya kurang lebih 88,5%. Nah, jadi ... bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan.

Yang C.

**1115.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:19:01]**

Ya. Terus?

**1116.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR  
246/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MALIK RAUDHI TUASAMU  
[02:19:01]**

Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel.

Yang pertama bahwa Posita angka 2 dan Petitum angka 2 tidak berkesesuaian atau saling bertentangan, selanjutnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**1117.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:19:16]**

Pokok Permohonan.

**1118.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR  
246/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MALIK RAUDHI TUASAMU  
[02:19:17]**

Ya.

Yang kedua bahwa Pemohon dalam Positanya tidak menjelaskan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana ketentuan

Pasal ay ... Pasal 8 ayat (3) huruf b, dan angka 4, ya, anggap dibacakan juga, Yang Mulia. Telah dibacakan.

Poin 3 bahwa Pemohon juga di dalam Petitumnya tidak meminta kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, sama sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5, bunyinya mohon dianggap telah dibacakan.

Yang keempat bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

Yang kedua. Dalam Pokok Permohonan. Poin pertama dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**1119.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:20:01]**

Ya.

**1120.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MALIK RAUDHI TUASAMU [02:20:02]**

Poin kedua.

A. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan huruf a karena dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar. Perlu Pihak Terkait tegaskan bahwa perolehan suara yang diperoleh oleh Pihak Terkait adalah murni dari pilihan masyarakat Kota Ambon sesuai dengan hati nurani dan bukan diperoleh melalui cara-cara yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

B. Bahwa Pihak Terkait menolak Permohonan Permohonan pada huruf b, ya. Langsung saja ... seterusnya dianggap dibacakan

**1121.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:20:32]**

Ya.

**1122.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MALIK RAUDHI TUASAMU [02:20:32]**

Dan lanjut pada paragraf berikutnya di bawahnya.

Bahwa faktanya Pemohon meraih suara terbanyak dari pasangan calon lain di TPS 42 Desa Batu Merah (Bukti PT-5). Saksi Pemohon juga tidak membuat keberatan dalam Formulir Kejadian Khusus dan bahkan saksi dari Pemohon menandatangani Model C.Hasil-KWK-Wali Kota dan Model D.Hasil-Kecamatan-KWK-Wali Kota.

C. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan pada huruf c karena dalil tersebut adalah dalil yang tak berdasar dan seterusnya dianggap dibacakan.

Lanjut pada paragraf selanjutnya di bawah.

Faktanya Saksi Pemohon menandatangani semua Berita Acara perhitungan dan/atau rekapitulasi pada semua tingkatan, mulai dari tingkat TPS (vide Bukti PT-5), menandatangani rekapitulasi di tingkat kecamatan atau PPK (Bukti PT.6), dan pada rekapitulasi KPU kota Ambon, Pemohon tidak menandatangani Berita Acara rekapitulasi hasil dikarenakan tidak hadir saat pelaksanaan pleno rekapitulasi pada KPU Kota Ambon (vide Bukti PT.4) sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemohon menerima hasil rekapitulasi pada semua tingkatan.

Yang ketiga Petitem, selanjutnya saya serahkan kepada (...)

**1123.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:21:49]**

Ya.

**1124.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR  
246/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MALIK RAUDHI TUASAMU  
[02:21:49]**

Rekan saya untuk membacakan Petitem, terima kasih.

**1125.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:21:51]**

Ya, silakan.

**1126.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR  
246/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DUDI USMAN SAHUPALA  
[02:21:52]**

Mohon izin melanjutkan, Yang Mulia.

**1127.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:21:54]**

Ya.

**1128.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR  
246/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DUDI USMAN SAHUPALA  
[02:21:54]**

Petitem.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon Kepala Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 431 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon Tahun 2024 bertanggal 6 Desember 2024, pukul 17.34 WIT.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya, ex aequo et bono. Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia. Kami kembalikan.

**HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:22:49]**

Ya. Terima kasih, Pihak Terkait.  
Bawaslu Kota Ambon, ya silakan.

**1129.BAWASLU: ALBERTH JOHAN TALABESSY [02:22:55]**

Baik, Terima kasih, Yang Mulia.

**HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:22:58]**

Ya.

**1130.BAWASLU: ALBERTH JOHAN TALABESSY [02:22:58]**

Untuk waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum Wr. Wb.  
Yang Mulia Hakim Konstitusi, izinkanlah kami sebagai Bawaslu kota Ambon untuk memberikan keterangan dalam Perkara 246 sebagai berikut.  
Langsung kepada Pokok Permohonan.

**1131.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:23:10]**

Ya.

**1132.BAWASLU: ALBERTH JOHAN TALABESSY [02:22:11]**

Berkaitan dengan dalil hasil perhitungan suara pada angka 1 sebagaimana termuat dalam keterangan Bawaslu Kota Ambon, halaman 2 sampai dengan halaman 3.

A. Tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan. Pada prinsipnya tidak terdapat laporan dan atau temuan pelanggaran pemilihan dalam Permohonan sengketa pemilihan

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu kota Ambon sebagaimana temuan dalam Formulir Model A.Laporan Hasil Pengawasan Nomor 031 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya dapat disampaikan bahwa terhadap proses rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat KPU Kota Ambon tidak ada perdebatan atau keberatan mengenai jumlah suara sah dan tidak sah dari setiap pasangan calon wali kota dan wakil wali kota oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan 4 yang hadir.

Sedangkan saksi Pasangan Calon untuk Nomor Urut 1 dan 3, tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi dan berkaitan dengan Formulir Model D.Hasil Kabko.KWK-Bupati/Wali Kota yaitu hanya ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (vide Bukti PK.32.10-1 sampai dengan Pk.32.10-4).

Bahwa berkaitan dengan permohonan, pokoknya mendalilkan keberpihakan penyelenggara pemilihan pada angka 2 Huruf A sebagaimana termuat dalam keterangan Bawaslu Kota Ambon. Halaman 3 dengan Halaman 4.

### **1133.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:24:40]**

Ya, lanjut.

### **1134.BAWASLU: ALBERTH JOHAN TALABESSY [02:24:41]**

A. Tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan. Pada prinsipnya tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Ambon sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 023 tertanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya dapat disampaikan bahwa pada saat proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS di wilayah Kota Ambon tidak ditemukan informasi awal dugaan pelanggaran keberpihakan penyelenggara pemilihan kepada salah satu pasangan calon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon (vide Bukti PK.32.10-5 sampai dengan PK.32.10-6).

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya upaya penambahan suara oleh KPPS pada Angka 2 Huruf B, sebagaimana termuat dalam keterangan Bawaslu Kota Ambon. Halaman 4 sampai dengan Halaman 8.

A. Tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa terdapat permasalahan yang terjadi pada TPS 42 Desa Batu Merah, berupa salah satu anggota KPPS yang mencoblos surat suara sisa pada waktu istirahat adalah surat suara untuk jenis pemilihan gubernur dan wakil gubernur, dan bukan jenis suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan pengawas TPS 42 Desa Batu Merah Nomor 021 tertanggal 27 November 2024.

Untuk poin 2 dan 3 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**1135.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:26:18]**

Ya.

**1136.BAWASLU: ALBERTH JOHAN TALABESSY [02:26:19]**

Selanjutnya untuk B. Keterangan Bawaslu Kota Ambon berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan. Bahwa Bawaslu Kota Ambon menemukan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Model A-2 temuan Nomor 003 tertanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya terlapor atas nama M. Adam Rival Saihitua selaku anggota KPPS di TPS 42 Desa Batu Merah.

1. Bawaslu Kota Ambon melakukan klarifikasi terhadap terlapor dan saksi yang berjumlah 10 orang, kemudian Bawaslu Kota Ambon juga meminta penjelasan dari KPU RI terkait dengan temuan tersebut. Yang pada pokoknya Bawaslu Kota Ambon mendapatkan keterangan selama proses klarifikasi bahwa proses pencoblosan yang dilakukan oleh terlapor pada pukul 13.48 WIT setelah pemungutan suara, yakni pada saat istirahat makan siang. Kemudian terlapor mengambil 1 ikatan surat suara yang berjumlah 26 surat suara dan mencoblos 15 surat suara untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, akan tetapi terlapor belum memasukkan suara-suara yang dicoblos tersebut ke dalam kotak suara.

2. Bawaslu Kota Ambon menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 003 Tanggal 6 Desember 2024 dengan Formulir Model A11 Kajian Dugaan Pelanggaran. Yang pada pokoknya bahwa temuan tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan, namun terbukti sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan.

3. Bawaslu Kota Ambon merekomendasikan kepada KPU Kota Ambon sebagai Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Nomor

146 Tanggal 9 Desember 2024 berdasarkan Formulir Model A-13, yang pada pokoknya temuan dugaan pelanggaran tersebut dinyatakan sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan.

Poin 4 dianggap dibacakan, Yang Mulia, (vide Bukti PK.32.10-7 sampai dengan PK.32.10-12).

Demikian keterangan Bawaslu Kota Ambon yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam rapat Pleno tanggal 12 Januari 2025. Hormat kami, Badan Pengawas Pemilihan Kota Ambon, Alberth Johan Talabessy, S.E., M.Si., Ketua. Anggota Reinaldo Christofel Pattiasina, Suminar Setiati Sehwaky, S.H.

Demikian, Yang Mulia.

**1137.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:28:27]**

Ya, terima kasih. Itu Alberth dan siapa satu lagi? Reinaldo?

**1138.BAWASLU: ALBERTH JOHAN TALABESSY [02:28:33]**

Ya, Reinaldo Christofel Pattiasina dan Suminar Setiati Sehwaky.

**1139.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:28:39]**

Oh, yang baik. Ketua enggak datang?

**1140.BAWASLU: ALBERTH JOHAN TALABESSY [02:28:40]**

Izin, saya Ketua, Yang Mulia.

**1141.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:28:42]**

Oh, ketua? Baik. Terima kasih, ya, Bawaslu Kota Ambon. Kembalikan kepada, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

**1142.KETUA: SALDI ISRA [02:28:50]**

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur.

Terima kasih untuk Kota Ambon.

Kita silakan, bertukar tempat duduk dengan Buton Selatan. Buton Selatan itu ada 2, Nomor 80 dan 134. Silakan. Ini sekali kita periksa, ini. Kita dengar.

Pihak Terkait Buton Selatan? 1 atau 2 Pihak Terkait? 2, ya? Kalau dua dari satu kantor atau dari kantor yang berbeda?

**1143.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 80/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARDIN FIRANATA [02:29:35]**

Satu kantor yang berbeda, Yang Mulia.

**1144.KETUA: SALDI ISRA [02:29:37]**

Satu (...)

**1145.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 80/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARDIN FIRANATA [02:29:37]**

Eh, satu kantor yang sama, Yang Mulia.

**1146.KETUA: SALDI ISRA [02:29:38]**

Oh, satu kantor yang sama?

**1147.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 80/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARDIN FIRANATA [02:29:39]**

Baik, Yang Mulia.

**1148.KETUA: SALDI ISRA [02:29:39]**

Nanti (...)

**1149.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 80/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARDIN FIRANATA [02:29:40]**

Tapi pada prinsipnya, kami terpisah bagi dua.

**1150.KETUA: SALDI ISRA [02:29:44]**

Ya, itu bisalah Hakim mengatur itu. Yang tidak bisa saya aturkan, berapa Anda mau membagi honorkan itu enggak bisa diatur sama Hakim.

Silakan, sekarang kita dengar jawaban atau bantahan dari Termohon untuk Perkara 80 nanti sekalian aja dengan Perkara 134. Jadi, kalau sudah disampaikan di 80, nanti 134 saya akan tanyakan, "Ada yang lain yang mau ditambahkan atau tidak." Ya?

**1151.KUASA HUKUM TERMOHON: RIDWAN NURROHIM [02:30:13]**

Baik, Yang Mulia.

**1152.KETUA: SALDI ISRA [02:30:14]**

Oke, silakan, 80.

**1153.KUASA HUKUM TERMOHON: RIDWAN NURROHIM [02:30:16]**

Terima kasih. Assalamualaikum wr.wb.

**1154.KETUA: SALDI ISRA [02:30:18]**

Waalaikumsalam wr. wb.

**1155.KUASA HUKUM TERMOHON: RIDWAN NURROHIM [02:30:21]**

Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkanlah kami dari HDH Law Office yang mewakili Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan. Saya sendiri, Ridwan Nurrohimi, dan hadir Prinsipal kami, Ketua KPU Kabupaten Buton Selatan, Bapak Hastun.

**1156.KETUA: SALDI ISRA [02:30:41]**

Oke, silakan.

**1157.KUASA HUKUM TERMOHON: RIDWAN NURROHIM [02:30:42]**

Untuk selanjutnya, kami akan menjawab ... kami akan bacakan jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan terhadap Perkara Nomor 80, yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3.

**1158.KETUA: SALDI ISRA [02:30:56]**

Oke, di Eksepsi enggak usah, ya?

**1159.KUASA HUKUM TERMOHON: RIDWAN NURROHIM [02:31:01]**

Di Eksepsi untuk Kewenangan Mahkamah, dianggap dibacakan.

**1160.KETUA: SALDI ISRA [02:31:06]**

Ya.

**1161.KUASA HUKUM TERMOHON: RIDWAN NURROHIM [02:31:07]**

Selanjutnya untuk tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan.

**1162.KETUA: SALDI ISRA [02:31:11]**

Itu Tenggang waktunya masih cukup atau melewati?

**1163.KUASA HUKUM TERMOHON: RIDWAN NURROHIM [02:31:14]**

Untuk per ... untuk pengajuan permohonannya masih cukup.

**1164.KETUA: SALDI ISRA [02:31:19]**

Ya.

**1165.KUASA HUKUM TERMOHON: RIDWAN NURROHIM [02:31:19]**

Tapi, untuk perbaikannya telah melewati batas waktu.

**1166.KETUA: SALDI ISRA [02:31:20]**

Perbaikannya yang melewati batas waktu?

**1167.KUASA HUKUM TERMOHON: RIDWAN NURROHIM [02:31:22]**

Betul.

**1168.KETUA: SALDI ISRA [02:31:22]**

Oke, silakan.

**1169.KUASA HUKUM TERMOHON: RIDWAN NURROHIM [02:31:24]**

Selanjutnya, kedudukan hukum Pemohon.

**1170.KETUA: SALDI ISRA [02:31:26]**

Ya.

**1171.KUASA HUKUM TERMOHON: RIDWAN NURROHIM [02:31:29]**

Menurut Termohon, perolehan suara Pemohon sebanyak 14.242.

**1172.KETUA: SALDI ISRA [02:31:40]**

Ya.

**1173.KUASA HUKUM TERMOHON: RIDWAN NURROHIM [02:31:41]**

Dan Pihak Terkait sebanyak 17.681, menyebabkan selisih perolehan suara sebanyak 3.439 atau setara dengan 7, (...)

**1174.KETUA: SALDI ISRA [02:31:53]**

Saya mau balik dulu, kenapa Anda katakan perbaikannya melewati tenggang waktu 80 ... 80 ini?

**1175.KUASA HUKUM TERMOHON: RIDWAN NURROHIM [02:31:57]**

Di per (...)

**1176.KETUA: SALDI ISRA [02:31:58]**

Permohonannya diajukan tanggal 6, ya?

**1177.KUASA HUKUM TERMOHON: RIDWAN NURROHIM [02:32:00]**

Permohonan diajukan tanggal 6, Yang Mulia.

**1178.KETUA: SALDI ISRA [02:32:02]**

Ya. Tanggal 6 itu hari apa?

**1179.KUASA HUKUM TERMOHON: RIDWAN NURROHIM [02:32:04]**

Tanggal 6 itu hari Jumat.

**1180.KETUA: SALDI ISRA [02:32:06]**

Jumat, oke. Jadi, hitungannya Jumat, Senin (...)

**1181.KUASA HUKUM TERMOHON: RIDWAN NURROHIM [02:32:11]**

Senin.

**1182.KETUA: SALDI ISRA [02:32:12]**

Selasa.

**1183.KUASA HUKUM TERMOHON: RIDWAN NURROHIM [02:32:13]**

Selasa.

**1184.KETUA: SALDI ISRA [02:32:14]**

Oke.

**1185.KUASA HUKUM TERMOHON: RIDWAN NURROHIM [02:32:15]**

Ini diajukan perbaikan tanggal 11, Yang Mulia.

**1186.KETUA: SALDI ISRA [02:32:17]**

Tanggal 10 sih ini.

**1187.KUASA HUKUM TERMOHON: RIDWAN NURROHIM [02:32:20]**

Tanggal 10?

**1188.KETUA: SALDI ISRA [02:32:21]**

Ya, betul. Perbaikan permohonannya itu diajukan tanggal 10. Betul, ya, Pemohon, ya? Perbaikan permohonannya tanggal 10, ya? Ya.

**1189.KUASA HUKUM TERMOHON: RIDWAN NURROHIM [02:32:44]**

Sebentar, Yang Mulia.

**1190.KETUA: SALDI ISRA [02:32:45]**

Ya.

**1191.KUASA HUKUM TERMOHON: RIDWAN NURROHIM [02:32:46]**

Kami buka perbaikannya ini. Sementara yang sudah kami catat itu tanggal 11.

**1192.KETUA: SALDI ISRA [02:32:54]**

Ini di ... ini kan, yang Anda pegang? Ini, kan? Kalau di sini tanggal 10. Jadi, perbaiki permohonan hari Selasa, tanggal 10 bulan 12/2024, pukul 12.09 WIB. Nah, ini kan ada konsekuensinya.

**1193.KUASA HUKUM TERMOHON: RIDWAN NURROHIM [02:33:13]**

Baik.

**1194.KETUA: SALDI ISRA [02:33:14]**

Kalau Anda anggap melewati, Anda akan jelaskan permohonan awal, ya.

**1195.KUASA HUKUM TERMOHON: RIDWAN NURROHIM [02:33:18]**

Baik. Baik, Yang Mulia.

**1196.KETUA: SALDI ISRA [02:33:19]**

Ya. Silakan.

**1197.KUASA HUKUM TERMOHON: RIDWAN NURROHIM [02:33:22]**

Dilanjutkan, Yang Mulia.

**1198.KETUA: SALDI ISRA [02:33:23]**

Ya.

**1199.KUASA HUKUM TERMOHON: RIDWAN NURROHIM [02:33:28]**

Selanjutnya untuk kedudukan hukum tadi.

**1200.KETUA: SALDI ISRA [02:33:31]**

Ya.

**1201.KUASA HUKUM TERMOHON: RIDWAN NURROHIM [02:33:32]**

Kami lanjutkan. Selisih perolehan suara di 3.439 atau setara dengan 7,46%.

**1202.KETUA: SALDI ISRA [02:33:39]**

Ya.

**1203.KUASA HUKUM TERMOHON: RIDWAN NURROHIM [02:33:40]**

Sementara ambang batas yang ditentukan Pasal 158 adalah 2%.

**1204.KETUA: SALDI ISRA [02:33:45]**

Oke.

**1205.KUASA HUKUM TERMOHON: RIDWAN NURROHIM [02:33:46]**

Sehingga melampaui ambang batas, Yang Mulia.

**1206.KETUA: SALDI ISRA [02:33:48]**

Oke, permohonan kabur ada?

**1207.KUASA HUKUM TERMOHON: RIDWAN NURROHIM [02:33:50]**

Permohonan kabur itu terkait dengan Pemohon tidak menguraikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesalahan atau kekeliruan Termohon dalam proses penghitungan dan/atau rekapitulasi hasil puraihan suara sehingga substansinya ini kabur, Yang Mulia.

**1208.KETUA: SALDI ISRA [02:34:06]**

Oke, Pokok Permohonan.

**1209.KUASA HUKUM TERMOHON: RIDWAN NURROHIM [02:34:08]**

Selanjutnya dalam Pokok Permohonan.

Pokok Permohonan Pemohon pada poin 3 huruf A sampai huruf Q, halaman 10-17 permohonan itu terkait dengan pemilih tambahan, DPK, dan pemilih pindahan.

**1210.KETUA: SALDI ISRA [02:34:24]**

Ya, oke. Jadi, ini yang dia dalilkan, dalil utamanya itu ada DPK.

**1211.KUASA HUKUM TERMOHON: RIDWAN NURROHIM [02:34:29]**

Ya.

**1212.KETUA: SALDI ISRA [02:34:30]**

Daftar pemilih khusus, ya?

**1213.KUASA HUKUM TERMOHON: RIDWAN NURROHIM [02:34:31]**

Ya, daftar pemilih khusus.

**1214.KETUA: SALDI ISRA [02:34:32]**

Dengan daftar pemilih tambahan.

**1215.KUASA HUKUM TERMOHON: RIDWAN NURROHIM [02:34:34]**

Ya.

**1216.KETUA: SALDI ISRA [02:34:35]**

Di sekitar 14 atau 15 TPS, ya?

**1217.KUASA HUKUM TERMOHON: RIDWAN NURROHIM [02:34:37]**

Betul, di 16, Yang Mulia.

**1218.KETUA: SALDI ISRA [02:34:38]**

16 TPS. Nah, tolong jelaskan poin ... apanya ... gambaran besarnya saja, jangan per-TPS.

**1219.KUASA HUKUM TERMOHON: RIDWAN NURROHIM [02:34:47]**

Baik. Terhadap dalil tersebut, Termohon menyampaikan jawaban bahwa dalil-dalil Pemohon mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam Perkara ... dalam permohonan a quo merupakan dalil yang dipaksakan, tidak berdasar, dan tidak beralasan hukum. Oleh karena Pemohon tidak secara jelas dan tegas merinci berapa total penambahan DPK yang Pemohon maksud di setiap TPS yang didalilkan. Pemohon juga tidak menguraikan kausalitas dugaan pelanggaran yang didalilkan dengan signifikan ... dengan signifikansi perolehan suara Pemohon pada pemilihan di Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024. Kendati demikian, Termohon akan memberikan bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut. Untuk tiap TPS, di halaman sudah kami sampaikan jawaban.

**1220.KETUA: SALDI ISRA [02:35:34]**

Ya. Saya cek dua-duanya nih, permohonan dan jawaban.

**1221.KUASA HUKUM TERMOHON: RIDWAN NURROHIM [02:35:38]**

Baik, Yang Mulia.

**1222.KETUA: SALDI ISRA [02:35:39]**

Silakan.

**1223.KUASA HUKUM TERMOHON: RIDWAN NURROHIM [02:35:40]**

Ini di ... sebentar, Yang Mulia. Pada halaman 22 samapi 23 jawaban Termohon, Yang Mulia.

**1224.KETUA: SALDI ISRA [02:36:06]**

Ya.

**1225.KUASA HUKUM TERMOHON: RIDWAN NURROHIM [02:36:08]**

Kami sampaikan daftar tabel TPS-TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon.

**1226.KETUA: SALDI ISRA [02:36:12]**

Ya.

**1227.KUASA HUKUM TERMOHON: RIDWAN NURROHIM [02:36:13]**

Itu ada 16 TPS. 15 TPS berkaitan dengan DPK, daftar pemilih tambahan atau ... atau DPK. Satu TPS itu di TPS 002 Desa Batuawu, Kecamatan Siompu, itu berkaitan dengan Daftar Pemilih Pindahan atau DPTb.

Nah, berdasarkan data yang kami peroleh bahwa data mengenai DPK dan DPTb telah sesuai, tidak ada yang dipermasalahkan. Oleh karena itu, kami sudah sampaikan bukti-bukti C.Hasil di setiap TPS tersebut, tidak ada keberatan dari pihak saksi Pemohon, Yang Mulia.

Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai pelanggaran administratif, terkait DPK dan DPTb tidak benar atau tidak beralasan menurut hukum. Selain itu, jumlah DPK yang di ... yang menggunakan hak pilihnya, tidak signifikan, sehingga tidak mempengaruhi perselisihan

hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Total suara pemilih DPK itu 66 sua ... 66 pemilih DPK di 16 TPS dan 16 desa atau kelurahan dan di 4 kecamatan, Yang Mulia.

**1228.KETUA: SALDI ISRA [02:37:39]**

Oke, lanjut.

**1229.KUASA HUKUM TERMOHON: RIDWAN NURROHIM [02:37:40]**

Selanjutnya itu tentang dugaan pelanggaran Pj Bupati Buton Selatan.

**1230.KETUA: SALDI ISRA [02:37:43]**

Sebentar dulu, ya.

Pemohon, Anda yang perbaikan Anda yang ini atau yang ini? Yang mana yang perbaikan Anda ini? Tanggal tertulisnya tanggal 10, ya, tapi diterimanya tanggal 11 ada informasinya ini.

**1231.KUASA HUKUM TERMOHON: RIDWAN NURROHIM [02:38:02]**

Kami lihat di bagian registernya itu, Yang Mulia. Tapi kebetulan ini fotokopinya (...)

**1232.KETUA: SALDI ISRA [02:38:05]**

Ya.

**1233.KUASA HUKUM TERMOHON: RIDWAN NURROHIM [02:38:07]**

Eggak kelihatan, di registernya itu 11, Yang Mulia.

**1234.KETUA: SALDI ISRA [02:38:09]**

Oke, nanti kita lihat. Anda jalan terus.

**1235.KUASA HUKUM TERMOHON: RIDWAN NURROHIM [02:38:16]**

Terkait dengan dugaan pelanggaran Pj Bupati Buton itu dianggap dibacakan, Yang Mulia. Mungkin nanti di bagian Pihak Pemberi Keterangan yang akan menjelaskan. Selanjutnya ke (...)

**1236.KETUA: SALDI ISRA [02:38:35]**

Oke, lanjut.

**1237.KUASA HUKUM TERMOHON: RIDWAN NURROHIM [02:38:37]**

Langsung ke petitum, Yang Mulia.

**1238.KETUA: SALDI ISRA [02:38:42]**

Ya, Petitum.

**1239.KUASA HUKUM TERMOHON: RIDWAN NURROHIM [02:38:43]**

Berdasarkan jawaban Termohon yang telah kami uraikan, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

**1240.KETUA: SALDI ISRA [02:38:54]**

Ya.

**1241.KUASA HUKUM TERMOHON: RIDWAN NURROHIM [02:38:56]**

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku surat keputusan KPU Kabupaten Buton Selatan Nomor 716 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024, pukul 00.32 WITA.

**1242.KETUA: SALDI ISRA [02:39:21]**

Oke.

**1243.KUASA HUKUM TERMOHON: RIDWAN NURROHIM [02:39:23]**

3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut.

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**1244.KETUA: SALDI ISRA [02:39:33]**

Ya.

**1245.KUASA HUKUM TERMOHON: RIDWAN NURROHIM [02:39:34]**

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono. Kuasa Hukum Pemohon ... Kuasa Hukum Termohon, HDH Law Office, saya sendiri Ridwan Nurrohim, ditandatangani.

**1246.KETUA: SALDI ISRA [02:39:48]**

Oke.

**1247.KUASA HUKUM TERMOHON: RIDWAN NURROHIM [02:39:51]**

Terima kasih.

**1248.KETUA: SALDI ISRA [02:39:53]**

Terima kasih.

Nah, ini memang kami sudah cek, ya. Pengajuan perbaikan permohonan itu disampaikan 11 Desember.

**1249.KUASA HUKUM TERMOHON: RIDWAN NURROHIM [02:39:55]**

Betul, Yang Mulia.

**1250.KETUA: SALDI ISRA [02:40:02]**

Ya, ya? Betul? Betul. Ini pukul 12.09.57, jadi sudah benar Anda menjawab, yang pertama, ya?

**1251.KUASA HUKUM TERMOHON: RIDWAN NURROHIM [02:40:10]**

Baik, Yang Mulia.

**1252.KETUA: SALDI ISRA [02:40:11]**

Oke, terima kasih.

Pihak Terkait, silakan ... oh belum, yang nomor 1 lagi.

**1253.KUASA HUKUM TERMOHON: RIDWAN NURROHIM [02:40:18]**

134, Yang Mulia.

**1254.KETUA: SALDI ISRA [02:40:19]**

134.

**1255.KUASA HUKUM TERMOHON: FAJAR MAULANA YUSUF [02:40:20]**

Assalamualaikum wr. wb.

**1256.KETUA: SALDI ISRA [02:40:22]**

Walaikumsalam.

**1257.KUASA HUKUM TERMOHON: FAJAR MAULANA YUSUF [02:40:23]**

Izin melanjutkan (...)

**1258.KETUA: SALDI ISRA [02:40:24]**

Ya.

**1259.KUASA HUKUM TERMOHON: FAJAR MAULANA YUSUF [02:40:25]**

Untuk Perkara 134.

**1260.KETUA: SALDI ISRA [02:40:26]**

Ya.

**1261.KUASA HUKUM TERMOHON: FAJAR MAULANA YUSUF [02:40:27]**

Yang hadir Fajar Maulana Yusuf. Izin untuk menyampaikan Pokok-Pokok Jawaban.

Dalam Eksepsi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan.

**1262.KETUA: SALDI ISRA [02:40:37]**

Ya, lanjut.

**1263.KUASA HUKUM TERMOHON: FAJAR MAULANA YUSUF [02:40:38]**

Mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan.

**1264.KETUA: SALDI ISRA [02:40:41]**

Ya.

**1265.KUASA HUKUM TERMOHON: FAJAR MAULANA YUSUF [02:40:41]**

Bahwa berdasarkan e-AP3, Permohonan Pemohon diajukan pada tanggal 7 Desember 2024, sedangkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon pada tanggal 4 Desember 2024 sehingga Permohonan tersebut telah melewati batas waktu dimana tenggang waktu pengajuan Permohonan paling lambat Tanggal 6 Desember 2024.

Begitu pula dengan pengajuan perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 11 Desember 2024 telah melewati tenggang waktu yang di ... sebagaimana yang ditentukan dalam PMK 3 Tahun 2024.

Kemudi ... mengenai kedudukan hukum Pemohon.

**1266.KETUA: SALDI ISRA [02:41:17]**

Ya, silakan.

**1267.KUASA HUKUM TERMOHON: FAJAR MAULANA YUSUF [02:41:18]**

Jumlah penduduk di kabu ... Kabupaten Buton sebanyak 102.426 jiwa sehingga ambang batas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sebesar 2%.

**1268.KETUA: SALDI ISRA [02:41:32]**

Oke, lanjut.

**1269.KUASA HUKUM TERMOHON: FAJAR MAULANA YUSUF [02:41:33]**

Bahwa batas selisih pengajuan Permohonan dalam perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan adalah sebesar 923 suara. Sedangkan, selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 14.882 suara atau setara 32,25%.

**1270.KETUA: SALDI ISRA [02:41:58]**

Oke.

**1271.KUASA HUKUM TERMOHON: FAJAR MAULANA YUSUF [02:42:01]**

Kemudian, mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas.

**1272.KETUA: SALDI ISRA [02:42:04]**

Ya.

**1273.KUASA HUKUM TERMOHON: FAJAR MAULANA YUSUF [02:41:05]**

Bahwa Posita Permohonan Pemohon sama sekali tidak memuat uraian yang jelas mengenai permasalahan hasil penghitungan suara yang disebabkan ... yang ditetapkan oleh Termohon, dan tidak pula memuat hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon justru menguraikan persoalan yang terjadi pada proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024. Spesifiknya berkaitan dengan dugaan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, menurut Termohon, Posita yang didalilkan oleh Pemohon tidak detail dan Petitum Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**1274.KETUA: SALDI ISRA [02:42:40]**

Oke.

**1275.KUASA HUKUM TERMOHON: FAJAR MAULANA YUSUF [02:42:40]**

Kemudian, mengenai dalam ... dalam Pokok Permohonan.

**1276.KETUA: SALDI ISRA [02:42:44]**

Ya.

**1277.KUASA HUKUM TERMOHON: FAJAR MAULANA YUSUF [02:42:44]**

Bahwa dalam ... bahwa dalil Pemohon pada halaman 6 Permohonan, yang menyatakan Pemohon keberatan terhadap penetapan dari rekapitulasi hasil pemilihan penghitungan suara tersebut di atas. Dan oleh karenanya, memo ... memohon agar secara mutatis mutandis, keputusan KPU Kabupaten Buton Selatan Nomor 716 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan ditetapkan pada tanggal 2 ... 4 Desember 2024 dinyatakan bet ... batal demi hukum.

Dapat Termohon bantah. Bahwa jika dihubungkan dengan objek Perkara, maka dalil Pemohon mengenai keberatan terhadap penetapan terkait rekapitulasi hasil perolehan suara oleh Termohon tersebut sangatlah tidak jelas karena tidak disertai dengan uraian yang jelas dan/atau terperinci mengenai hal-hal sebagai berikut.

1. Pemohon tidak menguraikan tentang kesalahan, kekeliruan, dan/atau pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupa ... Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh Termohon, pada tanggal 4 Desember 2024.

2. Pemohon tidak menguraikan tentang berapa hasil perolehan suara yang benar menurut Termohon.

Kemudian bahwa Termohon ... bahwa untuk menjawab ... dalil-dalil Pemohon pada halaman 5 sampai 6, jika yang dimaksud Pemohon keberatan terhadap penetapan rekap ... rekapitulasi hasil perolehan suara oleh Termohon karena terjadi politik ... praktik politik uang secara masif yang dilakukan oleh pasangan calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3, dan atau tim pemenangannya. Maka dapat Termohon sampaikan tanggapan bahwa seharusnya Pemohon melaporkan dugaan pelanggaran atau money politics tersebut kepada Bawaslu atau lembaga lain, bukan mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi.

Kemudian bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya tentang dugaan terjadinya praktik politik uang secara masif yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 1 Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, dan/atau tim pemenangannya kemenangan ... pemenangannya di 70 desa atau kelurahan dan di 7 kecamatan di Kabupaten Selatan dengan nilai yang variatif, dianggap dibacakan.

**1278.KETUA: SALDI ISRA [02:44:53]**

Oke. Lanjut.

**1279.KUASA HUKUM TERMOHON: FAJAR MAULANA YUSUF [02:44:55]**

Maka Termohon sam ... dapat sampaikan bahwa Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan terperinci mengenai dugaan praktik politik uang tersebut, seperti nama-nama pelakunya, siapa pemberi dan penerimanya (...)

**1280.KETUA: SALDI ISRA [02:45:07]**

Ya.

**1281.KUASA HUKUM TERMOHON: FAJAR MAULANA YUSUF [02:45:07]**

Kapan dan di mana tempat terjadinya praktik politik uang tersebut di 70 desa atau kelu ... di 70 desa atau kelurahan dan di 7 kecamatan mana saja yang Pemohon maksud karena Termohon tidak mengetahui adanya pelanggaran dan atau praktik politik uang sebagaimana yang didalikan oleh Pemohonan tersebut. Termohon juga tidak pernah dipanggil oleh Bawaslu untuk dimintai keterangan atau menerima rekomendasi atau keputusan Bawaslu yang terkait dalil-dalil Pemohon tersebut.

Kemudian bahwa faktanya Termohon telah menjalankan prinsip penyelenggaraan pemilihan, agar terciptanya prinsip kepastian hukum yang mana hal ini dibu ... dibuktikan dari tidak adanya rekomendasi ... reko ... rekomendasi atau putusan dari Bawaslu Buton Selatan yang terkait dengan poli ... praktik politik uang sebagaimana didalilkan Pemohon. Serta diwa ... dikuatkan dengan hasil penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan Bawaslu terhadap laporan yang dilakukan oleh Pemohon Nomor 002/REG/LP/PB/KAB/28.17/XII/2024. Status laporan dihentikan dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilu tercantum dan terlampir dalam bukti, dianggap dibacakan.

**1282.KETUA: SALDI ISRA [02:46:25]**

Oke.

**1283.KUASA HUKUM TERMOHON: FAJAR MAULANA YUSUF [02:44:00]**

Kemudian Petitem.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Kabupaten Buton Selatan Nomor 716 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024, pukul 00.32 WITA.

3. Menetapkan perolehan suara tahapan akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024 yang benar, dianggap dibacakan.

Hormat kami Kuasa Hukum dari HDH Law Office, ditandatangani.

Terima kasih, Yang Mulia.

**1284.KETUA: SALDI ISRA [02:47:18]**

Oke. Terima kasih.  
Pihak Terkait, silakan, untuk Perkara Nomor 80.

**1285.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 80/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARDIN FIRANATA [02:47:27]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

**1286.KETUA: SALDI ISRA [02:47:30]**

Ya.

**1287.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 80/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARDIN FIRANATA [02:47:30]**

Assalamualaikum wr.wb.

**1288.KETUA: SALDI ISRA [02:47:33]**

Walaikumsalam wr. wb.

**1289.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 80/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARDIN FIRANATA [02:47:33]**

Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namu Buddhaya, Salam Kebajikan.

Izinkan kami sebagai Pihak Terkait dari Perkara 80, Yang Mulia, yang pada pokoknya kami akan membacakan pokok-pokoknya saja.

**1290.KETUA: SALDI ISRA [02:47:53]**

Ya, silakan.

**1291.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 80/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARDIN FIRANATA [02:47:53]**

Kami dari Kantor La Ode Zulfikar Nur dan asosiasi sebagai Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara 80 yang dimohonkan oleh Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pasangan Buton Selatan Nomor Urut 3.

Pada prinsipnya, tanggapan kami sebagai Pihak Terkait dalam perkara 80 ada 6 poin. 3 poin dalam Eksepsi dan kemudian 3 poin dalam Pokok Permohonan.

**1292.KETUA: SALDI ISRA [02:48:23]**

Ya.

**1293.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 80/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARDIN FIRANATA [02:48:23]**

Yang pertama, terkait dengan Eksepsi.

**1294.KETUA: SALDI ISRA [02:48:27]**

Eksepsinya apa yang paling penting?

**1295.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 80/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARDIN FIRANATA [02:48:29]**

Yang paling penting adalah terkait dengan legal standing Pemohon.

**1296.KETUA: SALDI ISRA [02:48:33]**

Oke.

**1297.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 80/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARDIN FIRANATA [02:48:33]**

Pada prinsipnya, kami mendalilkan bahwa Pemohon tidak memiliki legal standing, mengingat perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait memiliki (...)

**1298.KETUA: SALDI ISRA [02:48:42]**

Melebihi.

**1299.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 80/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARDIN FIRANATA [02:48:42]**

Persentase suara melebihi daripada (...)

**1300.KETUA: SALDI ISRA [02:48:43]**

Oke.

**1301.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 80/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARDIN FIRANATA [02:48:43]**

Ketentuan.

**1302.KETUA: SALDI ISRA [02:48:45]**

Cukup.

**1303.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 80/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARDIN FIRANATA [02:48:45]**

Kemudian, terkait dengan obscur libel.

**1304.KETUA: SALDI ISRA [02:48:48]**

Ya.

**1305.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 80/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARDIN FIRANATA [02:48:48]**

Pada prinsipnya Permohonan Pemohon dianggap kabur antara Posita dan Petitum tidak ada relevansi yang substansi terkait dengan kewenangan atau perolehan suara.

**1306.KETUA: SALDI ISRA [02:48:58]**

Oke.

**1307.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 80/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARDIN FIRANATA [02:48:58]**

Kemudian, masuk kepada Pokok Perkara.  
Yang pada pokoknya kami sebagai Pihak Terkait setelah mencermati Permohonan Pemohon bahwa yang pertama, terkait dengan DPK ada pada 15 TPS dan pemilih pindahan 1 TPS.

**1308.KETUA: SALDI ISRA [02:49:17]**

Ya.

**1309.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 80/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARDIN FIRANATA [02:49:17]**

Artinya, tanggapan kami di sana, Majelis. Bahwa di dalam Permohonan Pemohon tidak jelas dalil dan tidak memiliki substansi hukum mengingat dalil Permohonan Pemohon tidak mampu menguraikan berapa jumlah suara yang dimaksud di D ... DPK maupun di daftar pemilih pindahan.

Kemudian yang kedua. Pemohon dalam permohonannya tidak mampu menguraikan secara substansi bahwa suara-suara yang dimaksud oleh Pemohon memilih kepada calon nomor urut berapa.

Kemudian yang kedua, terkait dengan DPK sebagaimana dalil Permohonan Pemohon dalam poin 3 huruf A sampai Q, tanggapan kami sebagai Pihak Terkait menyatakan bahwa Pihak Termohon tidak mengalami kesalahan atau tidak melakukan perbuatan melawan hukum atas tindakan tersebut. Artinya, Pihak Terkait ... artinya, Pihak Termohon mengakomodir pemilih DPK, maupun DP ... pemilih tambahan 1 TPS itu sudah sesuai dengan prosedur sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-Undang Pilkada.

**1310. KETUA: SALDI ISRA [02:50:37]**

Oke, apa lagi?

**1311. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 80/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARDIN FIRANATA [02:50:39]**

Kemudian yang kedua ... yang ketiga, terkait dengan DPK maupun pemilih pindahan di 16 ... kurang lebih 16 TPS. Bahwa pada pokoknya tanggapan Pihak Terkait, seluruh pasangan calon dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 sampai 4 itu tidak memberikan keberatan. Artinya apa? Pemohon pun melakukan tanda tangan di ... saksi Pemohon melakukan tanda tangan di KWK-C. Hasil.

**1312. KETUA: SALDI ISRA [02:51:10]**

Oke.

**1313. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 80/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARDIN FIRANATA [02:51:11]**

Kemudian yang kedua, masuk kepada keterlibatan Pj Bupati Buton Selatan.

**1314. KETUA: SALDI ISRA [02:51:20]**

Ya.

**1315.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 80/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARDIN FIRANATA [02:51:20]**

Di sana ada 3 poin yang ingin kami tanggapi.

Yang pertama terkait dengan SK. Yang pada prinsipnya tanggapan kami sebagai Pihak Terkait bahwa mengingat Pj Bupati bukan bagian dari calon ... calon bupati maupun ... Calon Bupati maupun Wakil Bupati Buton Selatan, maka kami menilai atau memandang bahwa terkait dengan tindakan beschikking bup ... pejabat bupati, berdiri sendiri, tidak ada relevansi baik substansi secara hukum maupun secara politik dengan perhelatan pilkada yang Buton Selatan Tahun 2024 kali ini, Yang Mulia.

**1316.KETUA: SALDI ISRA [02:52:02]**

Oke.

**1317.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 80/PHPU.BUP/2025: ARDIN FIRANATA [02:52:03]**

Kemudian terkait dengan foto pejabat bupati. Yang pada pokoknya di dalam Permohonan Pemohon mendalilkan bahwa pejabat Bupati Buru Selatan, Kabupaten Buru Selatan yang ada di Provinsi Maluku itu berfoto bersama Tim Sukses Pihak Terkait. Artinya apa? Substansi tanggapan kami bahwa Pihak Terkait dalam hal ini menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati di wilayah Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, sementara dalil Pemohon di dalam Permohonannya pada poin 9 mendalilkan ada foto Pj bupati dengan pasangan ... dengan Tim Sukses Pihak Terkait.

Kemudian, yang ketiga. Terkait dengan money politics akan dilanjutkan oleh rekan saya, Yang Mulia.

**1318.KETUA: SALDI ISRA [02:53:02]**

Oke, silakan.

**1319.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 80/PHPU.BUP/2025: BRYAN UMAR [02:53:02]**

Terima kasih, Yang Mulia.  
Assalamualaikum wr.wb.

**1320.KETUA: SALDI ISRA [02:53:10]**

Ya. Waalaikumsalam wr. wb.

**1321.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 80/PHPU.BUP/2025: BRYAN UMAR [02:53:11]**

Izin menambahkan terkait dengan kedudukan hukum pemohon tadi sudah disebutkan (...)

**1322.KETUA: SALDI ISRA [02:53:16]**

Sudah, itu sudah selesai. Lanjut.

**1323.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 80/PHPU.BUP/2025: BRYAN UMAR [02:53:18]**

Izin, Yang Mulia. Ini sangat penting karena Pemohon mengambil beberapa putusan terkait dengan perkara-perkara (...)

**1324.KETUA: SALDI ISRA [02:53:26]**

Anda sekarang sampaikan soal money politics.

**1325.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 80/PHPU.BUP/2025: BRYAN UMAR [02:53:28]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

**1326.KETUA: SALDI ISRA [02:53:29]**

Apa money politics-nya?

**1327.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 80/PHPU.BUP/2025: BRYAN UMAR [02:53:30]**

Ya, terkait dengan money politics yang didalilkan oleh Pemohon yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, serta serangan fajar. Ini adalah dalil yang tidak jelas, mengada-ngada, serta tidak berdasar hukum. Karena Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas dan tegas mengenai siapa yang melakukan pelanggaran, di mana pelanggaran tersebut terjadi, serta tidak didukung oleh fakta-fakta hukum.

Kemudian, selanjutnya dalil Pemohon terkait dengan poin 11 yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi dugaan pelanggaran pemilu, baik

yang dilakukan oleh Pihak Terkait, Temohon ataupun Pj. Buton Selatan ... Pj. Bupati Buton Selatan, hal tersebut seharusnya dilaporkan ke Bawaslu, tetapi tidak dilaporkan. Dan kemudian nanti terkait hal itu nanti disampaikan dengan ... nanti disampaikan oleh Bawaslu bahwa tidak terjadi pelanggaran terkait laporan (...)

**1328.KETUA: SALDI ISRA [02:54:36]**

Itu mau disampaikan Bawaslu atau tidak, tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait.

**1329.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 80/PHPU.BUP/2025: BRYAN UMAR [02:54:39]**

Baik, Yang Mulia.

**1330.KETUA: SALDI ISRA [02:54:40]**

Sekarang Anda masuk Petitem.

**1331.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 80/PHPU.BUP/2025: BRYAN UMAR [02:54:41]**

Baik, yang Mulia, terkait (...)

**1332.KETUA: SALDI ISRA [02:54:44]**

Petitem.

**1333.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 80/PHPU.BUP/2025: BRYAN UMAR [02:54:41]**

Berikutnya, Yang Mulia. Petitem.

**1334.KETUA: SALDI ISRA [02:54:46]**

Ya.

**1335.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 80/PHPU.BUP/2025: BRYAN UMAR [02:54:47]**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor 716 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024, pukul 02.32 WITA.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia. Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait.

**1336.KETUA: SALDI ISRA [02:54:58]**

Oke.

**1337.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 80/PHPU.BUP/2025: BRYAN UMAR [02:54:58]**

Assalamualaikum wr.wb.

**1338.KETUA: SALDI ISRA [02:56:00]**

Wasalamualaikum. 134, apa yang harus ditambahkan?

**1339.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 134/PHPU.BUP-XXIII/2025: RANDIMAN MADI [02:56:03]**

Izin melanjutkan 134, Yang Mulia.

**1340.KETUA: SALDI ISRA [02:56:05]**

Ya. Yang ada informasi barunya, tambahannya soal Eksepsi, di ... apa ya ... dianggap sudah diucapkan.

**1341.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 134/PHPU.BUP-XXIII/2025: RANDIMAN MADI [02:56:12]**

Baik, Yang Mulia.

Kalau begitu, Yang Mulia, masuk langsung pada Pokok Permohonan, Yang Mulia.

**1342.KETUA: SALDI ISRA [02:56:18]**

Ya.

**1343.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 134/PHPU.BUP-XXIII/2025: RANDIMAN MADI [02:56:27]**

Dalam Pokok Permohonan, Yang Mulia, Poin 1 sampai dengan Poin 7, mohon anggap dibacakan.

Langsung pada Poin 8. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada Poin 4, 5, dan 6, yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi praktik politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3, dan/atau tim pemenangannya dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif di 70 Desa Kelurahan di Kabupaten Buton Selatan dimana mengenai adanya praktik politik uang tersebut merupakan pernyataan sepihak oleh Pemohon dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, tanpa mendalilkan secara konkret dan detail kronologis kejadian, kapan kejadiannya, siapa yang melakukannya, serta seperti apa dan bagaimana terstrukturnya, sistematisnya, dan masifnya praktik politik uang yang dimaksud oleh Pemohon.

Bahwa selanjutnya tidak pernah ada putusan Bawaslu Kabupaten Buton Selatan yang menyatakan adanya dugaan pelanggaran dan/atau kecurangan sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam Pokok Permohonannya tersebut. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum, maka sudah sewajarnya, Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Poin terakhir. Bahwa Pihak Terkait selanjutnya dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dalam Permohonan a quo karena Pemohon tidak mampu menyebut dan menguraikan kesalahan hasil perhitungan suara yang diterapkan oleh ... yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024.

Oleh karena itu, seluruh dalil-dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum sehingga patut dan beralasan menurut hukum apabila Mahkamah menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

**1344.KETUA: SALDI ISRA [02:58:05]**

Oke.

**1345.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 134: RANDIMAN MADI [02:58:05]**

Selanjutnya, petitum akan disampaikan rekan saya.

**1346.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR  
134/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE SIRLAN [02:58:12]**

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

**1347.KETUA: SALDI ISRA [02:58:13]**

Ya.

**1348.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR  
134/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE SIRLAN [02:58:13]**

Bismillahirrahmanirrahim. Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor 716 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2024, Bertanggal 4 Desember 2024, pukul 00.32 WITA.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait, La Ode Zulfikar Nur, Bryan Umar, Ardin Firanata, Amrun, Randiman Madi, La Ode Sirlan (...)

**1349.KETUA: SALDI ISRA [02:59:08]**

Jangan disebutkan itu, nanti (...)

**1350.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR  
134/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE SIRLAN [02:59:10]**

Demikian, Yang Mulia, terima kasih. Akhir kata, Wabillahitaufik wal hidayah, wassalamualaikum wr.wb.

**1351.KETUA: SALDI ISRA [02:59:16]**

Walaikumsalam.  
Yang penting ... yang penting nama tuh bunyi lah di ruang sidang,  
ya.

**1352.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR  
134/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE SIRLAN [02:59:20]**

Siap.

**1353.KETUA: SALDI ISRA [02:59:24]**

Hebat juga Anda ini, dari tadi enggak ada yang menyebut itu, Dia bisa curi sedikit, tapi ndak apa-apa, kita iklaskan saja.

Sekarang Bawaslu, disilakan. Ini untuk kedua permohonan sekalian ya, Nomor 80 dan 134. Nanti kami akan bedakan saja di keterangan yang Saudara masukkan untuk kedua permohonan ini, tapi ini digabung saja, silakan.

**1354.BAWASLU: BAHRUDIN LA PUKA [02:59:51]**

Terima kasih, Yang Mulia.  
Assalamualaikum wr.wb.

**1355.KETUA: SALDI ISRA [02:59:55]**

Walaikumsalam wr.wb.

**1356.BAWASLU: BAHRUDIN LA PUKA [02:59:56]**

Terhadap Permohonan Perkara Nomor 80, Bawaslu memberi keterangan.

Pertama, dalil Pemohon terkait adanya selisih perolehan suara. Berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Buton Selatan tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan.

**1357.KETUA: SALDI ISRA [03:00:14]**

Berapa laporan yang masuk ke, Bapak?

**1358.BAWASLU: BAHRUDIN LA PUKA [03:00:17]**

25 laporan.

**1359.KETUA: SALDI ISRA [03:00:18]**

25?

**1360.BAWASLU: BAHRUDIN LA PUKA [03:00:20]**

23 laporan, 2 temuan.

**1361.KETUA: SALDI ISRA [03:00:22]**

Sebentar, 25, ya? Terbagi 2. 2 temuan.

**1362.BAWASLU: BAHRUDIN LA PUKA [03:00:28]**

2 temuan, 23 laporan.

**1363.KETUA: SALDI ISRA [03:00:22]**

23 laporan. Dari 23 laporan, berapa yang diregistrasi, Pak?

**1364.BAWASLU: BAHRUDIN LA PUKA [03:00:36]**

Yang diregistrasi, 22.

**1365.KETUA: SALDI ISRA [03:00:37]**

22 registrasi. satu tidak, ya?

**1366.BAWASLU: BAHRUDIN LA PUKA [03:00:41]**

1 tidak.

**1367.KETUA: SALDI ISRA [03:00:42]**

Dari 22 yang diregistrasi, berapa yang ditindaklanjuti?

**1368.BAWASLU: BAHRUDIN LA PUKA [03:00:48]**

Yang ditindaklanjuti. Tidak dapat ditindaklanjuti semuanya.

**1369.KETUA: SALDI ISRA [03:00:52]**

Semuanya tidak dapat ditindaklanjuti?

**1370.BAWASLU: BAHRUDIN LA PUKA [03:00:53]**

Ya.

**1371.KETUA: SALDI ISRA [03:00:54]**

Nah, ini berarti 22-0, ya? Oke, lanjut, Pak.

**1372.BAWASLU: BAHRUDIN LA PUKA [03:01:01]**

Bahwa dalil Pemohon terhadap pelanggaran TSM, terkait dengan data pemilih. Bawaslu memberi keterangan, berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Buton Selatan pada tanggal 30 November 2024 telah menerima 17 laporan. Berdasarkan kajian awal penanganan pelanggaran, laporan dilimpahkan ke panwascam kecamatan dan selanjutnya laporan diregistrasi. Setelah dilakukan proses penanganan pelanggaran, Panwascam Kecamatan Lapandewa, Panwascam Kecamatan Siompu, Panwas Kecamatan Batauga, dan Panwas Kecamatan Sampolawa pada pokoknya laporan tersebut tidak terdapat pelanggaran pemilihan.

**1373.KETUA: SALDI ISRA [03:01:40]**

Oke.

**1374.BAWASLU: BAHRUDIN LA PUKA [03:01:41]**

Dalil Pemohon adanya pengangkatan dan pemberhentian ASN Pj Bupati Buton Selatan di lingkup pemerintahan Kabupaten Buton Selata., berkenaan dengan dalil pe ... Permohonan Pemohon. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Buton Selatan telah merigistrasi satu temuan dengan Nomor Register 01 dan seterusnya anggap dibacakan. Setelah melakukan proses penanganan pelanggaran, yang pada pokoknya tidak terdapat pelanggaran pemilihan berdasarkan pembahasan bersama Sentra ... Sentra Gakkumdu Kabupaten Buton Selatan.

**1375.KETUA: SALDI ISRA [03:02:13]**

Oke.

**1376.BAWASLU: BAHRUDIN LA PUKA [03:02:15]**

Dalil Pemohon adanya mobilisasi ASN dan Pj Bupati Buton Selatan, berkenaan dengan dalil Pemohon, Permohonan tidak terdapat laporan ataupun temuan pelanggaran pemilihan.

Dalil Pemohon terjadi serangan fajar, 1-H pemilihan, berkenaan dengan dalil Pemohon ... Permohonan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Buton Selatan telah menerima satu laporan dugaan pelanggaran selanjutnya laporan diregristrasi setelah melakukan proses penanganan pelanggaran yang pada pokoknya tidak terdapat pelanggaran pemilihan berdasarkan pembahasan bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Buton Selatan.

Demikian untuk Perkara 134, dilanjutkan.

**1377.KETUA: SALDI ISRA [03:02:54]**

Silakan, Bu, 134.

**1378.BAWASLU: ROSNI [03:02:57]**

Ya, terima kasih. Saya lanjut membacakan resume Permohonan PHPU Nomor 134/PHP.BPUP/XXIII/2024.

**1379.KETUA: SALDI ISRA [03:02:54]**

Silakan.

**1380.BAWASLU: ROSNI [03:02:57]**

Ya. Pertama. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan atas keberatannya terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan dengan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan berdasarkan ... berdasarkan Keputusan KPU Nomor 716 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan. Berkenaan dengan dalil Pemohon ... Permohonan ... Pemohon tidak terdapat laporan dan temuan pelanggaran pemilihan serta tidak ada keberatan saksi saat Pleno di tingkat kabupaten.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya politik uang secara terstruktur, sistematis, masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3 dan tim pemenangannya sebagaimana dalil Pemohon pada angka 4 sampai 10 halaman 6 dan 7. Berkenaan dengan Dalil Permohonan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Buton Selatan telah menerima laporan yang diregistrasi dengan Nomor 002 dan seterusnya. Setelah melakukan proses klarifikasi dan pembuktian, dikeluarkan status laporan yang pada pokoknya laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti pada proses penyidikan berdasarkan keputusan Sentra Gakkumdu Kabupaten Buton Selatan karena tidak terbukti sebagai tindak pemilihan ... sebagai tindak pidana pemilihan.

Demikian keterangan Bawaslu Buton Selatan yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan melalui Rapat Pleno tanggal 19 Januari 2024. Hormat kami, Bawaslu Kabupaten Buton Selatan.

**1381.KETUA: SALDI ISRA [03:04:56]**

Terima kasih, Bu. Dan ini berarti selesai semua yang ... apa ... sesi siang ini.

Kita akan sahkan bukti sekarang.

**1382.KUASA HUKUM TERMOHON: LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN [03:05:10]**

Yang Mulia, Yang Mulia, ini mohon maaf ada yang mau disampaikan dari Perkara 59 Labuhanbatu?

**1383.KETUA: SALDI ISRA [03:05:17]**

Apa lagi ini? 59 sudah selesai, Bu.

**1384.KUASA HUKUM TERMOHON: HENRY SIMON SITINJAK [03:05:20]**

Ada yang mau diklarifikasi, Majelis.

**1385.KETUA: SALDI ISRA [03:05:20]**

Tunggu dulu, sabar, ya. Mau sabar, enggak?  
Kalau enggak, Anda saya suruh duduk sini, saya pindah ke sana nanti.

**1386.KUASA HUKUM TERMOHON: LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN [03:05:30]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

**1387.KETUA: SALDI ISRA [03:05:31]**

Oke. Nanti kan ini rangkaiannya ini dulu, disahkan bukti dulu.  
Oke. Untuk perkara 59, Labuhanbatu, bukti ... Pemohon tidak menambahkan bukti lagi, ya? Tidak.

Kemudian Termohon, T-1 sampai dengan T-466. Betul? Disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Pihak Terkait, PT-1 sampai PT-272. Betul? Disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Bawaslu, PK-3.10.1 sampai dengan PK-3.10.126. Betul? Disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Lanjut. Lanjut, Kabupaten Toba, 94. Termohon, Bukti T-1 sampai dengan T-13. Betul?

**1388.KUASA HUKUM TERMOHON: HENRY SIMON SITINJAK [03:06:30]**

Benar, Yang Mulia.

**1389.KETUA: SALDI ISRA [03:06:31]**

Disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-8?

**1390.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94/PHPU.BUP-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [03:06:41]**

Benar, Yang Mulia.

**1391.KETUA: SALDI ISRA [03:06:42]**

Disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Bawaslu, PK-3.12.1 sampai dengan PK-3.12.10?

**1392.BAWASLU: SAHAT SIBARANI [03:06:49]**

Benar, Yang Mulia.

**1393.KETUA: SALDI ISRA [03:06:50]**

Disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Ini Kuasa Hukum atas nama Termohon, Asman Siagian itu sudah expired dan tidak ada keterangan perpanjangan segala macam. Kemudian ada atas nama Kuasa Hukum Magang, Arthur dan Robinsar nanti diselesaikan.

Untuk Pihak Terkait, kopi KTA masa berlaku tidak terlampirkan atas nama Husni Thamrin, Erwinsyah, Hanna Maria, Ridwan Suherman, Friska JM. Nanti diselesaikan ya, Pihak Terkait.

Perkara Konawe Kepulauan Nomor 143. Termohon, Bukti T-1 sampai T-184?

**1394.TERMOHON: ISKANDAR [03:07:46]**

Benar, Yang Mulia.

**1395.KETUA: SALDI ISRA [03:07:47]**

Tapi, ini alat Bukti T-105 tidak terbaca.

**1396.TERMOHON: ISKANDAR [03:07:52]**

Siap.

**1397.KETUA: SALDI ISRA [03:07:53]**

Mungkin nanti bisa dilengkapi, ya.

**1398.TERMOHON: ISKANDAR [03:07:53]**

Siap, Yang Mulia.

**1399.KETUA: SALDI ISRA [03:07:54]**

Disahkan yang tidak bermasalah.

**KETUK PALU 1X**

Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-151, Pihak Terkait? Benar, ya?

**1400.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR  
143/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHAMMAD DZUL FIJAR  
[03:08:05]**

Benar, Yang Mulia.

**1401.KETUA: SALDI ISRA [03:08:09]**

Disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Bawaslu, PK-12 ... -26.12-1 sampai dengan PK-26.12-54?

**1402.BAWASLU: IRMAWATI [03:08:16]**

Benar, Yang Mulia.

**1403.KETUA: SALDI ISRA [03:08:18]**

Disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Kabupaten Merangin, Pemohon menyampaikan tambahan Bukti P-16 sampai dengan P-28.

Ya,

disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Pihak Terkait ... Termohon T-1 sampai dengan T-68, Merangin?

**1404.KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [03:08:40]**

Benar, Yang Mulia.

**1405.KETUA: SALDI ISRA [03:08:41]**

Disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-59?

**1406.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR  
180/PHPU.BUP-XXIII/2025: AMIN FAHRUDIN [03:08:44]**

Benar, Yang Mulia.

**1407.KETUA: SALDI ISRA [03:08:47]**

Disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Bawaslu, PK-10.2-1 sampai dengan PK-10.2-114?  
Bawaslu?

**1408.BAWASLU: HIMUN ZUHRI [03:08:58]**

Benar, Yang Mulia.

**1409.KETUA: SALDI ISRA [03:09:00]**

Benar, ya?  
Disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Untuk Termohon, KTA Kuasa Hukum Expired Aulia Nugraha,  
Hasbullah Alimuddin, M. Faiz, Resky Panji, Kuasa Hukum dengan Suket  
Magang atas nama Andre Salsabila, Damas Aditya, M. Afdal Kania Fenisa.  
Kota Ambon, tambahan bukti dari Pemohon P-17?  
Disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Termohon, T-1 sampai dengan T-22?

**1410.KUASA HUKUM TERMOHON: RIDWAN NURROHIM [03:09:32]**

Benar, Yang Mulia.

**1411.KETUA: SALDI ISRA [03:09:33]**

Disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-6?

**1412.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 80/PHPU.BUP-XXIII/2025: BRYAN UMAR [03:09:38]**

Benar, Yang Mulia.

**1413.KETUA: SALDI ISRA [03:09:39]**

Disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Bawaslu, PK-32.10-1 sampai dengan PK-32.10-12?

**1414.BAWASLU: BHRUDIN LA PUKA [03:09:46]**

Benar, Yang Mulia.

**1415.KETUA: SALDI ISRA [03:09:46]**

Disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Sekarang kita masuk ke Buton, Kabupaten Buton Selatan Nomor 80.

Tambahan Bukti Pemohon P-26 sampai dengan P-32?

**1416.KUASA HUKUM TERMOHON: FAJAR MAULANA YUSUF [03:10:03]**

Benar, Yang Mulia.

**1417.KETUA: SALDI ISRA [03:10:05]**

Disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Bukti Termohon, PT-1 ... maaf. Termohon, Bukti T-1 sampai dengan T-52?

**1418.KUASA HUKUM TERMOHON: FAJAR MAULANA YUSUF [03:10:12]**

Benar, Yang Mulia.

**1419.KETUA: SALDI ISRA [03:10:14]**

Ada catatan Bukti T-14 tidak ada. Selain ini lengkap.

**1420.KUASA HUKUM TERMOHON: FAJAR MAULANA YUSUF [03:10:14]**

Ya, betul, Yang Mulia.

**1421.KETUA: SALDI ISRA [03:10:17]**

Betul, ya. Disahkan yang ada.

**KETUK PALU 1X**

Pihak Terkait, Bukti PT-1 sampai dengan PT-22?

**1422.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR  
134/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE SIRLAN [03:10:31]**

Betul, Yang Mulia.

**1423.KETUA: SALDI ISRA [03:10:32]**

Disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Bawaslu Bukti PK-26.15-1 sampai dengan Bukti PK-26.15-125?

**1424.BAWASLU: BAHRUDIN LA PUKA [03:10:40]**

Benar, Yang Mulia.

**1425.KETUA: SALDI ISRA [03:10:41]**

Disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Untuk Buton Selatan Nomor 134, Pemohon tidak menambahkan bukti lagi.

Termohon, T-1 sampai dengan T-5?

**1426. BAWASLU: BAHRUDIN LA PUKA [03:10:42]**

T-1 sampai dengan T-4, Majelis. T-3 itu izin dicabut mengenai DPT.

**1427. KETUA: SALDI ISRA [03:10:44]**

Dicabut, ya?

**1428. BAWASLU: BAHRUDIN LA PUKA [03:10:47]**

Ya, mengenai DPT.

**1429. KETUA: SALDI ISRA [03:10:49]**

Itu berarti T-1 (...)

**1430. BAWASLU: BAHRUDIN LA PUKA [03:10:51]**

T-1 sampai T-4.

**1431. KETUA: SALDI ISRA [03:10:53]**

T-2, T-4, T-5. Begitu, ya?

**1432. BAWASLU: BAHRUDIN LA PUKA [03:10:55]**

Betul.

**1433. KETUA: SALDI ISRA [03:10:57]**

Oke,

disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-8?

**1434. HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 134/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE SIRLAN [03:10:59]**

Benar, Yang Mulia.

**1435. KETUA: SALDI ISRA [03:11:01]**

Disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Bawaslu, Bukti PK-26.15-1 sampai dengan Bukti PK-26.15-11?

**1436. BAWASLU: BAHRUDIN LA PUKA [03:11:04]**

Benar, Yang Mulia.

**1437. KETUA: SALDI ISRA [03:11:08]**

Disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Pengumuman.

Ini untuk perkara ini semua akan dilakukan penundaan sidang. Kami Mahkamah akan melakukan Rapat Permusyawaratan untuk menentukan mana-mana perkara yang akan diteruskan ke pembuktian berikutnya dan mana yang bisa dihentikan di dismissal proses. Jadi, nanti akan ada pengucapan putusan dismissal, semuanya akan diundang. Nah, di situ nanti akan tahu siapa yang akan lanjut dan tidak.

Nah, apabila pemeriksaan ... apabila perkaranya dilanjutkan, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembuktian untuk mendengarkan keterangan saksi dan/atau ahli, dan pengesahan alat bukti tambahan. Dengan ketentuan, karena semuanya di sini bupati dan wali kota, maksimal saksi/ahli adalah 4 orang. oke, 4 orang. Jadi, mau semuanya saksi, mau semuanya ahli, separuh-separuh, pilihannya tergantung kita. Makanya harus bisa menentukan prioritas mana yang akan dibuktikan dari semua dalil yang ada.

Nah oleh karena itu, apabila ada saksi dan ahli tolong daftar saksi siapa saja, daftar ahli siapa saja, identitasnya, ada CV-nya.

Kemudian keterangan saksi. Itu setiap nama saksi dibikin saksi A akan menerangkan apa saja sehingga Hakim bisa menanya berdasarkan pokok-pokok itu akan didalamin oleh Hakim. Kalau ahli, itu nanti ada keterangan ahlinya.

Ini semua sudah harus diterima oleh Mahkamah paling lambat 1 hari ... 1 hari kerja menjelang sidang pembuktian. Nanti kalau tanggalnya 10, berarti tanggal 9 kira-kira begitu.

Dan ini diberitahukan setelah ini tidak ada lagi penambahan alat bukti dan inzage, kecuali bagi perkara yang lanjut ke pembuktian berikutnya dan itu setelah diberitahu nanti, pascaputusan dismissal.

Itu semua, ya. Bisa dipahami, ya? Oke.

Ada yang mau mengajukan pertanyaan dari kelompok Pemohon?  
Cukup?  
Dari Termohon tadi? Apa, Bu? Ya.

**1438.TERMOHON: WAHYUNINGSIH [03:14:04]**

Izin, Yang Mulia, sebelumnya saya mohon maaf di persidangan kita yang terhormat. Saya ingin meralat keterangan yang saya sampaikan tadi, Yang Mulia.

**1439.KETUA: SALDI ISRA [03:14:13]**

Ya.

**1440.TERMOHON: WAHYUNINGSIH [03:14:13]**

Jadi terhadap D.Hasil Keca (...)

**1441.KETUA: SALDI ISRA [03:14:16]**

Ini nomor berapa, Bu?

**1442.TERMOHON: WAHYUNINGSIH [03:14:17]**

59 Labuhanbatu, Yang Mulia.

**1443.KETUA: SALDI ISRA [03:14:19]**

Ya. Apa yang Ibu sampaikan tadi?

**1444.TERMOHON: WAHYUNINGSIH [03:14:22]**

Jadi, terhadap D.Hasil Kecamatan itu ada 6 yang tidak ditandatangani oleh saksi pasangan ... eh, saksi Pemohon.

**1445.KETUA: SALDI ISRA [03:14:30]**

Oke.

**1446.TERMOHON: WAHYUNINGSIH [03:14:31]**

Dan ada 3 yang ditandatangani.

**1447.KETUA: SALDI ISRA [03:14:33]**

Oke.

**1448.TERMOHON: WAHYUNINGSIH [03:14:34]**

Dan ada kejadian khususnya juga, Yang Mulia.

**1449.KETUA: SALDI ISRA [03:14:38]**

Itu disampaikan enggak? Di dalam ... apa ... keterangan?

**1450.TERMOHON: WAHYUNINGSIH [03:14:42]**

Di keterangan ada disampaikan.

**1451.KETUA: SALDI ISRA [03:14:44]**

Nah, oke. Kalau (...)

**1452.TERMOHON: WAHYUNINGSIH [03:14:45]**

Dan (...)

**1453.KETUA: SALDI ISRA [03:14:46]**

Kalo ... apa lagi?

**1454.TERMOHON: WAHYUNINGSIH [03:14:47]**

D.Hasilnya ada kita buktikan, di T-6 sampai T-14, Yang Mulia.

**1455.KETUA: SALDI ISRA [03:14:52]**

Oke. Cukup?

**1456.TERMOHON: WAHYUNINGSIH [03:14:53]**

Cukup, Yang Mulia.

**1457.KETUA: SALDI ISRA [03:14:54]**

Oke, terima kasih.  
Ada lagi yang lain? Pihak Terkait? Cukup.  
Bawaslu? Cukup. Alhamdulillah.

Dengan demikian, kami menyampaikan terima kasih kepada kita semua, baik Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu yang sudah mengikuti agenda persidangan sekarang dengan tertib. Dan kita menunggu nasib masing-masing di dismissal proses, dan sa ... kami tentu berharap kita semua bisa menerima apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

Ini kan satu episode dari perjalanan panjang agenda politik ini. Bagi yang gagal sekarang, mungkin bisa maju lagi nanti atau bagaimanalah segala macamnya kita lihat nanti. Dan katanya, orang politik ini kan, hidupnya berkali-kali, tidak pernah disebut mati berkali-kali, hidupnya berkali-kali. Jadi, masih ada kesempatan-kesempatan berikutnya.

Yang paling penting, semua kita berkepentingan merawat demokrasi ini berjalan baik. Kalau ini tidak dirawat dengan baik, tiba-tiba ... apa namanya ... kita hancurkan ini semua, enggak akan ketemu lagi sidang kayak begini di ruang Mahkamah Konstitusi. Nah, itu yang harus kepentingan kita bisa menja ... apa ... menjaga dan merawat itu semua.

Kami berterima kasih untuk sikap kita itu.

Dan dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan Agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu untuk Perkara 59, 94, 143, 180, 246, 80, 134, PHPU Bupati dan Wali Kota, dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 16.19 WIB**

Jakarta, 23 Januari 2025  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

